



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KOTA BAU-BAU PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
( Studi Kasus Pada Periode 2003 – 2008 )**

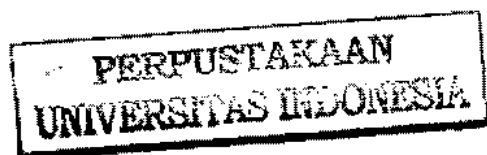
**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)

**M A R S U D I**  
0706307336

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEKHUSUSAN PEMBANGUNAN SOSIAL**

**D E P O K**  
Juli, 2009





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KOTA BAU-BAU PROPINSI SULAWESI TENGGARA  
( Studi Kasus Pada Periode 2003 – 2008 )**

**TESIS**

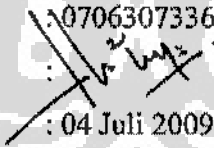
**MARSUDI  
0706307336**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEKHUSUSAN PEMBANGUNAN SOSIAL**

**DEPOK  
Juli, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.




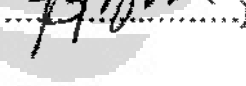
Nama : Marsudi  
NPM : 0706307336  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 04 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Marsudi  
NPM : 0706307336  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Kekhususan : Pembangunan Sosial  
Judul Tesis : Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau  
Propinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Pada Periode  
2003 – 2008)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Priadi Permadi, M.Si (.....)  
Penguji : Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si (.....)  
Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)  
Penguji : Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan, salawat dan salam tak lupa pula dihaturkan pada junjungan kita Rasufullah Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak.

Penulisan tesis dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus pada Periode 2003-2008)” ini dilakukan, selain karena penulis memang bekerja sebagai salah satu aparatur di Pemerintah Kota Bau-Bau, juga berangkat dari rasa ketertarikan penulis yang terhadap fenomena kemiskinan di Kota Bau-Bau, ditengah signifikannya perkembangan pembangunan di Kota Bau-Bau, ternyata tidak berbanding lurus dengan capaian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menekan angka kemiskinan di daerahnya.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, tanpa bimbingan, doa restu dan kasih sayang orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan dan kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dengan penuh ungkapan terima kasih yang tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Priadi Permadi, M.Si, selaku pembimbing tesis yang dengan bimbingan, motivasi dan kesabarannya, mengarahkan dan memberikan masukan yang terbaik dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Fentini Nugroho, Ph.D dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si, selaku ketua dan sekretaris program yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi secara akademis dan keibuan.
3. Bpk. Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si, beserta Ibu dan keluarga besarnya, selaku Walikota Bau-Bau yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam berbagai hal kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.

4. Bapak Drs. Amiruddin, M.Si dan segenap keluarga besar Kantor Kesbang dan Linmas Kota Bau-Bau, atas dukungannya sehingga penulis dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
5. Seluruh dosen pada Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf administrasi program, Pak Wardiyo, Kang Cecep, Mbak Valeri, dan Mbak Yessi yang telah memberikan dukungannya selama perkuliahan.
7. Teman-teman Kessos dan Pemsos angkatan 2006 dan 2007 yang senantiasa berbagi inspirasi, keceriaan dan suka duka lainnya : Rakhmani, Faris, Diana, Pak Edi, Raffi, Ririn, Irma, Neli, Bambang, Maya, Tika, Vektor, Zul, Zam, Hasbullah, Indra, dan teman-teman angkatan 2008/2009 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk persahabatan dan semangat kebersamaan yang terjalin selama perkuliahan semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
8. Teman-teman seperjuangan didalam melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 yang selalu saling memberi semangat dan motivasi dalam meraih cita-cita di Jakarta : Rajab, Tasrifin, Darmin, Yusran, Ibu WD. Sifatu, La Pipi, serta Muh Rasman.
9. Teman-teman sesama aktivis organisasi, yang telah membantu membentuk karakter dan jati diri penulis, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, yang terkadang penuh dengan tantangan dan dinamikanya. Teman-teman di Pengurus dan Panitia Masjid Nurul Falah Lanto, Pengurus HMPS Akuntansi Unhalu, Pengurs BEM Fekon Unhalu, Pengurus Kabinet Mahasiswa Unhalu Periode 2003/2004 dan periode 2004/2004, Pengurus Forkom B2K, Pengurus KMIB Kendari, Pengurus DPD KNPI Sulawesi Tenggara, Pengurus DPD KNPI Kota Bau-Bau, Pengurus DPP FORUM RI 1, dan teman-teman di lembaga-lembaga lainnya.
10. Keluaraga tercinta, Ibunda Almarhumah Musriha, Ayahanda Asinu, Kakak/Adik Sarfan, Artati, Marzuki, Astuti, Abdul Majid, serta kemenakan tercinta Gita dan Vezza, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini,

dengan kondisi keluarga yang sangat sederhana, tapi kita semua telah mampu memperlihatkan bahwa semangat, kerja keras, dan doa dapat membantu dalam menggapai sesuatu yang kita rencanakan.

11. Istri tercinta Marlina Adisty, S.Sos, M.Si yang senantiasa memberikan dukungannya ketika asa terkadang mengalami kegoncangan, perhatian, rasa kasih, kepercayaan, dan kesabarannya sangat membantu dalam segala hal, semoga ALLAH yang maha Rahuman dan Rahim Nya dapat meridhoi rencana-rencana kita untuk hari esok yang lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf yang ada dan penulis berharap semoga ada manfaat dari penulisan ini.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsudi  
NPM : 0706307336  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Kekhususan : Pembangunan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara  
(Studi Kasus Pada Periode 2003-2008)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 04 Juli 2009  
Yang menyatakan

(Marsudi)



## ABSTRAK

Nama : Marsudi  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Kekhususan : Pembangunan Sosial  
Judul : Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara. (Studi Kasus Pada Periode 2003-2008)

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi pustaka, studi dokumentasi, serta FGD. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang secara sengaja dipilih dengan metode purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan pokok bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 telah menggunakan kedua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan, yakni strategi secara tidak langsung dan strategi secara langsung dalam menanggulangi kemiskinan didaerahnya. Namun, hasil temuan lainnya dilapangan menggambarkan pula bahwa masih adanya ketimpangan porsi perhatian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam penggunaan kedua strategi tersebut, sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan secara optimal belum memberikan hasil yang memuaskan.

Kata Kunci :  
Penanggulangan kemiskinan, Strategi Langsung, Strategi Tidak Langsung

## ABSTRACT

Name : Marsudi  
Course Study : Social Welfare Science  
Specialization : Social Development  
Title : Poverty Management Strategy in Bau-Bau City, Province of South East Sulawesi. (Case Study at Period 2003 – 2008)

*This research using qualitative approach with descriptive method. Data collected by using interview, observation, literature study and focus group discussion (FGD). Interview was done to informan whose being chosen purposive by researcher because of the needs of the research. According to the analysis, some principal can be take as conclusion of the research that the Government of Bau-Bau City in period 2003-2008 has been used two general approach in poverty management they are undirect strategy and direct strategy. As shown in the field there are in balance of Government of Bau-Bau City concern in the way of using both strategy, so the optimal result of poverty management in Bau-Bau City, may say, not yet satisfied.*

*Key Words :*  
*Poverty management, Direct Strategy, Un direct Strategy*

## DAFTAR ISI

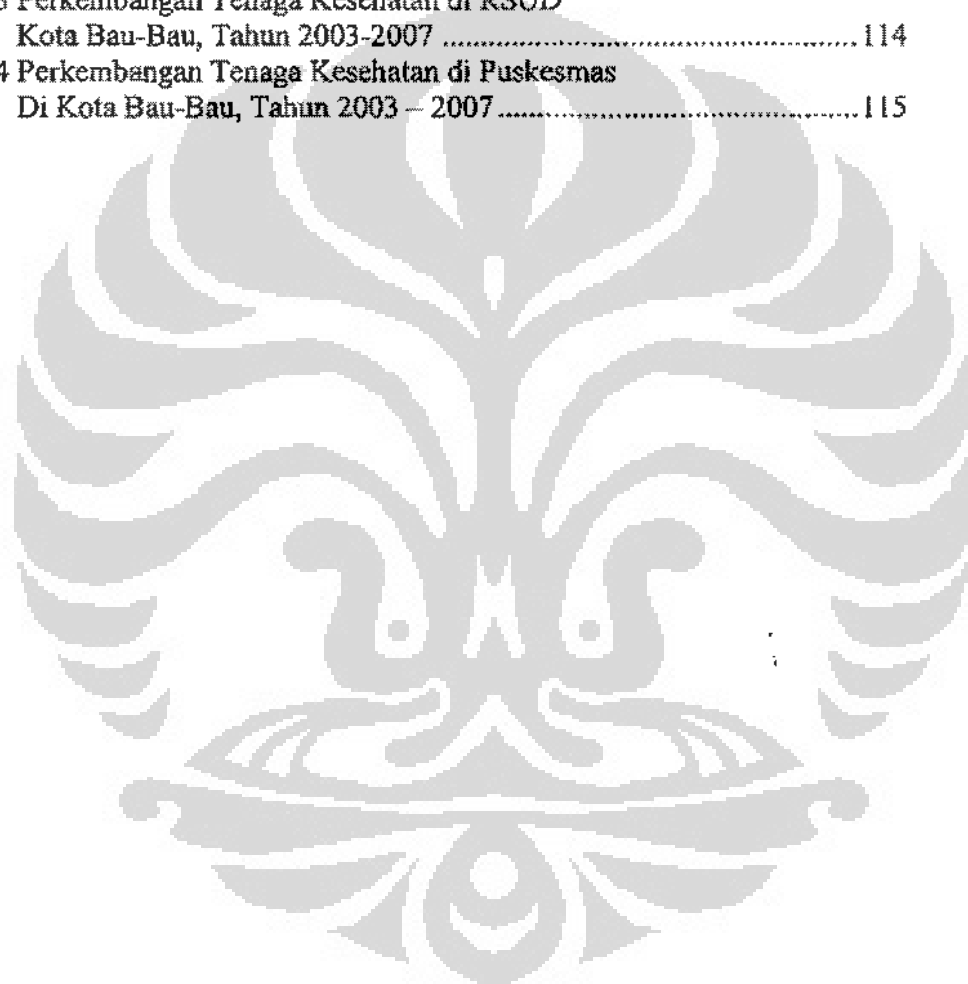
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.5.1 Tempat, Waktu dan Fokus Penelitian .....	15
1.5.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	16
1.5.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulannya .....	17
1.5.4 Informan Penelitian .....	19
1.5.5 Analisis Data .....	22
1.5.6 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian .....	23
1.6 Ruang Lingkup Penelitian .....	24
1.7 Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
2.1 Konsep Pembangunan dan Pembangunan Sosial .....	27
2.2 Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial .....	30
2.3 Kemiskinan .....	34
2.3.1 Definisi dan Ragam Kemiskinan .....	34
2.3.2 Penyebab Kemiskinan .....	41
2.3.3 Indikator Kemiskinan .....	45
2.3.4 Teori Kemiskinan .....	50
2.4 Penanggulangan Kemiskinan .....	55
2.4.1 Strategi .....	55
2.4.1.1 Memahami Strategi .....	55
2.4.1.2 Konsep Strategi Penanggulangan Kemiskinan .....	58
2.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Prog. Penanggulangan Kemiskinan .....	65
2.5 Model Penelitian .....	66

<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
3.1 Sejarah Singkat .....	67
3.2 Letak Geografis .....	70
3.3 Pemerintahan (Visi dan Misi).....	72
3.4 Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	78
3.5 Ekonomi.....	83
<b>BAB 4 HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>89</b>
4.1 Hasil .....	89
4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Kota Bau-Bau .....	89
4.1.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau ....	94
4.1.3 Program dan Kebijakan Penanganan Masyarakat Miskin Ditingkat Kelurahan .....	127
4.2 Analisis .....	133
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>142</b>
5.1 Kesimpulan .....	142
5.2 Rekomendasi .....	144
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Menurut Daerah (1996 – 2005) .....	3
Tabel 1.2	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin Februari 2007 – Maret 2008 .....	4
Tabel 1.3	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi, Maret 2007 – 2008.....	6
Tabel 1.4	Peringkat Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi, Maret 2007 – 2008.....	7
Tabel 1.5	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Sultra Tahun 2005 – 2008 .....	8
Tabel 1.6	Human Development Indeks/HDI Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara .....	11
Tabel 1.7	Theoretical Sampling .....	20
Tabel 1.8	Jadwal dan Rencana Kegiatan Penelitian .....	24
Tabel 3.1	Luas Wilayah Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan .....	72
Tabel 3.2	Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003 – 2007 .....	78
Tabel 3.3	Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan Tahun 2003 – 2007 .....	79
Tabel 3.4	Perkembangan Angkatan Kerja di Kota Bau-Bau Tahun 2003-2007.....	80
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utamanya, 2003 – 2007.....	81
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usahanya, Tahun 2007.....	82
Tabel 3.7	Distribusi PDRB Kota Bau-Bau ADH Berlaku Tahun 2003 – 2007.....	84
Tabel 3.8	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau Menurut Sektor, 2003 - 2007.....	85
Tabel 4.1	Data Masyarakat Miskin Kota Bau-Bau Tahun 2003 – 2008 .....	90
Tabel 4.2	Kondisi Keluarga Miskin di Kota Bau-Bau .....	91
Tabel 4.3	Penyebab Kemiskinan di Kota Bau-Bau .....	93
Tabel 4.4	Panjang, Kondisi dan Kelas Jalan.....	97
Tabel 4.5	Sarana Pendukung Angkutan Darat Di Kota Bau-Bau Tahun 2003 – 2007 .....	99
Tabel 4.6	Sarana Pendukung Angkutan Laut Di Kota Bau-Bau, 2003-2007 .....	105
Tabel 4.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Bidang Pendidikan (Gedung), 2003-2007 .....	107
Tabel 4.8	Jumlah Siswa SD/MI/SLB Kota Bau-Bau Tahun 2003 – 2007 .....	108

Tabel 4.9	Jumlah Siswa SMP/MTs Kota Bau-Bau Tahun 2003 – 2007 .....	108
Tabel 4.10	APK, APM di Semua Tingkatan Tahun 2004 – 2008 .....	110
Tabel 4.11	Jumlah Warga Belajar PLS Kota Bau-Bau Tahun 2003 – 2007 .....	111
Tabel 4.12	Perkembangan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Kota Bau-Bau. Tahun 2003-2007.....	112
Tabel 4.13	Perkembangan Tenaga Kesehatan di RSUD Kota Bau-Bau, Tahun 2003-2007 .....	114
Tabel 4.14	Perkembangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Di Kota Bau-Bau, Tahun 2003 – 2007.....	115



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lingkaran Kemiskinan .....	44
Gambar 2.2	Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS .....	54
Gambar 2.3	Model Operasional Penelitian .....	58
Gambar 4.1	Peta Pembagian Wilayah Kota Bau-Bau .....	99
Gambar 4.2	Pengembangan Lahan Tidak Produktif .....	100
Gambar 4.3	Kantor Walikota Bau-Bau Yang Baru .....	100
Gambar 4.4	Jalan Sebagai Urat Nadi Kegiatan Masyarakat .....	103
Gambar 4.5	Bandara Kota Bau-Bau dan Fasilitasnya .....	105
Gambar 4.6	Sarana Pelabuhan .....	109
Gambar 4.7	Pantai Kamali, Sebagai Ruang Publik Baru .....	111
Gambar 4.8	Dimensi Pengembangan RSUD .....	119
Gambar 4.9	Ruas Jalan Yang Menggunakan Aspal Hotmix .....	123
Gambar 4.10	Pembinaan Pengelolaan Biji Jambu Menté .....	126
Gambar 4.11	Pembangunan Sarana Pasar Malam .....	127
Gambar 4.12	Petani Rumput Laut .....	129
Gambar 4.13	Gedung TK, Kegiatan Fisik PPMK .....	134
Gambar 4.14	Pengrajin Tenun, Kegiatan Non Fisik PPMK .....	135

## DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
Daftar Istilah-istilah Penting.....	1
Peta Wilayah Kota Bau-Bau.....	2
Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau Periode Tahun 2006 – 2008.....	3
Makalah Kepala BAPPEDA Kota Bau-Bau pada Forum Diskusi, sebagai Rangkaian Awal Kegiatan FGD.....	4
Daftar Hadir Peserta Forum Diskusi Publik dengan tema “Cerdas dan Sistematis Menjawab Fenomena Kemiskinan”.....	5
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Forum Diskusi Terarah.....	6
Dokumentasi Kegiatan Forum Diskusi Publik dengan tema “Cerdas dan Sistematis Menjawab Fenomena Kemiskinan”.....	7
Dokumentasi Kegiatan Forum Diskusi Terarah.....	8
Dokumentasi Wawancara dengan para Informan.....	9
Dokumentasi Pelaksanaan Program PPMK.....	10
Pedoman Wawancara.....	11
Transkrip Hasil Wawancara.....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya suatu negara adalah untuk memenuhi kebutuhan standar hidup yang layak bagi masyarakatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, telah dijabarkan dalam mukadimma Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan tegas dijelaskan bahwa salah satu tujuan didirikan negara Indonesia adalah untuk menjamin kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh standar hidup yang layak. Meskipun, pada realitasnya fenomena kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sejak bangsa ini diproklamirkan sebagai negara yang merdeka, masalah kemiskinan senantiasa menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak pernah usai.

Menurut Poerwadarminta (1976) secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti "tidak berharta-benda". Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Sedangkan menurut Mcfate Katherine dan kawan-kawan, kemiskinan dapat diasumsikan sebagai keluarga dengan pendapatan kurang dari separuh pendapatan rumah tangga produktif dalam wilayah tempat tinggal yang tentunya memiliki standar dibawah norma-norma yang diterima dan memiliki kesulitan berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas dan lembaga di wilayah tempat tinggalnya (Mcfate Katherine, Lawson Roger and Wilson Julius William, 1995: 30).

Dalam konsep kesejahteraan sosial, kemiskinan merupakan masalah sosial yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling dikenal orang, bahkan banyak yang



mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial, kemiskinan dapat mempengaruhi masalah sosial lainnya dan begitu pula sebaliknya.

Pemerintah kita memiliki prestasi yang pasang-surut dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Suharto dalam Hasiholan (2007 :13) angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, baik secara absolut maupun relatif, di pedesaan maupun di perkotaan. Meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral, karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas masyarakat akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia meningkat tajam akibat krisis. Data Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat, antara 1996 - 1999 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dari 15 % - 16 % menjadi 27 % - 28 %. Pada puncak krisis, Agustus 1998, penduduk miskin bahkan mencapai 34 % - 39 % dari populasi masyarakat Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Suryahadi dan Sumarto dalam Hasiholan (2007 :12) menunjukkan bahwa dari peningkatan penduduk miskin sekitar 12 % antara 1996 - 1999, lebih dari separuhnya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin dalam kategori kemiskinan kronis. Naiknya angka kemiskinan kronis, terkait dengan kemampuan pemerintah yang makin kecil dalam menyediakan infrastruktur publik untuk kesejahteraan, seperti saran kesehatan, air bersih, dan fasilitas pendidikan.

**Tabel. 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1996-2005**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			% Penduduk Miskin
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota + Desa
1996	9,42	24,59	34,01	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	15,97

*Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Menurut Berita Resmi Statistik (2006) Jumlah dan presentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Namun pada tahun 2006, berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Maret 2008, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk miskin yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

**Tabel. 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Februari 2007 - Maret 2008**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin
<b><u>Perkotaan</u></b>		
Maret 2007	13,56	12,52
Maret 2008	12,77	11,65
<b><u>Perdesaan</u></b>		
Maret 2007	23,61	20,37
Maret 2008	22,19	18,93
<b><u>Kota + Desa</u></b>		
Maret 2007	37,17	16,58
Maret 2008	34,96	15,42

*Sumber : Diolah dari data Susenas Panel Maret 2007 dan Maret 2008*

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen), turun 2,13 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan kemiskinan pada bulan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen.

Sedangkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta. Namun, survei belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, dan di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, dan pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu 63,47 persen.

Sementara itu, akhir tahun 2006, Bank Dunia mengeluarkan sebuah laporan yang memberikan potret yang berbeda tentang angka kemiskinan di Indonesia. Laporan yang diberi judul *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* tersebut menyebutkan bahwa 49 % dari jumlah penduduk Indonesia tergolong miskin. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta, maka jumlah orang miskin adalah 98 juta orang. Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan dan angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas kemiskinan nasional.

Laporan ini kemudian menimbulkan perdebatan hangat. Ada yang menolak, misalnya Biro Pusat Statistik yang menyajikan data kemiskinan di Indonesia dengan angka lebih kecil, yakni 39.1 juta orang. Namun, Ada pula kelompok yang sependapat dengan data Bank Dunia. Pendapat ini lebih didasarkan pada keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan membuka usaha, kesulitan meningkatkan pendapatan, merupakan kenyataan sulit yang dihadapi masyarakat. Karena itu, sebagian orang menganggap bahwa data Bank Dunia tersebut benar adanya, bahkan mungkin jauh lebih banyak. Namun, terlepas dari mana data yang akurat tentang kondisi kemiskinan di Indonesia, paling tidak satu hal yang dapat ditarik dari perdebatan diatas bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi di negara kita.

**Tabel. 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Menurut Provinsi, Maret 2007 – 2008**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin		% Penduduk Miskin	
		2007	2008	2007	2008
1	NAD	1 083,7	959,7	26,65	23,53
2	Sumatera Utara	1 768,5	1 613,8	13,90	12,55
3	Sumatera Barat	529,2	477,2	11,90	10,67
4	Riau	574,5	566,7	11,20	10,63
5	Jambi	281,9	260,3	10,27	9,32
6	Sumatera Selatan	1 333,8	1 249,6	19,15	17,73
7	Bengkulu	370,6	352,0	22,13	20,64
8	Lampung	1 661,7	1 591,6	22,19	20,98
9	Bangka Belitung	95,1	86,7	9,54	8,58
0	Kepulauan Riau	148,4	136,4	10,30	9,18
11	DKI Jakarta	405,7	379,6	4,61	4,29
12	Jawa Barat	5 457,9	5 322,4	13,55	13,01
13	Jawa Tengah	6 557,2	6 189,6	20,43	19,23
14	DI Yogyakarta	633,5	616,3	18,99	18,32
15	Jawa Timur	7 155,3	6 651,3	19,98	18,51
16	Banten	886,2	816,7	9,07	8,15
17	Bali	229,1	215,7	6,63	6,17
18	NTB	1 118,6	1 080,6	24,99	23,81
19	NTT	1 163,6	1 098,3	27,51	25,65
20	Kalimantan Barat	584,3	508,8	12,91	11,07
21	Kalimantan Tengah	210,3	200,0	9,38	8,71
22	Kalimantan Selatan	233,5	218,9	7,01	6,48
23	Kalimantan Timur	324,8	286,4	11,04	9,51
24	Sulawesi Utara	250,1	223,5	11,42	10,10
25	Sulawesi Tengah	557,4	524,7	22,42	20,75
26	Sulawesi Selatan	1 083,4	1 031,7	14,11	13,34
27	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>465,4</b>	<b>435,9</b>	<b>21,33</b>	<b>19,53</b>
28	Gorontalo	241,9	221,6	27,35	24,88
29	Sulawesi Barat	189,9	171,1	19,03	16,73
30	Maluku	404,7	391,3	31,14	29,66
31	Maluku Utara	109,9	105,1	11,97	11,28
32	Papua Barat	266,8	246,5	39,31	35,12
33	Papua	793,4	733,1	40,78	37,08
	<b>INDONESIA</b>	<b>13 559,3</b>	<b>12 768,5</b>	<b>16,58</b>	<b>15,42</b>

Sumber : Data BPS, Maret 2007 – Maret 2008

Tabel diatas menggambarkan angka kemiskinan di tahun 2007 dan 2008 berdasarkan daerah propinsi. Secara keseluruhan angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2007 sebesar 13.559,3 (16,58 persen) dan di tahun berikutnya yakni tahun 2008, angka kemiskinan secara nasional dapat ditekan menjadi 12.768,5 (15,42 persen).

Selanjutnya, menurut Berita Resmi Statistik BPS (2008), tiga propinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil adalah DKI Jakarta (4,29 persen), Bali (6,17 persen), dan Kalimantan Selatan (6,48 persen). Sedangkan, Provinsi Sulawesi Tenggara berada di rangking 23 untuk provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 tentang jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi pada Maret 2007-2008.

**Tabel. 1.4 Peringkat Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2007 – 2008**

No	Provinsi	% Penduduk Miskin	
		2007	2008
1	DKI Jakarta	4,61	4,29
2	Bali	6,63	6,17
3	Kalimantan Selatan	7,01	6,48
4	Banten	9,07	8,15
5	Bangka Belitung	9,54	8,58
6	Kalimantan Tengah	9,38	8,71
7	Kepulauan Riau	10,30	9,18
8	Jambi	10,27	9,32
9	Kalimantan Timur	11,04	9,51
10	Sulawesi Utara	11,42	10,10
11	Riau	11,20	10,63
12	Sumatera Barat	13,90	12,55
13	Kalimantan Barat	12,91	11,07
14	Maluku Utara	11,97	11,28
15	Sumatera Utara	13,90	12,55
16	Jawa Barat	13,55	13,01
17	Sulawesi Selatan	14,11	13,34
18	Sulawesi Barat	19,03	16,73
19	Sumatera Selatan	19,15	17,73
20	DI Yogyakarta	18,99	18,32
21	Jawa Timur	19,98	18,51

22	Jawa Tengah	20,43	19,23
23	Sulawesi Tenggara	21,33	19,53
24	Bengkulu	22,13	20,64
25	Sulawesi Tengah	22,42	20,75
26	Lampung	22,13	20,64
27	NAD	26,65	23,53
28	NTB	24,99	23,81
29	Gorontalo	27,35	24,88
30	NTT	27,51	25,65
31	Maluku	31,14	29,66
32	Papua Barat	39,31	35,12
33	Papua	40,78	37,08
	<b>INDONESIA</b>	<b>16,58</b>	<b>15,42</b>

Sumber : Diolah dari Data BPS, Maret 2007 – Maret 2008

Dari tabel diatas, terlihat bahwa secara nasional angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada ranking 23 daerah yang memiliki angka kemiskinan terkecil dari 33 provinsi di Indonesia, atau dengan kata lain Propinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori 10 besar daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi. Provinsi yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi adalah Propinsi Papua dengan persentase kemiskinan 37,08 persen, dan di susul dengan Propinsi Papua Barat dengan persentase masyarat miskin 35,12 persen.

**Tabel. 1. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2008**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			% Penduduk Miskin
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota + Desa
2005	37,2	413,3	450,5	21,45
2006	29,9	436,8	466,8	23,37
2007	31,3	434,1	465,4	21,33
2008	27,2	408,7	435,9	19,53

Sumber : Diolah dari data BPS Propinsi Sultra

Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 25,4 ribu orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 4,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan tidak banyak berubah. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Propinsi Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi pada periode 2005-2008. Pada periode 2005-2006 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 16,3 ribu orang, yaitu dari 450,5 ribu orang pada tahun 2005 menjadi 466,8 ribu orang pada tahun 2006. Persentase penduduk miskin meningkat dari 21,45 persen menjadi 23,37 persen pada periode yang sama.

Menurut Berita Resmi Statistik (2008) BPS Sulawesi Tenggara, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada bulan Maret 2008 adalah 435,9 ribu orang (19,53 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 465,4 ribu orang (21,33 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun 29,5 ribu orang. Namun, sekali lagi survei ini belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008. Bahkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ([beritasore.com](http://beritasore.com) diakses maret 2009) mengemukakan bahwa sesungguhnya angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga Desember 2007 berjumlah 1.111.000 jiwa dari total penduduk 2,1 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat 52 persen warga Sulawesi Tenggara berada dibawah garis kemiskinan.

Namun, ditengah tingginya angka kemiskinan di propinsi Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bau-Bau sebagai salah satu daerah pemekaran baru di propinsi tersebut, memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dalam melakukan percepatan-percepatan pembangunan di daerahnya.

Selama kurun waktu 2004-2007, perekonomian Kota Bau-Bau menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,50%. Angka ini adalah lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,00% selama kurun waktu yang sama.



Sementara, pendapatan per kapita Atas Dasar Harga (ADH) berlaku penduduk Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,15% atau Rp. 7.567.786,63 per tahun. Apabila pada tahun 2003, pendapatan per kapita ADH berlaku hanya sebesar Rp. 5.166.560,51 atau Rp. 430.546,71 per bulan, maka pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 5.914.626,06 atau Rp. 492.885,51 per bulan. Pada tahun 2005, angka tersebut terus meningkat menjadi Rp. 7.365.270,34 atau Rp. 721.045,27 per bulan, Rp. 8.652.543,26 pada tahun 2006 atau Rp. 721.045,27 per bulan dan pada tahun 2007 menjadi Rp. 10.739.932,99 atau Rp. 894.994,44 per bulan.

Secara riil atau ADH konstan 2000, pendapatan per kapita Kota Bau-Bau tumbuh sebesar 5,80% per tahun atau Rp. 4.191.070,80 per tahun atau hanya Rp. 349.255,90 per bulan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita riil masyarakat Kota Bau-Bau hanya sekitar 55,38% dari pendapatan per kapita nominalnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator lain untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu pun memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Nilai PDRB ADH berlaku Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,07% per tahun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 603.976,09 juta, Rp. 712.724,27 juta pada tahun 2004, Rp. 892.523,46 juta pada tahun 2005, Rp. 1.058.543,49 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 1.338.292,31 juta. Pada sisi lain, nilai PDRB ADH konstan tahun 2000 Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 juga cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,50% per tahun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH sebesar Rp. 437.688,43 juta, Rp. 469.388,76 juta pada tahun 2004, Rp. 506.601,04 juta pada tahun 2005, Rp. 543.827,41 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 584.436,80 juta.

Hal lainnya, menunjukkan pula peningkatan yang relatif cukup baik, Kota Bau-Bau memiliki nilai yang menggembarakan pada laporan *Human Development Indeks* tahun 2005 untuk kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tenggara.

**Tabel 1.6 HDI**  
**By Provinsi and District 1999, 2002, 2005**

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia / Human Development Indeks		
	1999	2002	2005
Buton	62,5	62,8	65,2
Muna	59,8	61,2	64,4
Konawe	62,5	65,0	66,8
Kolaka	62,1	65,3	68,8
Konawe Selatan	na	na	67,6
Bombana	na	na	63,8
Wakatobi	na	na	63,0
Kolaka Utara	Na	na	66,2
Kendari	68,3	70,5	73,4
<b>Bau-Bau</b>	na	na	<b>69,7</b>
<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>62,9</b>	<b>64,1</b>	<b>67,5</b>

Sumber : BPS-BAPPENAS-UNDP

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Kota Bau-Bau menjadi salah satu dari kabupaten/kota yang memiliki nilai HDI diatas nilai HDI dari Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau menjadi daerah rangking kedua yang memiliki nilai HDI tertinggi di Propinsi Sulawesi Tenggara setelah Kota Kendari. Kota Bau-Bau ditahun 2005 memperoleh nilai 69,7 sementara Kota Kendari dengan nilai HDI 73,4. Sedangkan Kabupaten Wakatobi memiliki nilai HDI yang paling rendah, yakni 63,3 dan diikuti dengan Kabupaten Bombana dengan nilai HDI 63,8.

Sedangkan, menurut laporan MDGs Kota Bau-Bau Tahun 2007, menjelaskan bahwa Human Development Indeks Kota Bau-Bau tahun 2006 tercapai 70.60 meningkat 0,70 atau 1% dibanding dengan HDI tahun 2005 sebesar 69.90 mengalami kenaikan 1,60 % dibanding dengan realisasi tahun 2004 sebesar 68.800. Angka HDI Kota Bau-Bau merupakan dua terbesar dipropinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan kriteria tingkat status pembangunan manusia capaian HDI menunjukkan status pembangunan manusia telah mancapai taraf menengah keatas.

Indikator dari *Human Development Indeks* (HDI) meliputi yakni : (a) pendapatan perkapita; (b) akses terhadap pendidikan; dan (c) akses terhadap

kesehatan. Peringkat Kota Bau-Bau pada *Human Development Report* (HDI) tersebut diatas dapat pula menjadi indikator dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut.

Bahkan, capaian-capaian pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 mendapatkan pula pengakuan dan apresiasi dari berbagai kalangan, baik ditingkatan lokal, regional, nasional, maupun ditingkatan internasional. Apresiasi pihak luar terhadap capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam perodesasi 2003-2008 antara lain dalam bentuk :

- a) Drs. MZ. Amirul Tamim selaku Walikota Bau-Bau periode 2003-2008 mendapat penghargaan Cipta Abdi Nusa dari Yayasan Citra Insani Jakarta sebagai tokoh pembangunan yang berhasil atas pengabdian dan jasanya kepada bangsa dan negara.
- b) Penghargaan Satya Lencana Wira Karya oleh Presiden RI, sebagai daerah yang berhasil dalam melakukan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Pedagangan
- c) Penghargaan Satya Lencana Wirakarya oleh Presiden RI, selaku daerah yang berhasil dalam melakukan pembinaan pada keluarga sejahtera
- d) Juara II (Runner Up) lomba penataan ruang perkotaan bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan menyisihkan sekitar 450 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bau-Bau hanya berada dibawah Kota Gorontalo Ibu Kota Provinsi Gorontalo.
- e) Dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksanaan Simposium Internasional Permaskahan IX, yang diikuti oleh 11 negara perwakilan dari luar negeri, disamping perwakilan dari dalam negeri lainnya.
- f) Dipercayakan sebagai Tuan Rumah Seminar Internasional Gerakan Pelestarian Pusaka Indonesia Timur dan Pencanangan Dekade Pusaka Indonesia Timur, yang dihadiri oleh beberapa negara perwakilan dari luar.
- g) Hingga kemudian Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si selaku Walikota Bau-Bau periode 2003-2008 dipercayakan sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI, Sulawesi,

Maluku dan Papua yang beranggotakan 17 Kota di kawasan timur Indonesia

Pertanyaan yang menarik untuk kemudian ditelusuri adalah bagaimana dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih mendasar yakni angka kemiskinan dalam perodesasi 2003-2008? Apakah kemudian capaian-capaian yang diraih dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta indeks pembangunan manusia dalam periode tersebut berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan? Atau justru sebaliknya, bahwa capaian-capaian tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah, yakni di Kota Bau-Bau?

Untuk itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk melihat kondisi kemiskinan di Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menanggulangi kemiskinan diperiodesasi tersebut, serta hal lainnya yang berhubungan dengan program penanggulan kemiskinan yang dilakukan dalam periode tersebut. Suparlan (1999 :xii) mengemukakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah sebuah kebijakan strategis yang mau tak mau mesti diambil oleh pemerintah selaku agen pembangunan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya perbaikan sosial pada segenap lapisan masyarakat.

Adapun topik dari penelitian ini adalah " **Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Pada Periode 2003 - 2008)**". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang dideskripsikan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kondisi dan gambaran kemiskinan di Kota Bau-Bau dalam perodesasi

2003-2008?

- b. Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-2008?
- c. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pada program penanggulangan masyarakat miskin di tingkat kelurahan.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-2008.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-2008.
- c. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pada program penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukanya penelitian tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

- a. **Manfaat Akademis**, yakni :
  - 1) Sebagai refrensi tambahan tentang strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.
  - 2) Untuk memperkaya kajian tentang isu-isu pembangunan sosial

- b. **Manfaat Praktis.** Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Bau-Bau guna optimalisasi penanggulangan kemiskinan di daerahnya pada masa yang akan datang.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1 Tempat, Waktu dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di periode pertama awal berdirinya Kota Bau-Bau (2003-2008). Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini, antara lain :

- a. Angka kemiskinan yang fluktuasi di Propinsi Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada yang menarik dalam konteks Kota Bau-Bau, yakni keberadaannya selaku daerah pemekaran baru yang cukup signifikan pembangunannya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaiannya, yakni antara lain ; (i) Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau dari tahun 2004-2007 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 7,50 persen, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Pendapatan per kapita masyarakat Atas Dasar Harga (ADH) mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata peningkatan diatas 20 persen; dan (iii) Nilai Human Development Indeks (HDI) Kota Bau-Bau dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan angka yang relatif cukup baik, sebagai daerah kedua yang memiliki nilai HDI tertinggi di Sulawesi Tenggara dan berada diatas nilai HDI Propinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Wilayah kerja peneliti ada di lingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara.

Waktu pelaksanaan penelitian lapangan direncanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terhitung mulai pertengahan Maret sampai awal Mei 2009. Sedangkan, proses penelitian pendahuluan sudah dilakukan sejak Januari 2009.

Hal ini dimaksudkan sebagai eksplorasi permasalahan penelitian yang dipilih.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kondisi kemiskinan di Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, dan strategi apa yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dalam periodisasi tersebut. Selanjutnya, penulis juga ingin mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendukung/penghambat dalam pelaksanaan program penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan tersebut.

### 1.5.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" dalam rumusan permasalahan penelitian ini, serta dapat memberikan data atau informasi secara faktual dari kondisi objek penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi dan Hadari tentang pendekatan kualitatif, "Pendekatan kualitatif adalah cara/metode yang digunakan dalam disiplin ilmu sosial untuk mengumpulkan informasi secara faktual dari kondisi suatu obyek, dikaitkan dengan pemecahan masalah yang dilihat baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis".

Sedangkan menurut Patton dalam Hartono (2006 :85) metode kualitatif, berusaha memahami fenomena-fenomena dalam keseluruhannya untuk mengembangkan pemahaman sepenuhnya tentang seseorang, program, atau situasi; dimulai dengan observasi spesifik dan berlanjut dengan pengembangan pola-pola umum yang muncul dari kasus-kasus yang diteliti; dimaksudkan untuk memahami fenomena dalam situasinya yang alami. Sementara, menurut Merriam dalam Creswell (2002 :140) penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar; dan proses penelitian kualitatif bersifat induktif.

Mengacu pada masalah dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang dipilih yaitu **penelitian deskriptif**.

Yang dimaksudkan penulis tentang jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara mendalam data/informasi yang berkaitan dengan pertanyaan "how" atau "why" terhadap variabel-variabel penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Sanapiah (2005 :20) penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

### 1.5.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulannya

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena hakekat dari penelitian adalah mencari data yang nantinya ditindaklanjuti dengan interpretasi dan analisis. Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata, selebihnya adalah data tambahan, antara lain berupa dokumen.

Dalam penelitian ini, data yang di perlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari narasumber atau informan, yaitu berupa kata-kata. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berbentuk dokumen atau catatan-catatan dari instansi terkait.

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka teknik yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu :

- a. **Studi Pustaka dan dokumen**, yaitu kajian literatur tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan topik penelitian, baik yang diperoleh dari buku-buku referensi maupun dari jurnal, bahan kajian, serta dokumen lainnya. Studi ini bertujuan pula untuk merumuskan kerangka pikir dalam penelitian.
- b. **Wawancara**, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan, dengan harapan akan mendapatkan penjelasan pendapat, sikap, dan keyakinan informan yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. Selain itu, penggunaan metode ini oleh peneliti dalam rangka untuk



mendialogkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan, sekaligus ingin menangkap makna dari penuturan, gerak-gerik, kesan serta harapan-harapan yang diekspresikan oleh informan. Tentunya ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam penelitian, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara yang akan menjadi acuan dalam proses wawancara.

Metode wawancara menurut Sanapiah (2005 :52) pada prinsipnya sama dengan metode dalam bentuk angket, perbedaannya pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan (pengumpulan data bertatap muka dengan responden) dalam wawancara. Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Pedoman wawancara menurut Arikunto (2006 :227) ada beberapa jenis, yakni pedoman wawancara terstruktur, pedoman wawancara tidak terstruktur, dan pedoman wawancara semi terstruktur. Dalam penelitian ini, digunakan pedoman semi *structured*, yakni *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.

- c. **Dokumentasi**, yaitu mencari data berupa dokumen atau catatan-catatan terkait sebagai tambahan data primer yang tidak ditemukan dilapangan. Metode dokumentasi menurut Sanapiah (2005 :53) adalah alat pengumpulan data, dimana sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia, termasuk sumber data yang berupa catatan resmi atau *official offormal record*. Disamping itu, yang disebut *secoundary resourch*, juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif (*expressive documents*) seperti biografi, autobiografi, surat-surat, dan buku harian - termasuk juga laporan media massa (*mass media reports*) baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronik lainnya.
- d. **Pengamatan**, menurut Sanapiah (2005 :52,53) metode observasi menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi situasi, proses, atau perilaku. Jadi sumber datanya menunjukkan pada benda apa, kondisi apa, situasi apa, aktivitas apa, dan

perilaku apa atau siapa.

- e. **Diskusi Publik dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD)**, yakni proses pengumpulan informasi dengan melibatkan personal atau individu yang kompeten melalui diskusi yang terarah. Irwanto (2005 :1,2) mengemukakan bahwa FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

#### 1.5.4 Informan Penelitian

Informan menurut Maleong (2001) adalah orang yang dimanfaatkan dalam memberi informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Informan memberi pandangan dari segi orang tentang nilai, sikap, pandangan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar dari lingkungan penelitian dilakukan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model *purposive* dalam menentukan informan. Menurut Arikunto (2006 :228) *purposive* adalah pemilihan informan bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Informan yang dipilih sebagai sumber data/informasi adalah mereka yang dianggap mengetahui dan memahami tentang strategi penganggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, serta yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan ditingkat kelurahan. Adapun rincian informasi dan informan yang dikumpulkan, terangkum dalam *theoretical sampling* sebagai berikut :

Tabel. 1.7 *Theoretical Sampling*

No.	Informasi yang dicari	Informan
1.	Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003-2008, strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan dalam periode tersebut, hal yang melatarbelakangi penggunaan pendekatan tersebut, bentuk program penanggulangan masyarakat miskin di tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut.	Walikota Bau-Bau Periode 2003-2008
2.	Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003-2008, strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan dalam periode tersebut, sejauhmana efektivitas dari penggunaan pendekatan tersebut, efektifitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut.	Pimpinan DPRD Periode 2003-2008  1 orang
3.	Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003-2008, strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan dalam periode tersebut, hal yang melatarbelakangi penggunaan pendekatan tersebut, bentuk program penanggulangan masyarakat miskin di tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut.	Kepala BAPPEDA Periode 2003-2008

4.	Profil kemiskinan di daerah dalam periode 2003-2008, strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan dalam periode tersebut, sejauhmana efektivitas dari penggunaan pendekatan tersebut, efektifitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut.	TKPKD Kota Bau-Bau Periode 2003-2008  1 orang
5.	sejauhmana efektivitas dari penggunaan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, efektifitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dalam periode 2003-2008, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut.	LSM, PT, Ormas, OKP  5 Orang
6.	Bentuk program penanggulangan kemiskinan di kelurahan, model pelaksanaannya, sejauh mana efektifitasnya bagi masyarakat setempat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program	Instansi Tekhnis Penanggung jawab Prog. Penang. Kemiskinan di Kelurahan 2 Orang
7.	Bentuk program penanggulangan kemiskinan di kelurahan, model pelaksanaannya, sejauh mana efektifitasnya bagi masyarakat setempat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program	Pemerintah di Tk. Kelurahan  2 Orang
8.	Bentuk program penanggulangan kemiskinan di kelurahan, model pelaksanaannya, sejauh mana efektifitasnya bagi masyarakat setempat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat	Ormas dan OKP Di TK. Kelurahan  2 Orang

	pelaksanaan program	
9.	Bentuk program penanggulangan kemiskinan di kelurahan, model pelaksanaannya, sejauh mana efektifitasnya bagi masyarakat setempat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program	Masyarakat  5 Orang
	Total	20 Orang

### 1.5.5 Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, yakni deskripsi maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyederhanaan data dalam bahas yang mudah dibaca, dipahami, dan intepretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari jawaban atas penelitian yang dilakukan.

Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka data akan diuraikan sedetil mungkin dengan uraian-uraian kualitatif. Karena itu data yang di peroleh selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif. Artinya, dari data yang di peroleh akan di lakukan pemaparan dan intepretasi secara mendalam, data yang diperoleh dianalisis serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Menurut Moleong (2001), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam proses analisis ini menurut Milles dan Huberman (1992) terdapat tiga komponen analisis, yaitu *reduksi data*, *sajian data*, dan *penarikan kesimpulan*. Analisis

ini dilakukan dalam bentuk interaktif yang berupa siklus.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah: *Pertama* mengorganisasikan seluruh data yang terkumpul, *kedua* pengelolaan data, *ketiga* verifikasi dan penafsiran data, *keempat* mengambil kesimpulan.

a. Mengorganisasikan Data

Data primer yang terkumpul dari hasil wawancara dengan bantuan rekaman ditulis kembali (ditranskripsikan) apa adanya dari komentar responden ke dalam lembar hasil wawancara.

b. Pengelolaan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengelolaan yaitu memformulasikan kategori, yaitu menggolongkan hasil wawancara kepada kategori-kategori yang telah ditetapkan sebagai bahan analisis.

c. Verifikasi dan Penafsiran Data

Teknik ini merupakan satu upaya untuk mencari suatu hubungan, persamaan atau kesimpulan yang muncul seiring dengan semakin banyaknya dukungan data yang diperoleh. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pengelolaan data berupa penjelasan yang rinci berdasarkan teori yang diperoleh dari berbagai literatur dengan data yang diperoleh pada obyek penelitian.

d. Pengambilan Kesimpulan

Setelah melalui tahap verifikasi dan penafsiran data, maka langkah akhir adalah melakukan generalisasi sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan.

### 1.5.6 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu mulai pada pertengahan bulan Maret sampai pada awal Mei 2009.

Adapun jadwal kegiatan penulisan tesis ini adalah sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel. 3.2 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)							
		Des 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	Mei 09	Jun 09	
1.	Penyerahan judul/topic penelitian dan topic <i>Reading Course</i>	⌚							
2.	Masa bimbingan <i>Reading Course</i>		⌚	⌚	⌚	⌚			
3.	Seminar pra – proposal tesis				⌚				
4.	Penelitian dan penulisan tesis					⌚	⌚	⌚	⌚
5.	Masa ujian tesis						⌚	⌚	⌚
6.	Batas akhir penyerahan tesis yang siap di uji						⌚		
7.	Batas akhir ujian tesis							⌚	
8.	Batas akhir penyerahan tesis yang telah di uji								⌚

### 1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan pertimbangan karena keterbatasan peneliti, baik karena keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga. Maka, penelitian ini akan membatasi ruang lingkungannya pada kondisi kemiskinan dan strategi penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau di Periode 2003 - 2008, dengan *locus* kegiatan pada kajian strategi

penanggulangan kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan program penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

- a. Bab 1 berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang dan pokok permasalahan yang mendasari dilakukan penelitian mengenai strategi penanggulangan kemiskinan di daerah. Fenomena kemiskinan yang selalu mengiringi perjalanan panjang bangsa Indonesia, seiring pula dengan tingginya angka kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau sebagai daerah pemekaran baru di Propinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir memperlihatkan hasil-hasil yang cukup baik dalam melakukan percepatan pembangunan. Pertanyaan yang menarik untuk kemudian ditelusuri adalah bagaimana dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih mendasar yakni angka kemiskinan dalam perodesasi 2003-2008? Apakah kemudian capaian-capaian yang diraih dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta indeks pembangunan manusia dalam periode tersebut berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan? Atau justru sebaliknya, bahwa capaian-capaian tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah, yakni di Kota Bau-Bau? Pada Bab ini menjelaskan pula tentang tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini, termasuk manfaatnya bagi kalangan pemerintah, ilmuan dan masyarakat. Sedangkan pada sub bab berikutnya menerangkan ruang lingkup dalam penelitian ini serta tentang metodologi penelitian yang digunakan. Tentang keterkaitan antara sub bab yang satu dengan sub-sub bab lainnya, secara sistimatis di jelaskan pada bagian akhir bab ini.
- b. Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan paparan konsep tentang kemiskinan dan kajian literatur lainnya secara mendalam, sehingga akan



- memperkaya analisa.
- c. Bab 3 berisi tentang gambaran umum dan lokasi penelitian, memaparkan tentang sejarah singkat daerah, letak geografisnya, pemerintahannya, kependudukan dan ketenagaakerjaannya, serta kondisi perekonomiannya.
  - d. Bab 4 berisi tentang hasil dan analisis hasil penelitian. Pada pembahasan ini mencakup ; kondisi kemiskinan lokasi penelitian, karakteristik masyarakat miskinnya, strategi penanggulangan kemiskinan yang di lakukan, serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.
  - e. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi, yakni tentang kesimpulan yang dapat di tarik dari penelitian yang di lakukan, serta saran yang dapat di rekomendasikan dari hasil analisis yang di lakukan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Sosial

##### 2.1.1. Pembangunan

Menurut Todaro (1985) pembangunan harus memiliki tiga komponen dasar (nilai inti), yakni :

- a. Kecukupan : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
- b. Jati diri : menjadi manusia seutuhnya
- c. Kebebasan dari sikap menghamba : kemampuan untuk memilih

Tujuan dari pembangunan menurutnya, adalah :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian pada nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, untuk memperbaiki kesejahteraan dan menumbuhkan jati diri
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, untuk membebaskan dari sikap menghamba dan ketergantungan (baik kepada orang maupun kepada negara bangsa lain atau kekuatan yang dapat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan)

Menurut Seers (1969) pembangunan harus merupakan jawaban terhadap tiga pertanyaan, yakni :

*What has happened to poverty? What has happened to unemployment?  
What has happened to inequality? If all three of these have declined  
from high level, then without doubt this has been a period of  
development for the country concerned. If one or two of these central  
problems have been growing worse, and especially if all three have, it*

*would be strange to call the result "development", even if per capita income doubled. (Yang artinya apa yang terjadi dengan kemiskinan, apa yang terjadi dengan pengangguran, apa yang terjadi dengan kesenjangan. Kalau sudah mengalami penurunan pada tiga hal tersebut, maka dapat di katakan kalau proses pembangunan telah di mulai, namun ketika salah satu dari ketiga komponen tersebut memburuk atau ketiga-tiganya memburuk, maka akan sangat aneh ketika mengatakan ada pembangunan meskipun pendapatan perkapita mengalami peningkatan).*

### 2.1.2. Pembangunan Sosial

Secara umum pembangunan sosial dapat diartikan sebagai proses perubahan yang fokusnya adalah pada manusia dan kualitas hidupnya (Kartasasmita; 1996). Sedangkan Midgley mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dikaitkan dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis (Midgley, 1995: 25). Pembangunan sosial merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dimana tidak hanya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, tetapi juga menanggapi masalah-masalah yang muncul akibat *'distorted development'* karena pembangunan ekonomi tidak diikuti dengan kemajuan sosial (Midgley, 1995: 7). Pembangunan sosial menawarkan suatu perspektif makro yang komprehensif, memfokuskan pada masyarakat, menekankan intervensi terencana yang mengembangkan pendekatan yang berorientasi pada perubahan (*change oriented*) yang dinamis, yang berusaha untuk menyelaraskan intervensi sosial dengan pembangunan ekonomi (Midgley, 1995: 7).

Sebagai penjelasan dari definisi yang dikemukakannya, Midgley menambahkan bahwa sekurang-kurangnya ada delapan aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan paradigma pembangunan sosial, yakni :

- a. Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisahkan secara nyata) dari pembangunan ekonomi.
- b. Pembangunan sosial mempunyai fokus yang interdisiplin yang diambil dari berbagai jenis ilmu sosial.
- c. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar suatu konsep yang dinamis.
- d. Proses perubahan yang terdapat dalam pembangunan sosial pada dasarnya bersifat progresif.
- e. Proses pembangunan sosial adalah *interventionist* (perubahan terencana)
- f. Tujuan pembangunan sosial diusahakan untuk dicapai melalui beberapa strategi
- g. Pembangunan sosial lebih memusatkan kepada populasi sebagai satu kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik
- h. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Adi, 2002 : 116-121)

Pembangunan sosial bisa dilaksanakan melalui beberapa strategi. Menurut Midgley (1995: 102-138) ada tiga strategi didalam melaksanakan pembangunan sosial yaitu :

- a. Pembangunan sosial oleh individu : Menurut pendekatan ini pembangunan sosial bisa dilaksanakan dengan cara : (a) memperkuat *enterprise culture* untuk meningkatkan *social progress*; (b) mengembangkan *small enterprise* bagi masyarakat yang membutuhkan; (c) meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat *individual functioning*. Namun pendekatan ini tampaknya tidak populer didalam pembangunan sosial karena dipandang tidak sesuai dengan komitmen pembangunan sosial yaitu untuk meningkatkan masyarakat melalui intervensi ekonomi dan sosial.
- b. Pembangunan sosial oleh masyarakat : Menurut pendekatan ini, pembangunan sosial bisa dilaksanakan dengan cara (a) pengembangan masyarakat; (b) *community action*, yang berusaha menjangkau kelompok yang paling miskin dan paling tidak berdaya; (c) memfokuskan pada isu gender dan kontribusi wanita.

- c. Pembangunan sosial oleh pemerintah : Menurut pendekatan ini pembangunan sosial bisa dilaksanakan dengan cara (a) perencanaan pembangunan sosial ekonomi secara terpadu; (b) redistribusi sumber-sumber; (c) pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pembangunan berkelanjutan.

Ketiga strategi diatas bisa dipadukan dengan menerapkan *institutional perspective*. (Midgley, 1995: 139) Perspektif ini berusaha untuk memobilisir berbagai institusi sosial termasuk pasar, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus memainkan peranan '*a leading role*' dalam mengharmonisasikan berbagai strategi yang berbeda dan dalam mengelola upaya-upaya pembangunan sosial.

Midgley (1995 :6) megemukakan bahwa salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan, adalah dengan model pembangunan sosial, karena di negara-negara maju, walaupun dengan tingkat perekonomian yang sangat tinggi, tapi memberantas kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sementara itu, Adi (2003 :333,334) mengemukakan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sekurang-kurangnya harus meliputi tiga dimensi, yakni dimensi makro (kebijakan di tingkat pemerintah), dimensi mikro (individu, keluarga, dan kelompok kecil), serta dimensi mezzo (komunitas dan organisasi).

## 2.2. Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial

### 2.2.1. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Suharto (2005 :44) menjelaskan bahwa, kebijakan publik adalah apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan ini juga tidak cukup mengakui bahwa terdapat perbedaan antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara, Anderson dalam Winarno (2002 :16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah dan tindakan yang mempunyai maksud yang

ditetapkan seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian kepada apa yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli tentang kebijakan publik. Santoso dalam Winarno (2002 :16) menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pandangan tentang kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yakni :

- a. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Dalam hal ini dianggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
- b. Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok pula, yakni : *pertama*, mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu; dan *kedua*, mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai keputusan yang memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kelompok pertama memandang kebijakan publik dari proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan (implementasi) dan penilaian kebijakan (evaluasi), sehingga kebijakan publik adalah serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan, kelompok kedua memandang kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan, yaitu kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Menurut Winarno (2002), pada umumnya bentuk kebijakan dapat

dibedakan atas beberapa bentuk, yakni :

- a. Bentuk *regulatory* yaitu mengatur perilaku orang;
- b. Bentuk *redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin;
- c. Bentuk *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu
- d. Bentuk *constituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara

### 2.2.2. Kebijakan Sosial

Beberapa ahli seperti Huttman, Marshall, Rein, dan Magill mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial (Suharto, 1997).

- a. Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, 1981).
- b. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshall, 1965).
- c. Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein, 1970).
- d. Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan

sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (Magill, 1986).

Kebijakan Sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan sosial (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2005). Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun sempit (Kartasasmita, 1996). Sedangkan menurut Conyers (1992 :14) Kata sosial berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Misalnya, setiap orang memiliki hak azasi (*human right*) dan hak sosial (*social right*), seperti kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebebasan dalam menyatakan pendapat, atau berpartisipasi dalam pembangunan. Secara luas kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian.



Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (*disadvantage groups*), yakni para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna Narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

## 2.3. Kemiskinan

### 2.3.1. Definisi dan Ragam Kemiskinan

Menurut Poerwadarminta (1976) secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti "tidak berharta-benda". Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Sedangkan, Mack dan Lansley dalam Jordan (1996 :95) kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan dalam kebutuhan perhatian social. Sementara, Bill Jordan (1996 :96) mengartikan orang miskin : "*The poor are people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market environment*" (yang artinya Orang miskin adalah orang-orang yang karena kekurangan sumberdaya pada dirinya mengakibatkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar/dunia usaha).

Menurut Mcfate Katherine, dkk (1995 :30). Miskin dapat di artikan juga : "*Poor or low income as a household in which the total household income was less than 50 percent of the median adjusted household income of non-elderly households in the country of residence.* (yang artinya miskin atau pendapatan rendah diartikan sebagai rumah tangga yang total pendapatannya lebih rendah dari 50 persen dari rata-rata keseluruhan jumlah pendapatan rumah tangga produktif didalam kesatuan tempat tinggal).

Kemiskinan dapat diasumsikan sebagai keluarga dengan pendapatan kurang dari separuh pendapatan rumah tangga produktif dalam wilayah tempat tinggal yang tentunya memiliki standar dibawah norma-norma yang diterima dan memiliki kesulitan berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas dan lembaga di wilayah tempat tinggalnya (Mcfate Katherine, Lawson Roger and Wilson Julius William, 1995: 30).

Sementara menurut Nasikun (1995), kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan :

“Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya berdiri sendiri, sehingga dalam penanggulangannya menuntut pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian. Di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu mengakomodasikan kedua aspek tersebut.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 dalam Hermawati (2005 :8), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan

adalah masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Dalam konsep kesejahteraan sosial, kemiskinan merupakan masalah sosial yang disandang oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahteraan sosialnya. Sedangkan Heru Nugroho dalam Hermawati menambahkan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga politik dan budaya.

Sedangkan John Friedman dalam Ala (1996 :3) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, yang meliputi : modal yang produktif atau assets, sumber-sumber keuangan (*income* dan kredit yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, *net work* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya. Senada dengan itu, Strahm (1999 :27) mengemukakan bahwa kekurangan pangan di negara dunia ketiga bukan karena keterbatasan bahan pangan, melainkan akibat dari system yang tidak memberi keadilan bagi seluruh masyarakat.

Enzo (1996 :371) menjelaskan tentang kemiskinan :

*"Industrial societies and the social sciences: Poverty is no longer the typical condition of the vast masses in contrast to that of the few rich and powerful, but rather a qualitative threshold that excludes people from the competitive individualistic and consumerist behaviors typical of industrial societies. This is what Adam Smith was pointing out when he referred to the need to possess certain goods without which one would be ashamed to show one's face in society and not have access to the normal opportunities open to others. This is also what Alexis de Tocqueville had in mind when he predicted that in the most advanced industrial societies a number of subjects would be in serious difficulty due to their having*

*no access to sources of subsistence and community solidarity, and thus be destined to depend on state intervention". (yang artinya, menurut masyarakat industri dan ilmu social : kemiskinan tidak lagi merupakan kondisi yang ditandai dengan jumlah yang sangat banyak, yang sangat berkebalikan dengan sedikitnya jumlah orang kaya dan memiliki kekuatan, tetapi lebih kepada pengertian kualitas orang-orang dalam persaingan secara individual dan perilaku konsumtif yang menjadi ciri masyarakat industri. Hal inilah yang dimaksud oleh Adam Smith sewaktu dia merujuk tentang kebutuhan memiliki sumberdaya pasti tanpa seorangpun yang akan merasa malu untuk berhadapan dalam masyarakat dan tidak memiliki kesempatan akses normal yang terbuka terhadap orang lain. Hal ini juga yang ada di pikiran Alexis de Tocqueville sewaktu dia memprediksi bahwa dikebanyakan masyarakat industri yang telah maju akan ada sejumlah orang yang mengalami kesulitan serius karena mereka tidak memiliki akses kepada sumberdaya untuk penghidupannya dan solidaritas masyarakat dan pada akhirnya menjadi tergantung pada intervensi Negara). (Mingione, Enzo, 1996: 371).*

Enzo melanjutkan bahwa umumnya pandangan kita tentang kemiskinan terfokus pada orang-orang yang secara terus-menerus menghadapi kesulitan ekonomi dan oleh karenanya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengertian ini kasar dan menimbulkan macam-macam masalah. Orang-orang menjadi miskin bukan saja karena kepemilikan mereka akan sumberdaya rendah tetapi karena ketidakcukupan kondisi penerimaan secara sosial akan kehidupan dalam sebagian besar sejarah masyarakat.

Sehingga, menurut Enzo, dengan menunjuk secara tepat pada hubungan antara kemiskinan dan integrasi sistem sosial, sangat mudah merekonstruksi rantai logis pengertian proses pemiskinan yang tersituasi

dalam konstruksi sistem kewarganegaraan (Mingione, Enzo, 1996: 371).

*Pertama*, adanya diversifikasi/perbedaan cara pandang terhadap integrasi sosial, pendekatan pertama menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya penurunan integrasi secara bebas terhadap keinginan dan perilaku orang miskin dan adanya keretakan struktural dalam hubungan kewarganegaraan yang seharusnya diperbaiki melalui intervensi untuk memulihkan kesempatan orang miskin dalam persamaan sosial seperti yang dapat dinikmati oleh bukan orang-orang miskin. Pendekatan yang *kedua*, bahwa kondisi kemiskinan dalam banyak kasus merupakan kesukarelaan. Kosekwensinya, tidak lagi dipertanyakan bahwa menolong orang miskin untuk mendapatkan kesempatan, merupakan bentuk dari perilaku khas kebanyakan orang tetapi dengan tetap mengontrol gangguan umum sebagai hasil dari sikap “menyimpang” orang-orang yang tidak pantas masuk dalam kategori miskin.

Dengan demikian, ternyata kemiskinan berwajah majemuk (*multi dimensi*), berubah dari waktu ke waktu, atau dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu penulis sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Faisal (1995 :11) bahwa definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup pengertian kemiskinan yang memiliki berbagai dimensi, antara lain :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan)
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- c. Tidak adanya jaminan masa depan, karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
- e. Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat
- f. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan

- h. Ketidakmampuan untuk berusaha, karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

A.M. Saefudin membagi penyebab kemiskinan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah (*natural poverty*) dan kemiskinan struktural (*structural poverty*). Kemiskinan alamiah disebabkan oleh kondisi alami misalnya cacat mental atau fisik, lahir dari keluarga miskin atau kondisi alam yang tak terduga seperti bencana alam, dan lain-lain. Kemiskinan struktural disebabkan oleh system, nilai dan perilaku bejat manusia. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kita sebagai manusia yang mengambil kebijakan baik dari system dan nilai, serta berperilaku. Banyak bukti yang dapat kita lihat di negeri ini yang menjadi penyebab kemiskinan struktural. Kita dapat melihat perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mendarah daging pada pejabat tinggi sampai pejabat rendah di negeri ini.

Berbagai sudut pandangan tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi. Kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan tersebut, yaitu :

- a. Kemiskinan Individu, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.
- b. Kemiskinan Alamiah, kemiskinan yang disebabkan lebih dikarenakan oleh masalah alam, misalnya kondisi geografis suatu daerah yang tidak mendukung untuk berkembang, atau dapat pula karena faktor-faktor alam lainnya seperti bencana alam
- c. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Erat dengan sikap seseorang

atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya

- d. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

Pada sisi lain, Ilmu-ilmu sosial membedakan pula antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

- a. Kemiskinan absolut, seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang subyektif, ditentukan oleh dirinya sendiri karena membandingkan dirinya dengan masyarakat sekelilingnya.

Sedangkan, Kemiskinan menurut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dalam Hermawati (2005 :8) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronik (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural (*structural poverty*) yang terjadi terus menerus, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis ataupun karena bencana alam.

Enzo (1996 :372) mengemukakan :

*"For very reason the poor have to be divided into the deserving, subjects who are particularly unfortunate but still preserve a moral status shared by the majority of the population and may therefore be helped and the undeserving, those who from the start or during impoverishment lose their moral link with the majority and, consequently should not be helped but merely kept under control. Demarcation line between the deserving and undeserving poor is thrown into crisis by the theory of the "culture of poverty" (yang artinya, sebagai alasan yang nyata orang-orang miskin harus dibagi menjadi*

*orang yang berhak (the deserving), yaitu orang-orang yang tidak beruntung tetapi masih tetap menunjukkan status moral yang sama dengan mayoritas populasi dan oleh karena itu masih dapat ditolong, sementara orang yang tidak berhak (undeserving), merupakan orang-orang yang sejak awal atau selama proses pemiskinan kehilangan hubungan moralnya dengan mayoritas orang dan sebagai konsekuensi tidak perlu dibantu tetapi cukup tetap berada dalam pengawasan/kontrol saja. Garis pemisahan antara orang miskin yang berhak dan yang tidak berhak dikemukakan dalam masa krisis oleh teori yang disebut dengan "budaya kemiskinan".*

### **2.3.2. Penyebab Kemiskinan**

Menurut Sumodiningrat, dkk (1999 :18) jika diteliti secara seksama, kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yakni dari diri sendiri, dan faktor dari eksternal. Faktor dari diri sendiri yakni : (a) tingkat pemilikan faktor produksi yang rendah; (b) kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Baik pendidikan, kesehatan, mapupun ketrampilan; (c) rendahnya tabungan, karena minimnya pendapatan; (d) lemahnya jiwa kewiraswastaan.

Suharto (2007 :74) mengemukakan bahwa ada beberapa kemungkinan penyebab kemiskinan, yaitu : tingkat pengangguran yang tinggi; tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan; keterbatasan fisik atau mengalami kecatatan; masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi emosi; keterlambatan perkembangan mental; biaya kesehatan yang sangat tinggi; ketergantungan alkohol; kecanduan pada obat-obatan; keluarga dengan jumlah anggota yang besar; rendahnya tingkat pendidikan; ketidaksesuaian pekerjaan karena otomatisasi; kurangnya keahlian untuk bekerja; perempuan yang menjadi kepala keluarga dengan anak-anak yang masih kecil; tidak adanya pendapatan tambahan bagi mereka yang berpendapatan tetap; diskriminasi rasial; mendapat label eks "napi" atau "gila"; hidup dalam lingkungan yang sulit mendapatkan pekerjaan; perceraian, atau kematian pasangan; perjudian;



masalah anggaran dan kesalahan dalam mengatur pengeluaran; diskriminasi seksual; korban kejahatan; pemegang prinsip anti-bekerja; mengganggu; pekerjaan dengan upah rendah; dan usia tua.

Hasil simpulan seminar tentang pengentasan kemiskinan (1995 :11,12) merumuskan bahwa penyebab kemiskinan, yakni :

- a. Kolusi antara para pengusaha dan birokrat serta elit militer.
- b. Efek pengikisan balik atau *Backwash effect*, sehingga yang kecil semakin kecil. Suatu sistem nilai yang terdapat didalam hubungan antar masyarakat, ikut menciptakan penduduk miskin. Dalam hal ini masyarakat ikut memberikan andil bagi terciptanya masyarakat miskin.
- c. Aspek kultural yang mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan, misalnya sistem pewaris tanah kepada ahli waris, yang antara lain menyebabkan munculnya petani-petani gurem dan buruh-buruh tani di Jawa.
- d. Tidak adanya teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia yang mengelola teknologi.

Sedangkan, Chambers dalam Hermawati (2005 :8) menyatakan bahwa pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh lima ketidakberuntungan (*disadvanteges*) pada kelompok keluarga miskin, ketidakberuntungan tersebut yakni :

- a. Keterbatasan kepemilikan asset (*poor*)
- b. Kondisi fisik yang lemah (*physically weak*)
- c. Keterisolasian (*isolation*)
- d. Kerentanan (*vulnerable*)
- e. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Atas dasar kelima ketidakberuntungan tersebut, maka Chambers menyatakan, bahwa fenomena kemiskinan seyogyanya dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif dengan suatu pendekatan yang dapat merujuk pada pemahaman tentang kemiskinan terpadu.

Hasil *World Summit For Social Development 1995* dalam Triana (2006 :2), kemiskinan sesungguhnya tidak semata-mata disebabkan oleh masalah-masalah internal orang miskin seperti ; rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar, budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan dan rendahnya kemampuan orang miskin dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun, kemiskinan juga berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang berada diluar jangkauan orang miskin, seperti : (1) rendahnya akses terhadap sumberdaya dasar (pendidikan dasar, kesehatan, air bersih), atau berada didaerah terpencil, (2) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat yang disebabkan karena sistem yang kurang mendukung, (3) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik, (4) bencana alam, (5) kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan menurut Todaro dalam Faisal (1998 :12), variasi kemiskinan antara negara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1). perbedaan geografis, penduduk dan pendapatan, (2). perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia, (4) perbedaan peran sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur perindustriannya, (6) perbedaan derajat ketergantungannya pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sementara, Sumanta (2005 :88,89) mengemukakan bahwa adanya kausalitas melingkar tentang kemiskinan, yakni tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah, Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik per kapita yang rendah, permintaan domestik per kapita yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya. Untuk keluar dari jebakan kemiskinan menurut Sumanta dapat dilakukan melalui kebijakan 7 variabel predeterminan yang masuk dalam model, yaitu kausalitas sumberdaya manusia (tingkat

pendidikan dan kesehatan masyarakat), peran sektor primer dalam perekonomian, ketersediaan infrastruktur (jalan dan listrik), upah riil, kualitas tata pemerintahan (struktur dan komitmen pembangunan).

Menurut Suharto (2007) Terdapat banyak sekali teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun bila disederhanakan, maka terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan, yakni neo-liberal dan demokrat-sosial. Pandangan neo-liberal lebih menekankan pada aspek perorangan ketimbang masyarakat. Bagi pendukung pandangan ini, masyarakat merupakan kumpulan perorangan-perorangan. Masyarakat akan berubah dengan sendirinya bila perorangan-perorangan dalam masyarakat itu sudah berubah. Pandangan neo-liberal melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak mampu membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang dianggap bodoh, malas, dan tidak punya mentalitas berprestasi. Karena itu, program pengentasan kemiskinan lebih berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan kemampuan perorangan.

Pendukung pandangan ini yakin bahwa pasar yang diperluas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan persaingan yang sehat dipasar. Di pasar, terjadi pertemuan antara penjual (produsen) dengan pembeli (konsumen). Ada yang menjual keahlian dan produk, ada pula yang membeli produk atau menggunakan keahlian itu. Kemiskinan terjadi karena orang tidak bisa menjual apa-apa (keahlian atau produk) di pasar. Pasar merupakan ruang dimana masing-masing perorangan, dengan keahlian masing-masing dan dengan produk masing-masing dapat bersaing secara sehat. Orang miskin tidak dapat terlibat di pasar. Mereka tidak bisa menjual apa-apa dan tidak punya uang untuk membeli sesuatu. Sebab, mereka tidak memiliki pengetahuan (*Knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang memadai.

Untuk itu, selain bantuan agar mereka mampu membeli, pendidikan dan pelatihan merupakan cara yang dianggap tepat. Tujuannya adalah menambah

pengetahuan dan keahlian serta membentuk sikap. Dengan harapan, jika orang memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang baik, dia dapat bekerja atau membangun usaha.

Jika neo-liberal menekankan pentingnya perorangan dan pasar yang memberi ruang persaingan sehat sebagai jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan, maka pandangan demokrasi-sosial lebih menekankan aspek struktural. Pandangan ini menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan akibat tersumbatnya kesempatan kelompok miskin. Orang menjadi miskin karena tidak bekerja. Boleh saja seseorang memiliki pengetahuan dan keahlian, tapi sistem perekrutan yang tidak *fair* menyebabkan orang itu tidak dapat bekerja. Begitu juga, jika mereka berusaha, ketidakadilan di pasar menyebabkan mereka tidak mampu bersaing secara sehat. Pasar yang diagungkan oleh kalangan neo-liberal sebagai wilayah tepat untuk memperoleh uang, ternyata tidak sesederhana itu. Orang yang sudah terlanjur kuat dan menguasai pasar dengan barang atau jasa, akan berusaha memperkuat kekuasaannya dengan menghalangi perkembangan pemain lain, menghambat masuknya pemain-pemain baru.

Maka, pandangan demokrasi-sosial membutuhkan peran pemerintah untuk menjaga agar mekanisme pasar dapat dilakukan secara adil. Asumsinya, di pasar selalu ada pihak yang lemah dan kuat. Pemerintah berkewajiban meningkatkan kemampuan pihak yang lemah agar dapat bersaing secara adil di pasar. Dalam mengatasi kemiskinan, pandangan demokrasi-sosial menekankan peran pemerintah dalam memberi jaminan sosial kepada masyarakat.

### 2.3.3. Indikator Kemiskinan

Salah satu ukuran kemiskinan di Indonesia telah diungkapkan oleh Prof. Sajogyo dalam Pramono (2007 :6) bahwa untuk mengukur garis kemiskinan dapat dilihat dari pengeluaran tahunan per kapita dalam nilai tukar beras. Jika dasar itu dipergunakan maka didapatkan ukuran bahwa penduduk dikategorikan miskin jika ia hanya mampu mendapatkan penghasilannya untuk membeli beras

sejumlah 320 kg, sedangkan yang terkategori miskin sekali hanya mampu membeli beras sebanyak 240 kg, dan paling miskin hanya mampu membeli beras sejumlah 180 kg.

Badan Pusat Statistik dalam Pramono (2007 :6) menjelaskan bahwa batas miskin untuk makanan adalah besarnya nilai uang untuk mendapatkan kebutuhan minimum energinya yaitu 2.100 kalori per hari, dan batas miskin untuk bukan makanan adalah besarnya nilai uang untuk memenuhi kebutuhan minimum: perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan aneka barang dan jasa.

Dengan menjumlahkan batas miskin makanan dan batas miskin non-makanan akan diperoleh suatu nilai yang disebut garis kemiskinan. Tetapi ternyata alat ukur pada saat sekarang tidak sesederhana tersebut, karena kemiskinan tidak saja mencakup dimensi pendapatan dan konsumsi perorangan dan keluarga. Kemiskinan merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensi sehingga studi terhadap kemiskinan dapat berasal dari berbagai latar belakang disiplin.

Vivi Alatas dalam Hasiholan (2007 :22), yang merupakan *Ci Task Leader* dalam proyek penulisan laporan kemiskinan di Indonesia tahun 2006 mengatakan bahwa dua kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dalam melakukan penulisan laporan tentang kemiskinan. Kriteria pertama adalah garis kemiskinan nasional, dan kriteria kedua adalah *pruchasing power parity* (PPP). Kedua kriteria tersebut digunakan untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan telaah strategi atau program inti kemiskinan di sebuah negara.

Sedangkan, Hasiholan, dkk (2007 :27,28) mengemukakan bahwa ada beberapa petunjuk yang sering digunakan untuk mengukur kemiskinan, yakni :

- a. GNP (*Gross National Product*) per kapita. Sejauh ini, angka GNP per kapita sangat populer digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Tapi, alat ukur ini sering dikritik, karena sama sekali tidak memuat informasi tentang komposisi, jenis, dan daya guna barang atau jasa,

serta mengesampingkan segi-segi non-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, termasuk biaya sosial dan perusakan lingkungan. Lebih ironis lagi, GNP tidak dapat menjefaskan tentang pembagian pendapatan yang diperoleh masing-masing perorang atau rumah tangga dalam suatu negara. Sehingga, GNP tidak menunjukkan luasnya kemiskinan mutlak.

- b. PPP (*purchasing power parity*), berangkat dari kekurangan pada GNP per kapita, PB mengeluarkan apa yang disebut dengan PP, yang didefinisikan sebagai jumlah satuan mata uang suatu negara yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang atau jasa di pasar dalam negeri, sesuai dengan daya beli US \$ 1 (satu dolar Amerika).
- c. Data tentang pengelompokkan pendapatan penduduk yang berbeda-beda juga merupakan alat untuk mengukur kemiskinan. Pengelompokkan pendapatan itu bisa diukur dengan cara membagi penduduk (rumah tangga) ke dalam kelompok-kelompok pendapatan dan membandingkannya dengan bagian pendapatan yang diperoleh masing-masing kelompok (dalam persen).
- d. Untuk mengukur kemiskinan mutlak biasanya digunakan pendekatan garis kemiskinan yang menunjuk pada pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok. Batas kritis pendapatan minimum sering tidak jelas karena tergantung pada keputusan pemerintah. Mengingat kondisi sosiokultural di setiap negara berbeda-beda, maka garis kemiskinan di suatu negara tidak sama dengan indikator kemiskinan di negara lain.

Hermawati (2005 :9) menjelaskan bahwa untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori fakir miskin atau tidak, dapat dilihat dari indikator kemiskinan yang merupakan indeks pengeluaran makanan dan non makanan yang digunakan sebagai standar garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan menurut BPS merupakan sejumlah uang yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kalori per orang per hari, dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian,

kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang atau jasa yang lain. Individu dengan pengeluaran lebih rendah daripada garis kemiskinan disebut penduduk miskin, yang terdiri dari penduduk tidak fakir dan penduduk fakir miskin.

Sementara, Mikelsen (1999 :200) menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur melalui kekurangan pendapatan dan konsumsi, tetapi juga indikator yang dapat diukur dapat memperluas gambaran mengenai kemiskinan. Kesehatan, harapan hidup, kemudahan untuk memperoleh pendidikan dan air bersih merupakan indikator-indikator yang penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran, bila tidak ada ini merupakan pertanda adanya kemiskinan.

Sedangkan, Rahman, dkk dalam Mikelsen (1999 :202) mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan keadaan menderita tetapi juga adalah suatu keadaan lemah. Untuk kaum wanita, kelemahan mungkin merupakan dimensi pengalaman kemiskinan yang lebih terasa. Sebagai suatu aspek dari kemiskinan, kelemahan terurai menjadi tiga indikator penting, yakni ketidakpastian fisik, selalu menghadapi krisis dan ketidakmampuan menangani masalah. Indikator ketidakpastian berkaitan dengan tingkat kekerasan dan intimidasi yang memasuki kehidupan sosial dan kelembagaan serta hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan demikian terhadap kegiatan mata pencaharian golongan miskin.

Ukuran kemiskinan menurut beberapa lembaga atau badan dalam Maarif, dkk (2007 :63) yakni sebagai berikut :

- a. BPS. Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, kurang dari 2.100 kalori per kapita. Kriteria kemiskinan menurut BPS tahun 2006 dalam Maarif, dkk (2007 :27) yakni :
  - Penghasilan Rp. 120.000 ribu/bulan, 1900 kkal/hra sangat miskin
  - Penghasilan Rp. 150 ribu/bulan, 2100 kkal/hra hampir miskin
  - Penghasilan Rp. 175 ribu/bulan, 2300 kkal/hra hampir miskin.
- b. BKKBN. Sebuah keluarga dikatakan miskin apabila : (tidak dapat

melaksanakan agama menurut agamanya, (b) seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, (c) seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan berpergian, (d) bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, dan (e) tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

- c. BAPPENAS. Tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kriteria keluarga miskin menurut PKPS-BBM BIDKES dalam Maarif, dkk (2007 :27) yakni :

- a. Keluarga yang tidak bisa makan dua kali sehari
- b. Keluarga yang tidak mampu membayar pengobatan atau pelayanan kesehatan anak/anggota keluarga yang sakit
- c. Kepala keluarga yang terkena PHK massal,
- d. Keluarga dengan anak yang "drop-out" sekolah karena masalah ekonomi.
- e. Seseorang yang berpenghasilan sama atau kurang dari US \$ 1 per hari.

Sedangkan, kriteria rumah tangga miskin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Maarif, dkk (2007 :28) yakni :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- b. Lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan tetangga lain
- e. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar
- h. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu,
- i. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
- j. Tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas / poliklinik
- k. Sumber penghasilan rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0.5 ha,



- buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dibawah Rp. 600.000 per bulan
- l. Pendidikan tinggi kepala runah tangga : tidak sekolah /tidak tamat SD / hanya SD
  - m. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

#### 2.3.4. Teori Kemiskinan

Secara konseptual, menurut Suharto (2007 :75) ada beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kemiskinan, yakni perspektif budaya miskin, perspektif fungsionalis, perspektif konflik, dan perspektif interaksionis.

##### a. Teori Budaya Miskin

Pada dasarnya kasus kemiskinan diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam lingkaran kemiskinan. Beberapa tokoh menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena adanya budaya miskin. Oscar Lewis seorang antropolog dalam Suharto (2007 :75) pernah melakukan studi dan mengembangkan teori kemiskinan budaya. Lewis meneliti kondisi lingkungan miskin di berbagai belahan dunia dan berhasil menyimpulkan bahwa kelompok miskin menjadi miskin karena gaya hidup mereka dipengaruhi oleh budaya tertentu.

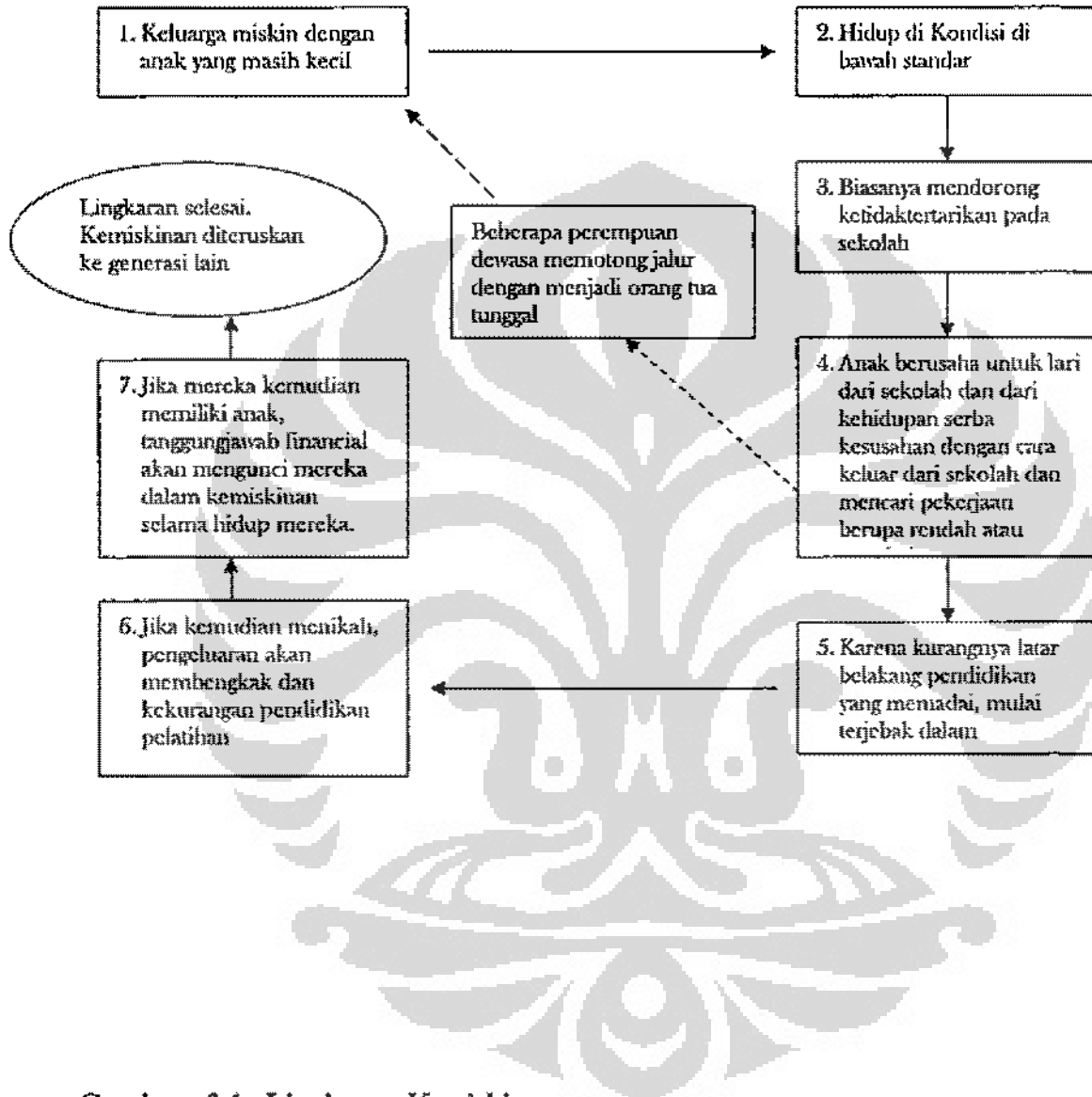
Budaya kemiskinan berkembang di masyarakat kapitalistik setelah periode keterpurukan ekonomi yang cukup lama. Keterpurukan ini antara lain disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran akibat kurangnya keahlian kerja serta rendahnya upah yang diterima pekerja kala itu. Kondisi ini menciptakan perkembangan tingkah laku dan nilai yang penuh keputusasaan. Menurut Lewis, individu yang dibesarkan dalam budaya kemiskinan memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan (fatalisme). Mereka menjadi tergantung, merasa lebih rendah dari yang lain serta enggan untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.

Mereka cenderung berorientasi pada masa kini tanpa memperhatikan rencana masa depan, serta bertoleransi tinggi pada segala jenis penyakit fisik.

Sekali budaya miskin berkembang, sangat sulit untuk dihentikan. Meskipun faktor ekonomi penyebab munculnya budaya ini, misalnya kurangnya tingkat kesempatan kerja sudah hilang, budaya kemiskinan seperti malas sulit hilang. Alasan utama kelompok miskin terjebak dalam budaya ini adalah karena mereka terisolasi sosial. Mereka memiliki hubungan yang sangat terbatas dengan kelompok lain di luar budaya mereka serta memusuhi pelayanan sosial dari institusi pendidikan yang mungkin dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Mereka menolak berhubungan dengan institusi semacam itu, karena menganggap institusi tadi sebagai milik kelas dominan dan penguasa. Selain itu, karena kondisi keuangan mereka yang memprihatinkan serta kemampuan berorganisasi dan berpolitik yang rendah, menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kolektif untuk menyelesaikan masalah mereka.

Teori budaya kemiskinan mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Eleanor Leacock dalam Suharto (2007 :77) beranggapan bahwa budaya miskin bukan penyebab melainkan akibat dari kemiskinan yang terjadi terus menerus. Diantara orang miskin mungkin saja ditemukan sikap malas, dan enggan menabung. Tetapi, kedua sikap itu bukanlah penyebab mereka miskin, melainkan akibat dari kemiskinan. Karena miskinlah mereka sehingga tampak malas dan tentu saja tidak suka menabung, bukan sebaliknya. Bahkan William Ryan dalam Suharto (2007 :77) mengkritik secara lebih keras lagi. Ryan mengungkapkan bahwa teori budaya miskin hanya merupakan bentuk klasik konsep "menyalahkan korban". Menurutnya, menyalahkan kelompok miskin merupakan alasan yang paling mudah dilakukan untuk menghindari kewajiban membuat program dan kebijakan yang dibutuhkan guna menghilangkan kemiskinan. Ryan secara tegas menyatakan bahwa yang patut disalahkan adalah sistem sosial yang

memberikan kesempatan bagi munculnya kemiskinan.



**Gambar. 2.1. Lingkaran Kemiskinan**

*Sumber : Zastrow dalam Suharto (2007 :76)*

## b. Teori Fungsionalis

Parson dalam Suwarsono (2006 :10,11) mengatakan bahwa masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Seperti tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat menurut Parsons juga mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Parsons menggunakan konsep sistem" untuk menggambarkan koordinasi harmonis antar kelembagaan tersebut.

Teori fungsionalis memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakberfungsian ekonomi. Perkembangan industrialisasi telah menghancurkan sistem ekonomi. Contohnya, kelompok yang tidak memiliki keahlian kerja dipaksa untuk melakukan pekerjaan kasar dengan upah rendah. Ketika tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi, mereka ditinggalkan tanpa pekerjaan, tanpa uang atau keahlian.

Teori ini juga mencatat bahwa sistem kesejahteraan yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan memiliki beberapa efek sampingan. Menurut para penganut fungsionalis, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan melakukan penyesuaian untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut. Selama ini kelompok miskin hanya menikmati sedikit hasil dari pertumbuhan ekonomi serta tidak memperoleh penghargaan sosial dari masyarakat karena status mereka yang berada dilapisan bawah dalam stratifikasi sosial.

## c. Teori Konflik

Teori ini memandang bahwa masyarakat modern memiliki begitu banyak kemakmuran. Karenanya, kemiskinan ada karena struktur kekuatan menginginkannya untuk ada. Mereka memandang bahwa kelompok pekerja miskin telah dieksploitasi serta dibayar dengan upah yang rendah agar kelompok kaya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan hidup

lebih makmur. Para penganggur juga dilihat sebagai korban dari struktur kekuasaan. Menurut teori ini, kelompok kaya memegang teguh prinsip individualisme. Mereka memandang pengangguran dan kemiskinan bukan sebagai bentuk ketidakadilan atau kondisi diluar kontrol seseorang, melainkan disebabkan oleh kurangnya usaha seseorang untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Menurut perspektif ini, kemiskinan menjadi masalah sosial ketika beberapa kelompok memandang distribusi sumberdaya yang ada saat ini dirasa tidak adil, dan mereka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi tersebut. Para tokoh dari perspektif ini percaya bahwa kemiskinan dapat dihilangkan dengan cara melibatkan kelompok miskin dalam kegiatan politik dan pemerintahan serta mengatur kelompok miskin untuk mengurangi ketidakadilan. Kemiskinan dapat dikurangi secara signifikan melalui kegiatan politik yang melibatkan kelompok miskin dan mendapat dukungan dari kelompok penguasa. Orang miskin biasanya memandang kemiskinannya sebagai nasib yang tidak bisa dirubah. Mereka seakan-akan telah menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi kemiskinannya. Perspektif ini melihat penyesuaian kelompok miskin terhadap kemiskinan merupakan mata rantai yang harus diputus.

#### d. Teori Interaksionis Simbol

Penganut teori interaksionis memandang kemiskinan sebagai masalah pembagian harapan. Kelompok miskin memperoleh penilaian negatif dari kelompok berpengaruh. Mereka yang menjadi obyek *labelling* tersebut akan mencap dirinya negatif dan mulai berlaku sama dengan harapan oranglain terhadap mereka. Kelompok ini percaya bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah pengambilan hak ekonomi melainkan juga masalah konsep diri seorang individu. Sebagai contoh, seorang pekerja yang dahulu pernah menerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah akan melihat dirinya lebih negatif daripada rekan pekerjaannya yang berusaha

sendiri untuk dapat bekerja ditempat tersebut, walaupun jumlah pendapatan mereka sama.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kelompok interaksionis mendesak agar stigma dan pandangan negatif yang dihubungkan dengan kemiskinan segera dihilangkan. Perubahan positif dalam masalah kemiskinan tidak akan terjadi hingga kelompok miskin diyakinkan bahwa mereka tidak akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Masalah kemiskinan dapat diatasi melalui program bantuan sosial yang dikombinasikan dengan program pemberian kesempatan bagi kelompok miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, serta program yang mendorong kelompok miskin untuk mendefinisi lingkungan sosial mereka secara lebih positif.

Teori ini juga menekankan pada dampak psikologis yang dihadapi kelompok miskin ketika bersentuhan dengan masyarakat yang mayoritas kaya. Setelah membandingkan kondisi mereka dengan kelompok kaya, sebagian dari kelompok miskin meyakini bahwa mereka telah gagal sehingga mereka membatasi diri mereka dan bukan berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan identitas gagal yang mereka sandang, mereka mulai menarik diri dari masyarakat, tenggelam dalam masalah emosional akibat persepsi yang mereka buat sendiri. Mereka seringkali menggunakan narkoba sebagai jalan keluar atas permasalahan hidup mereka atau melakukan pencurian dan tindak kriminalitas lainnya untuk memperoleh barang-barang yang tidak mungkin mereka peroleh secara legal.

## **2.4. Penanggulangan Kemiskinan**

### **2.4.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

#### **2.4.1.1. Memahami Strategi**

Istilah strategi berasal dari kata Yunani yakni *strategos*, seorang jenderal dalam militer. Satu definisi umum dalam kamus adalah suatu "prosedur untuk mencapai tujuan" (Ostad 1997a:9. Kamus *Pocket*

*Oxford* mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis dan politik atau pada bidang lainnya. Masalah definisi strategi ini sangat bervariasi dalam studi penelitian. Pada awal tahun 1970-an, istilah tersebut memiliki konotasi yang pasti. Istilah tersebut mengacu pada suatu prosedur untuk melatih butir-butir yang harus dipelajari dalam eksperimen memori; umumnya merupakan prosedur latihan yang spesifik. (Ostad 1992a: 9).

Sebagaimana dikemukakan diatas, strategi dapat didefinisikan secara sangat sempit. Dalam beberapa penelitian dan kajian, strategi mengacu pada suatu prosedur yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam definisi yang paling sederhana dan paling jelas, strategi adalah perilaku pemecahan masalah yang terorganisasi yang diarahkan pada pencapaian sebuah tujuan. Dalam kasus-kasus lain, strategi dipandang sebagai entitas yang relatif besar, yang meliputi berbagai cara untuk mencapai tujuan, yang meliputi "semua" proses yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas.

Terdapat sekurang-kurangnya dua macam cara fundamental untuk mendefinisikan strategi (1) sebagai aktivitas yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan, atau (2) sebagai aktivitas yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan juga termasuk proses sebelum pemilihan yang menghasilkan keputusan untuk menggunakan prosedur tertentu guna memecahkan masalah.

Akhirnya, dari beberapa definisi tentang strategi diatas, peneliti sependapat dengan pengertian singkat tentang strategi yang dikemukakan oleh Alfred Chandler (1962), yang mengartikan strategi sebagai penetapan sasaran, tujuan dan arah tindakan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.

Urutan manajemen strategi diberi istilah MOST : *Mission* (misi), *Objective* (tujuan), *Strategy* (strategi), *Tactics* (taktik). Urutan MOST itu mencakup proses spesifikasi yang meningkat. Dimulai dengan sasaran

organisasi secara keseluruhan, dilanjutkan dengan menerangkan sejelast-jelasnya sasaran itu dalam suatu bentuk yang berorientasi pada tindakan, mengidentifikasi strategi dan tujuan-tujuan yang diupayakan untuk dicapai oleh strategi tersebut, dan akhirnya menentukan taktik-taktik tersebut.

*Mission* (misi) Mengartikulasikan tentang perusahaan yang sebenarnya dan apa yang akan dicapai. Misi timbul bukan sebagai suatu konsep melainkan sebagai suatu pernyataan. Pernyataan misi mengartikulasikan :

- a. Sasaran umum ke dalam tema utama strategi
- b. Mencerminkan pernyataan strategi yang luas
- c. Pernyataan identitas
- d. Arah jangka panjang

Sebagai pernyataan identitas dan arah jangka panjang, adalah penting sekali kalau misi harus dapat memberikan bimbingan, disamping tidak menimbulkan kendala terhadap peluang dan fleksibilitas.

*Objective* (tujuan) Gambaran tujuan meliputi menerjemahkan pernyataan misi ke dalam sasaran organisasi secara lebih cermat. Tujuan-tujuan terfokus pada kinerja, khususnya pada kinerja yang dapat diukur. Sementara pernyataan misi mengandung falsafah konsep dan ambisi bisnis, maka tujuan-tujuan organisasi cenderung kuantitatif. Keuntungan menetapkan tujuan-tujuan yang khusus, dapat dinilai, dan berhubungan dengan jangka waktu tertentu adalah :

- a. Tujuan-tujuan bertindak sebagai target yang “merentangkan” dan harus dicapai oleh organisasi
- b. Tujuan-tujuan dapat mengurangi konflik dan memberikan sarana tukar-menukar diantara tujuan-tujuan yang lebih rendah. Jadi penetapan target profitabilitas yang jelas, dalam kaitannya dengan pendapatan atas harta dan pendapatan atas modal yang digunakan.



*Strategy (strategi)* Mengidentifikasi pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan tujuan. Pentingnya keputusan strategi berkaitan dengan sumber daya perusahaan, yang pada akhirnya merupakan penuntun penyebaran sumber daya.

*Tactics (taktik)* Tindakan, prosedur, serta manuver untuk menang di dalam persaingan. Keputusan taktis berhubungan dengan seluruh kisaran keputusan fungsional dari hari ke hari yang dibuat oleh para manajer di seluruh organisasi. Hal ini penting karena keputusan taktis melibatkan definisi dan implementasi strategi. Yang penting disini adalah hubungan antara formulasi strategi dan implementasinya melalui keputusan-keputusan taktis serta tindakan setiap anggota organisasi.

#### 2.4.1.2. Konsep Penanggulangan Kemiskinan

Mochammad Said dalam Pramono (2007 :11) menjelaskan bahwa strategi anti kemiskinan dua tahap, yang terdiri dari :

- a. Tahap pertama memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai, dan
- b. Tahap kedua adalah strategi swadaya setempat.

Strategi tahap pertama, merupakan tahap untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan. Namun, strategi tahap pertama ini jelas tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan dalam jangka panjang, bahkan bila tidak ditindaklanjuti justru bisa menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi tahap kedua, yaitu strategi swadaya setempat (*local self-reliance*) dengan harapan bisa membangkitkan partisipasi aktif kelompok miskin dalam menggali potensi-potensi setempat secara aktif. Sekaligus strategi ini mengoreksi dan berusaha memperbaiki kelemahan masing-masing sehingga masyarakat miskin bisa memecahkan masalah dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dennis Gouillet dalam Pramono (2007 :12) berpendapat bahwa

pembangunan memiliki tiga komponen utama, yaitu kelangsungan hidup (*life sustenance*), Jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Pramono (2007 :12) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) dasar pemikiran dalam orientasi pembangunan yang berpusat pada manusia. Terdapat 3 (tiga) dasar pemikiran dalam orientasi pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu :

- a. Memusatkan pemikiran, tindakan, kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memnuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas.
- b. Mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem yang swa-organisasi; dan
- c. Mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Adi (2002 :153) menuliskan bahwa pendekatan *people-centered development* memperlihatkan pula adanya sinkronisasi antara pembangunan yang memfokuskan ekonomi, dan ekologi serta keadilan. Dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia didalamnya terdapat pula unsur partisipasi, demokrasi dan transparansi yang merupakan bagian yang sedang dikembangkan di Indonesia dewasa ini. Sehingga cakupan dari pendekatan ini bukan semata pada kemandirian ekonomi belaka. Nilai-nilai dasar yang dianggap universal dalam pendekatan *value-based people-centered development* adalah :

- a. Partisipasi (*participation*);
- b. Kestinambungan (*sustainability*);
- c. Integrasi sosial (*social integration*); dan
- d. Hak-hak dan kemerdekaan asasi manusia (*human rights and fundamental freedoms*).

Tegasnya, kelompok masyarakat miskin harus memiliki suara dalam penentuan pilihan-pilihan akhir yang akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Berger (2005 :xx) mengungkapkan bahwa manusia berhak atas partisipasi, dan hak partisipasi itu juga mencakup segi kognitif. Jadi, manusia juga berhak untuk ikut serta dalam menafsirkan dan memaknakan dunia dan kenyataan yang dihadapi. Kalau tidak demikian, maka sangat besarlah bahaya bahwa rakyat menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil terlepas dari pengetahuan dan kepentingan-kepentingan rakyat itu sendiri.

Sedangkan Tan, dkk (2003 :10) mengungkapkan bahwa rakyat harus terus-menerus diajak berpikir dan menganalisis secara kritis keadaan dan masalah mereka sendiri. Hanya dengan demikian mereka akan mampu memiliki wawasan baru, kepekaan dan kesadaran yang memungkinkan mereka memiliki keinginan untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk merubah keadaan yang mereka alami. Karenannya diperlukan pemindahan *locus* pengambilan keputusan dari pemerintah kepada masyarakat, dan untuk itu diperlukan perubahan mendasar (reformasi) bukan hanya dalam struktur administrasi tapi juga dalam struktur politik.

Midgley (1995 :6) mengemukakan bahwa salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan, adalah dengan model pembangunan sosial, karena di negara-negara maju, walaupun dengan tingkat perekonomian yang sangat tinggi, tapi memberantas kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sementara itu, Adi (2003 :333,334) mengemukakan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sekurang-kurangnya harus meliputi tiga dimensi, yakni dimensi makro (kebijakan ditingkat pemerintah), dimensi mikro (individu, keluarga, dan kelompok kecil), serta dimensi mezzo (komunitas dan organisasi).

Dari beberapa rumusan strategi penanggulangan kemiskinan di atas, penulis mengutip pula strategi penanggulangan kemiskinan yang di kemukakan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional dalam Perencanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Dalam rencana strategi penanggulangan kemiskinan nasional, di kemukakan bahwa ada dua pendekatan dan empat pilar utama penanggulangan kemiskinan. Dua pendekatan itu yakni : (a) meningkatkan pendapatan; dan (b) mengurangi beban.

Pendekatan meningkatkan pendapatan memiliki dua pilar utama, yakni : (a) perluasan kesempatan; dan (b) pemberdayaan masyarakat miskin. Sedangkan, pendekatan mengurangi beban memiliki dua pilar utama pula, yakni : (a) peningkatan kemampuan/*human capital*; dan (b) perlindungan social.

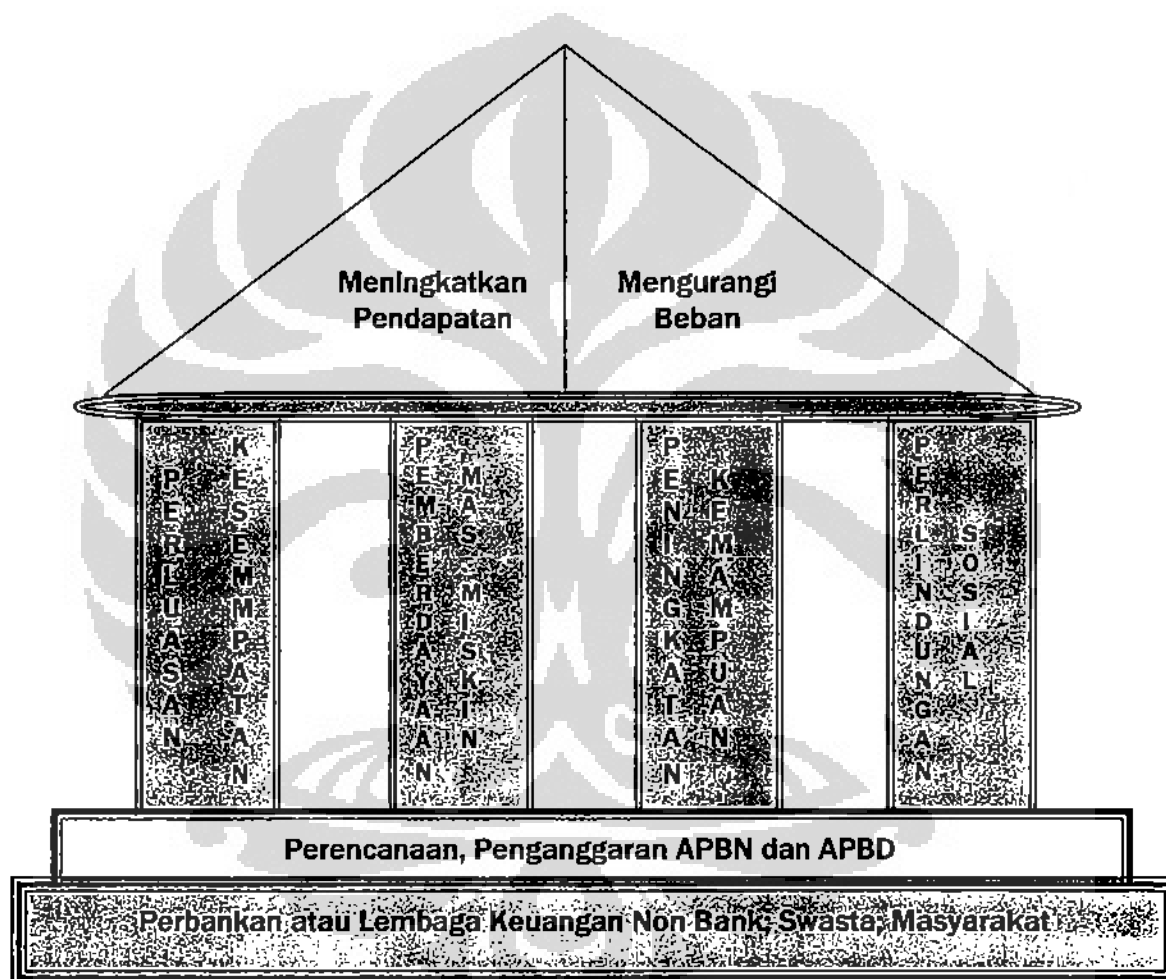
*Perluasan kesempatan*, menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

*Pemberdayaan masyarakat miskin*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang di hadapi masyarakat miskin.

*Peningkatan Kemampuan/human capital*, peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individu atau kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan, melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketrampilan usaha, per modalan, prasarana, teknologi, serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap

perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial).

*Perlindungan sosial*, memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (*Vulnerable*), seperti : pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, konflik sosial, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.



**Gambar 2.2 Dua Pendekatan dan Empat Pilar Utama Penanggulangan Kemiskinan Menurut BAPPENAS.**

Dari beberapa uraian tentang strategi penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan sebelumnya, penulis menyajikan pula pandangan Winarto tentang strategi dalam menanggulangi kemiskinan, pandangan ini selanjutnya menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Winarto (2002) mengemukakan bahwa pada dasarnya siasat atau strategi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan besar, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

*Pertama*, siasat pembangunan yang menggunakan cara tidak langsung dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk memperbesar "kue ekonomi nasional". Bila barang dan jasa tersedia sistem lebih dari cukup maka melalui proses *trickle down effect* dapat terbagi pada seluruh anggota masyarakat termasuk kaum miskin.

*Kedua*, yang merupakan hasil kritik pertama. Berdasarkan pengalaman di India dan Pakistan, Mahbub UI (1995: 34) berpendapat bahwa memerangi kemiskinan dengan cara tidak langsung yaitu melalui *trickle down effect* ternyata menimbulkan makin parahnya kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya bertitik tolak pada serangan langsung terhadap kemiskinan, dimana salah satunya adalah pendekatan kebutuhan dasar.

Model kebutuhan dasar yang lahir dari prakarsa Gunnar Myrdal dalam karya agungnya "*Asian Drama*". Model ini merupakan penganjur program kesejahteraan dan bantuan bagi orang miskin, pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan sebagainya.

Tjokrowinoto dalam Pramono (2007 :9,10) mengajukan model kebutuhan dasar didasarkan tiga argumentasi pokok sebagai berikut :

- a. Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-aset produktif selain kekuatan fisik, keinginan bekerja, dan intelegensi dasar. Pemeliharaan aset-aset tersebut sangat tergantung pada peningkatan akses akan pelayanan publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan air bersih.
- b. Peningkatan pendapatan baru bisa meningkatkan standar hidup kalau barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia.
- c. Peningkatan standar hidup melalui peningkatan produktivitas memerlukan waktu sangat lama, dan karena sesuatu hal mereka barangkali tetap tidak dapat bekerja. Karena itu diperlukan program subsidi bagi mereka, paling tidak dalam jangka pendek.

Mahbub UI Haq (1995: 63) menuliskan paling tidak ada tiga langkah penting yang harus diperhatikan dalam siasat pembangunan yang berkiblat pada kebutuhan dasar, yaitu :

- a. *Pertama*, setelah data tentang wajah kemiskinan diperoleh maka harus segera ditentukan secara cermat keberadaan kelompok-kelompok sasaran.
- b. *Kedua*, segera melakukan penelitian kuantitatif untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin, serta besar produksi dan modal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk jangka waktu tertentu.
- c. *Ketiga*, mempersiapkan komponen-komponen pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk miskin melalui pasar yang isyarat-isyarat permintaanya mungkin menunjukkan daya beli penduduk miskin.

Oleh karena itu perlu perubahan harga dan perangsang ekonomi untuk mendorong produksi kebutuhan pokok. Selain itu, diperlukan sistem pelayanan yang mampu menjangkau dan membagi secara langsung sumberdaya pada penduduk miskin sehingga mampu

meletakkan dasar peningkatan produktivitas dalam jangka panjang.

#### 2.4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu dari masalah kesejahteraan sosial, bahkan menurut beberapa kelompok pemerhati sosial mengatakan bahwa kemiskinan merupakan akar dari permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Soekidjo Notoadmojo (1992 :10-13) mengemukakan bahwa dalam upaya menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial termasuk didalam menanggulangi masalah kemiskinan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat di kelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni faktor dari dalam (intern), dan faktor dari luar (ekstern).

##### a. Faktor Internal, yakni :

- 1) Misi dan tujuan yang di rumuskan
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
- 3) Strategi Pencapaian tujuan
- 4) Sifat dan jenis kegiatan
- 5) Jenis teknologi yang di gunakan

##### b. Faktor Eksternal, yakni :

- 1) Kebijakan-kebijakan pemerintah
- 2) Sosial-budaya masyarakat
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan pandangan yang dikemukakan oleh Pranowo, yang pada dasarnya memiliki pendapat yang sama dengan yang di sampaikan oleh Soekidjo Notoadmojo sebelumnya. Pranowo (2006 :304-305) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat atau dengan kata lain yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dua faktor utama, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal.



a. Faktor internal, yakni :

- 1) Keterbatasan anggaran penanggulangan kemiskinan
- 2) SDM yang rendah

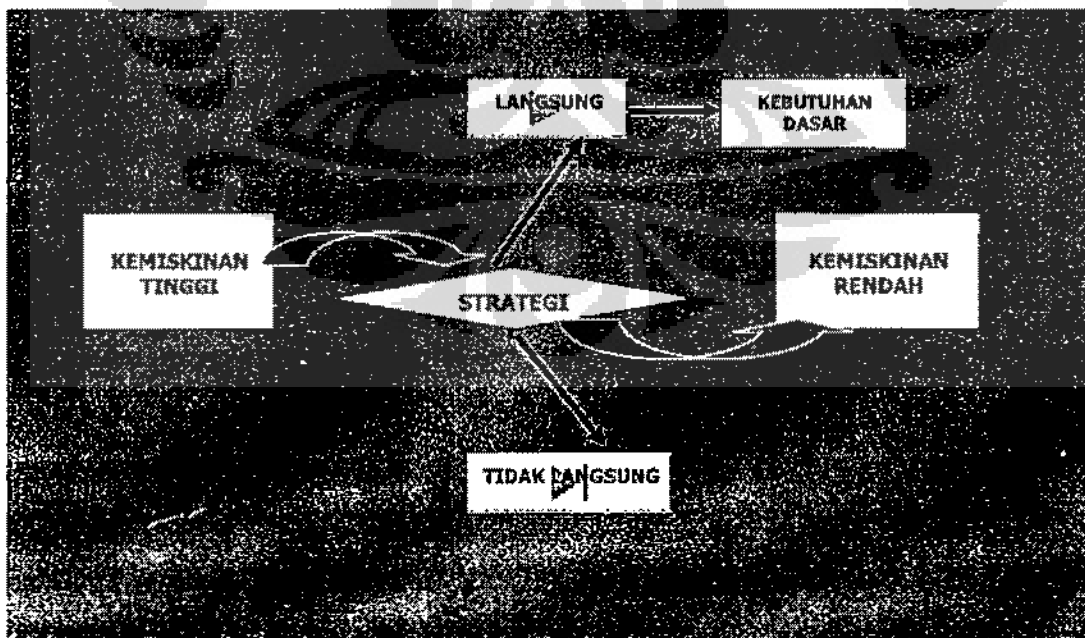
b. Faktor Eksternal, yakni :

- 1) Kebijakan Pemerintah lainnya
- 2) SDA terbatas.
- 3) Kondisi Sosial-Budaya

## 2.5. Model Penelitian

Model operasional dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar. 2.3  
Model Operasional Penelitian



## BAB 3

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 3.1. Sejarah Singkat

Terbentuknya Kota Bau-Bau secara otonom dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 merupakan peluang sekaligus tantangan didalam mengisi pembangunan daerah sebagaimana tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada mulanya, Bau-Bau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401 – 1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah Nasional karena telah tercatat dalam naskah Negara Kertagama Karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Buton sebagai negeri tujuan kelompok Mia Patamiana, mereka mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau – Bau) serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona. Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di

atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga. Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi sejarah Buton telah mencatat dua fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332 sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah ( 1542 Masehi ) bersamaan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).

Dibidang hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton 12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu diantaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara digogoli (leher dililit dengan tali sampai meninggal). Bidang perekonomian dimana Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).

Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu :

- a) "Yinda Yindamo Arata somanamo Karo"  
(Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)
- b) "Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu"  
(Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)
- c) "Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara"  
(Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)
- d) "Yinda Yindamo Sara somanamo Agama"  
(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)

Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empat Barata (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan). Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun benteng dan kubu-kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir tahun 1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan

masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu : Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kota Bau – Bau (terdapat Keraton Kesultanan Buton).

### 3.2 Letak Geografis

Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar  $5^{\circ}5'$  hingga  $5^{\circ}33'$  Lintang Selatan dan  $122^{\circ}30' - 122^{\circ}47'$  Bujur Timur. Kota Bau-Bau berada di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif.

Secara fisik, Kota Bau-Bau terletak di Pulau Buton, tepatnya di Selat Buton yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi batas-batas administrasi, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.

Luas wilayah daratannya sekitar 221,00 km<sup>2</sup> yang tersebar dalam 4 kecamatan dan 38 kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan dinamika pemerintah dan pembangunan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kokalukuna dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Murhum, wilayah Kota Bau-Bau dibagi menjadi 6 wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Wolio terdiri atas 7 kelurahan yang meliputi Kelurahan Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolokatapi dan Bukit

- Wolio Indah.
2. Kecamatan Betoambari terdiri atas 5 kelurahan yang meliputi Sulaa, Waborobo, Lipu, Katobengke dan Labalawa.
  3. Kecamatan Bungi terdiri atas 8 kelurahan yang meliputi Kelurahan Lowu-Lowu, Kolese, Kalia-lia, Ngkaring-Ngkari, Kampeonaho, Liabuku, Waliabuku dan Palabusa.
  4. Kecamatan Sorawolio terdiri atas 4 kelurahan yang meliputi Kelurahan Kaisabu Baru, Karya Baru, Bugi, dan Gonda Baru.
  5. Kecamatan Murhum terdiri atas 11 kelurahan yang meliputi Kelurahan Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Bone-Bone, Tarafu, Wameo, Kaobula, Lanto dan Nganganaumala.
  6. Kecamatan Kokalukuna terdiri atas 6 kelurahan yang meliputi Kelurahan Waruruma, Lakologou, Liwuto, Sukanaeyo, Kadolomoko dan Kadolo.

Karakteristik Wilayah Kota Bau-Bau untuk wilayah utara cenderung subur dan bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Bungi, Sorawolio, sebagian Kecamatan Wolio dan Betoambari. Wilayah selatan cenderung kurang subur diperuntukan bagi pengembangan perumahan dan fasilitas pemerintahan. Sementara wilayah pesisir untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Kedadaan iklim Kota Bau-Bau pada umumnya hampir sama dengan wilayah lain di Sulawesi yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara berkisar 200 C - 330 C. Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan Maret, dimana angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik mengandung banyak uap air. Sementara musim kemarau terjadi mulai bulan Mei sampai bulan Oktober, dimana angin timur yang bertiup dari Australia kurang mengandung uap air.

Wilayah Kota Bau-Bau memiliki dua sungai utama yang memiliki potensi sebagai sumber tenaga listrik, irigasi dan kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota

Bau-Bau. Yang pertama adalah Sungai Bau-Bau yang melintas dalam kota. Sungai ini membagi wilayah Kecamatan Wolio dan Betoambari yang bermuara di Selat Buton. Yang kedua adalah Sungai Bungi yang merupakan sumber air bersih PDAM. Selain kedua sungai tersebut di atas, juga terdapat sumber air lainnya seperti: mata air Kaongke-Ongkea, mata air Wamembe, mata air Bungi dan mata air Koba.

Tabel. 3.1 Luas Wilayah Bau-Bau Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	
		KM <sup>2</sup>	%
1.	Betoambari	27,89	12,62
2.	Murhum	6,45	2,92
3.	Wolio	17,33	7,84
4.	Kokalukuna	9,44	4,27
5.	Sorawolio	83,25	37,67
6.	Bungi	76,64	34,68
Jumlah		221	100

Sumber Data : Bappeda Kota Bau-Bau, 2008

### 3.3 Pemerintahan (Visi dan Misi)

Berdasarkan kondisi umum, yaitu dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan Kota maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan berbagai kondisi regional maupun global, maka Visi jangka panjang (20 tahunan) Kota Bau-Bau disepakati sebagai berikut :“Terwujudnya Kota Bau-Bau Sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023”

Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita seperti yang dimaksud dalam visi jangka panjang tersebut di atas, maka perlu ditetapkan sebuah visi lima tahunan

sebagai dasar membangun dan mengembangkan Kota Bau-Bau ke depan yaitu :  
 "Terwujudnya Kota Bau-Bau sebagai Kota Budaya yang produktif dan nyaman, melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara profesional dan amanah, menuju masyarakat sejahtera, bermartabat, dan religi".

**Penjabaran Visi :**

1. Kota Budaya yang Produktif dan Nyaman
  - Kota dimana Masyarakatnya tumbuh dari identitas budaya yang kokoh
  - Citra nilai-nilai budaya yang dikenal luas
  - Kota yang terus mengalami peningkatan aksesibilitas terhadap sumberdaya lokal
  - Kota yang terus meningkatkan Peluang Berusaha bagi Masyarakat & Pengusaha
  - Kota yang terus memperbaiki sistem pelayanan publik
  - Kota yang nyaman untuk tempat tinggal dan berusaha/berbisnis bagi siapa saja (*liveability*)
  
2. Optimalisasi Sumberdaya Lokal secara Profesional dan Amanah
 

Optimalisasi Sumberdaya Lokal : Pengelolaan sesuai kapasitas, Sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya budaya, sumberdaya buatan/teknologi, dan sumber-sumber penerimaan daerah

Profesional : Melalui pemanfaatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Amanah : Mengedepankan aspirasi masyarakat demi kepentingan bersama
  
3. Masyarakat Sejahtera, Bermartabat, dan Religi
  - Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
  - Berahlak dan memegang teguh nilai-nilai budaya positif
  - Masyarakat yang kehidupannya bernaftakan agama



Berdasarkan Visi di atas, maka dikembangkan 7 (tujuh) butir Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan peran dan posisi Kota Bau-Bau sebagai simpul perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada produktivitas.
2. Meningkatkan citra budaya lokal pada tingkat regional, nasional, dan internasional.
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi
4. Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah, dan menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat kota.
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem pelayanan publik.
7. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menciptakan iklim politik dan keamanan yang kondusif.

Penjelasan makna kata-kata kunci yang terkandung dalam Misi Kota Bau-Bau adalah sebagai berikut :

Misi - 1 : Memantapkan peran dan posisi Kota Bau-Bau sebagai simpul perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada produktivitas. Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Bau-Bau sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip co-opetitive (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi - 2 : Meningkatkan citra budaya lokal pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Misi ini akan dilakukan dengan pencitraan nilai-nilai budaya,

peningkatan kualitas dan kuantitas informasi, pemberdayaan lembaga-lembaga adat, dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata regional sehingga dapat mempromosikan Kota Bau-Bau sebagai kota yang memiliki modal budaya dan secara historik tumbuh dan berkembang dari Pusat Kerajaan Buton, yang terletak pada Gerbang Paling Timur Kerajaan Melayu, sehingga unggul dan terkemuka dalam pengembangan budaya lokal dan seni, dan memiliki keunikan.

Misi - 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi. Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pementapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi - 4 : Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah, dan menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat kota. Misi ini ditempuh melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Bau-Bau sebagai kota pantai (*seafrost city*) dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi ini diharapkan dapat meningkatkan citra kota dari aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang nyaman), *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), dan *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan dan daya jangkauannya).

Misi - 5 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Misi ini ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, stimulasi tumbuh-kembangnya berbagai usaha kecil dan menengah, peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditempuh secara berbarengan dengan penguatan lembaga-lembaga masyarakat, pemuda, dan pengarusutamaan gender (*gender main*

*streaming*), serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan (*participatory development*).

Misi - 6 : Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem pelayanan publik. Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi - 7 : Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menciptakan iklim politik dan keamanan yang kondusif. Misi ini ditempuh dengan mendorong terwujudnya jaminan kepastian hukum dan hak berpolitik warga, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan hukum adat, menjamin tumbuhnya demokrasi, rasa keamanan dan keadilan bagi masyarakat, dan melindungi hak-hak politik demokrasi dan hak asasi manusia baik melalui produk peraturan-peraturan maupun melalui perwujudan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan visi dan misi serta program pembangunan maka dibutuhkan strategi pencapaian yang tepat dan handal. Strategi Pembangunan Kota Bau-Bau Tahun 2008-2013 akan ditempuh melalui penguatan TIGA PILAR pembangunan, yakni Pemerintah (P), Masyarakat (M), dan Anugerah (A) (disini kata Anugerah digunakan sebagai representasi secara luas kata: Sumberdaya Lokal), dan dalam hal ini Budaya dan Agama merupakan perekat/pengikat (node) TIGA PILAR tersebut.

### **Strategi TIGA PILAR dalam ranah POMaMaSIKA**

- a. Strategi Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Pemerintahan (Pilar P=Pemerintah)

Pilar P (Pemerintah) memuat strategi peningkatan profesionalisme pengelolaan pemerintahan (*good governance*) yang berujung pada peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada

pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah mengutamakan prinsip Optimalisasi dalam berbagai aspek, terutama dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya lokal (anugerah Ilahi) berupa anugerah wilayah, kekayaan alam, keindahan alam, budaya, dll untuk kepentingan bersama.

b. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan (Pilar M = Masyarakat)

Pilar M (Masyarakat) memuat strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan kemampuan diri (*self capacity*) dan kemampuan mengorganisasi diri (*self organization*), dan peningkatan peran aktif dan pelibatan seluruh potensi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kota Bau-Bau. Ini juga termasuk strategi peningkatan kesempatan (dalam konteks keadilan atau equity) bagi masyarakat dalam upaya pemanfaatan segala sumberdaya lokal yang merupakan anugerah Ilahi yang ada secara Mandiri dan berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. Strategi Peningkatan Daya Manfaat (*Utility*) dan Nilai (*Value*) Sumberdaya Lokal (Pilar A = Anugerah)

Pilar A (Anugerah Ilahi) memuat strategi peningkatan manfaat dan nilai sumberdaya lokal (*local resources*) yang secara ekonomi dan sosial budaya merupakan penyangga utama pembangunan Kota Bau-Bau. Strategi ini diorientasikan pada pemanfaatan secara efektif-berkeadilan sumberdaya lokal bagi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip Kebersamaan dan Amanah, dan tetap memperhatikan kelestariannya (*sustainable use*). Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal perlu selalu dilakukan secara Terencana melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi dan pelibatan kalangan profesional.

### 3.4 Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan

Berdasarkan data kependudukan, sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah penduduk Kota Bau-Bau adalah sebanyak 127.743 jiwa, penduduk laki-laki sejumlah 63.079 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 64.664 jiwa.

Kecamatan Murhum yang merupakan pemekaran dari kecamatan Betoambari merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya dibanding 5 (lima) kecamatan lainnya dalam wilayah Kota Bau-Bau dengan tingkat kepadatan 6.523 jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan oleh karena sejak belum dimekarkan wilayah ini menjadi tempat pemukiman sebagian besar penduduk Kota Bau-Bau. Saat ini kecamatan Murhum mencakupi 11 (sebelas) kelurahan terbanyak cakupan kelurahan dibanding kecamatan lainnya. Sampai akhir tahun 2007 jumlah penduduk Kota Bau-Bau mencapai 124.609 jiwa dengan keragaman etnis yakni; Buton, Muna, Jawa, Bugis/Makassar, Bali dan Toraja. Dipandang dari aspek kesejarahan mulai dari sistem Kerajaan sampai Kesultanan Buton bahkan sampai terbentuk dan berkembang pesatnya pembangunan Kota Bau-Bau, struktur sosial yang beragam disertai keragaman etnis menjadi suatu kekuatan dan perekat serta sumber inspirasi dalam membangun Kota Bau-Bau kedepan.

Tabel. 3.2 Penduduk Kota Bau-Bau menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2003-2007

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
2003	58.002	58.899	116.901	98,48
2004	58.469	62.033	120.502	94,25
2005	58.781	62.399	121.180	94,20
2006	57.027	65.312	122.339	87,31
2007	61.395	63.214	124.609	97,12

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angka 2008, diolah.

Sebaliknya wilayah Kecamatan Sorawolio merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya disebabkan wilayah ini merupakan wilayah hunian penduduk yang berbasis pertanian dan perkebunan. Di wilayah ini terdapat hutan lindung dimana terdapat sumber mata air bagi masyarakat Kota Bau-Bau. Selain itu, di wilayah ini terdapat tempat batalyon TNI Kompi 725 sebagai pengamanan perbatasan dan penjagaan kawasan hutan.

Kemudian wilayah kecamatan Bungi merupakan wilayah pertanian yang menjadi *buffer stock* ( penyangga stock ) bahan pangan bagi penduduk Kota Bau-Bau. Areal pertanian/persawahan dan peternakan di wilayah ini digerakkan oleh etnis Jawa, Bali, Bugis, Toraja dan relatif sedikit penduduk asli etnis Buton. Persebaran populasi penduduk dalam wilayah Kota Bau-Bau menurut kecamatan, yakni:

Tabel. 3.3 Penduduk Kota Bau-Bau menurut Kecamatan Tahun 2003-2007

Tahun	Betoambari	Murnum	Wolio	Kakelukan	Sorawolio	Bungi	Jumlah
2003	53.482	-	45.475	-	6.161	11.783	116.901
2004	54.886	-	46.794	-	6.404	12.418	120.502
2005	55.195	-	47.057	-	6.440	12.488	121.180
2006	13.648	42.075	32.406	15.101	6.502	12.607	122.339
2007	13.901	42.830	33.028	15.378	6.624	12.848	124.609

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angka 2008, diolah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam rangka melihat daya serap tenaga kerja sektor-sektor dalam pembentukan PDRB.

Dari jumlah penduduk sebesar 124.609 jiwa, penduduk usia kerja (15 tahun keatas) sebanyak 87.228 jiwa, meliputi angkatan kerja sebanyak 51.701 jiwa dan bukan angkatan kerja 35.525 jiwa. Dari 51.701 jiwa angkatan kerja tersebut yang betul-betul bekerja adalah sebanyak 45.694 jiwa dan yang sementara mencari

pekerjaan sebanyak 6.007 jiwa. Adapun persentase pekerja terhadap angkatan kerja sebesar 88,38 %, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 59,27%.

Berdasarkan data BPS Kota Bau-Bau tahun 2008, banyaknya angkatan kerja pada tahun 2007 di Kota Bau-Bau adalah sebanyak 51.701 orang. Angka ini lebih tinggi 11,67% dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 46.307 orang. Untuk lebih jelasnya gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau.

Tabel. 3.4 Perkembangan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bau-Bau Berumur 15 Tahun Keatas, 2003 - 2007 :

No.	Kategori	Jumlah		Perubahan
		2003	2007	
1.	Angkatan Kerja	46.307	51.701	11,65%
	- Bekerja	42.267	45.694	8,11%
	- Mencari Kerja	4.040	6.007	48,69%
2.	Bukan Angkatan Kerja	30.715	35.527	15,67%
	- Sekolah	12.565	15.366	22,29%
	- Lainnya	18.150	20.161	11,08%
3.	Rasio Pekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)	91,28	88,38	-
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	62,05	59,27	-

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angka 2008, diolah.

Jika dilihat perbandingan usia kerja antara laki-laki dan perempuan, maka banyaknya usia kerja laki-laki sebanyak 43.281 jiwa, dan usia kerja perempuan sebanyak 43.947 jiwa.

Tabel. 3.5 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kota Bau-Bau Tahun 2007

Jenis Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	31.691	20.010	51.701
- Bekerja	28.841	16.853	45.694
- Mencari Kerja	2.850	3.157	6.007
Bukan Angkatan Kerja	11.590	23.937	35.527
- Sekolah	8.147	7.219	15.366
- Mengurus Rumah Tangga	1.751	15.633	17.384
- Lainnya	1.692	1.085	2.777
<i>Total</i>	<i>43.281</i>	<i>43.947</i>	<i>87.228</i>

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angka 2008, diolah.

Ditinjau dari lapangan kerja utama penduduk Kota Bau-Bau, dari sembilan sektor lapangan usaha, ternyata sektor perdagangan dan jasa mempunyai andil terbesar dalam menampung tenaga kerja di kota Bau-Bau. Dari jumlah 45.694 orang dengan status bekerja, sebanyak 11.125 orang atau sekitar 24,35 persen bekerja disektor perdagangan, selanjutnya sektor jasa sebanyak 10.619 orang atau sekitar 23,24 persen. Hal ini disebabkan karena di Kota Bau-Bau sudah terdapat beberapa



infrastruktur pendukung sektor perdagangan dan jasa seperti keberadaan pelabuhan laut yang berskala nasional dan bandar udara sehingga memungkinkan lancarnya distribusi barang dan jasa dari luar, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya beberapa sektor lainnya.

Tabel. 3.6 Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Kota Bau-Bau, Tahun 2007

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian	6.208	3.743	9.951
Pertambangan & Penggalian	250	115	365
Industri Pengolahan	1.082	1.912	2.994
Listrik, Gas & Air	42	-	42
Bangunan	3.619	-	3.619
Perdagangan	5.632	5.493	11.125
Angkutan & Komunikasi	5.157	573	5.730
Keuangan	332	917	1.249
Jasa	6.519	4.100	10.619
<i>Total</i>	<i>28.841</i>	<i>16.853</i>	<i>45.694</i>

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angka 2008, diolah.

### 3.5 Ekonomi

Kondisi ekonomi Kota Bau-Bau dapat dideskripsikan antara lain dengan mengamati perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur Perekonomian, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan perananan sektoral dalam pembentukan PDRB.

#### a. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB dihitung Atas Dasar Harga (ADH) berlaku atau nominal dan PDRB ADH konstan atau riil. PDRB ADH berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi, sementara PDRB ADH konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nilai PDRB ADH berlaku Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,07% per tahun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 603.976,09 juta, Rp. 712.724,27 juta pada tahun 2004, Rp. 892.523,46 juta pada tahun 2005, Rp. 1.058.543,49 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 1.338.292,31 juta. Pada sisi lain, nilai PDRB ADH konstan tahun 2000 Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 juga cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,50% per tahun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH sebesar Rp. 437.688,43 juta, Rp. 469.388,76 juta pada tahun 2004, Rp. 506.601,04 juta pada tahun 2005, Rp. 543.827,41 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 584.436,80 juta.

#### b. Struktur Ekonomi

Untuk mendapatkan gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah, antara lain dapat dilihat dari peran sektor-sektor yang membentuk PDRB. Ciri perekonomian kota selalu tercermin seberapa besar peran sektor sekunder dan tersier

didalam memberikan kontribusinya. Kota Bau-Bau nampak bahwa peran sektor dimaksud memberikan peran yang lebih besar.

PDRB Kota Bau-Bau tahun 2003-2007 pada umumnya didukung oleh peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2003, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 24,12%, tahun 2004 sebesar 25,09%, tahun 2005 sebesar 23,62%, tahun 2006 sebesar 23,46% dan tahun 2007 memberi kontribusi sebesar 21,88%. Pada sisi lain, sektor jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang sama cukup signifikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran selama kurun waktu 2003-2007. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 masih didominasi oleh sektor-sektor yang masuk dalam kelompok sektor tersier.

Tabel. 3.7 Distribusi PDRB Kota Bau-Bau ADH  
Berlaku Tahun 2003-2007 (Persen)

Kategori Usaha	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
<b>SEKTOR PRIMER</b>	17,83	18,47	18,86	18,39	18,75
- Pertanian	17,32	17,97	18,34	17,89	18,23
Pertambangan dan Penggalian	0,50	0,50	0,52	0,50	0,52
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	19,69	19,37	18,52	18,21	17,29
- Industri Pengolahan	3,05	3,06	2,67	2,52	2,18
- Listrik, Gas dan Air Bersih	0,76	0,97	0,98	0,96	0,95
- Konstruksi	15,88	15,34	14,88	14,73	14,15
<b>SEKTOR TERSIER</b>	62,48	62,16	62,62	63,41	63,97
Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,12	25,09	23,62	23,46	21,88
Pengangkutan dan Komunikasi	9,53	9,08	10,62	10,70	12,47
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,37	4,89	5,37	6,22	6,87
- Jasa-jasa	24,46	23,10	23,01	23,02	22,75
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Bau-Bau (2008), PDRB Kota Bau-Bau Tahun 2007, diolah.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu 2004-2007, perekonomian Kota Bau-Bau menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi (year on year) rata-rata sebesar 7,50%. Angka ini adalah lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,00% selama kurun waktu yang sama.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kota Bau-Bau tersebut adalah juga tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor pembentuknya yang mengalami pertumbuhan positif. Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan tercatat mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar 23,39%. Tingginya laju pertumbuhan sektor adalah tidak terlepas dari makin berkembang sub-sektor keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah beroperasinya Bank Muallamat, Bank Perkreditan Rakyat Keraton dan Bank Panin. Sektor listrik, gas dan air bersih tercatat sebagai sektor kedua yang mengalami peningkatan tertinggi selama kurun waktu 2004-2007 dengan laju pertumbuhan sebesar 15,39%.

Tabel. 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau Menurut Sektor Tahun 2004-2007

Kategori Usaha	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	Rata-Rata
<b>SEKTOR PRIMER</b>	11,44	5,29	3,23	2,44	5,60
- Pertanian	11,74	5,39	2,97	2,20	5,57
- Pertambangan dan Penggalian	6,53	3,59	7,86	6,53	6,13
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	9,48	6,18	9,12	8,93	8,43
- Industri Pengolahan	10,47	3,09	6,26	7,04	6,72
- Listrik, Gas dan Air Bersih	13,99	23,78	9,34	14,46	15,39
- Konstruksi	9,11	6,29	9,74	9,11	8,56
<b>SEKTOR TERSIER</b>	5,80	8,99	7,39	7,73	7,48
- Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,69	8,54	3,57	4,38	4,80
- Pengangkutan dan Komunikasi	7,97	10,25	8,32	8,12	8,66

- Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	25,46	20,12	22,79	25,21	23,39
- Jasa-jasa	4,14	6,49	6,57	5,49	5,67
PDRB	7,24	7,93	7,35	7,47	7,50

Sumber: BPS Kota Bau-Bau (2008), PDRB Kota Bau-Bau Tahun 2007, diolah.

#### d. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB (pendapatan) per kapita. Indikator ini sekaligus menunjukkan tingkat kemampuan rata-rata penduduk dalam membeli barang dan jasa.

Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga (ADH) berlaku penduduk Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,15% atau Rp. 7.567.786,63 per tahun. Apabila pada tahun 2003, pendapatan per kapita ADH berlaku hanya sebesar Rp. 5.166.560,51 atau Rp. 430.546,71 per bulan, maka pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 5.914.626,06 atau Rp. 492.885,51 per bulan. Pada tahun 2005, angka tersebut terus meningkat menjadi Rp. 7.365.270,34 atau Rp. 721.045,27 per bulan, Rp. 8.652.543,26 pada tahun 2006 atau Rp. 721.045,27 per bulan dan pada tahun 2007 menjadi Rp. 10.739.932,99 atau Rp. 894.994,44 per bulan.

Secara riil atau ADH konstan 2000, pendapatan per kapita Kota Bau-Bau tumbuh sebesar 5,80% per tahun atau Rp. 4.191.070,80 per tahun atau hanya Rp. 349.255,90 per bulan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita riil masyarakat Kota Bau-Bau hanya sekitar 55,38% dari pendapatan per kapita nominalnya.

#### e. Keuangan Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menunjukkan adanya Dana Perimbangan yang merupakan bagian penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Bagi

Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga tidak dikenal lagi Subsidi Perimbangan Keuangan untuk Pembayaran Gaji Pegawai, Sumbangan, Ganjaran, dan bantuan pembangunan yang selama ini pengelolaannya dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) baik dalam bentuk Bantuan Umum (Block Grant) maupun bantuan khusus (Specific Grant), termasuk Dana Rutin Daerah (DRD) dan Dana Pembangunan Daerah (DPD) yang dikenal dalam tahun anggaran sebelumnya.

Arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) kebijakan yaitu kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Disamping itu, perlu dihindari upaya peningkatan penerimaan dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan goncangan atau distorsi ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang.

Penggunaan belanja atau pengeluaran daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa (sektor pariwisata) dan sektor pertanian. Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan, penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bau-Bau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Bau-Bau. Pendapatan dan belanja Kota Bau-Bau pada tahun 2006 mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Apabila pada tahun 2004 pendapatan Kota Bau-Bau hanya sebesar Rp. 145,652 milyar (20,44% dari PDRB nominal) dan Rp. 156,621 milyar (17,57% dari PDRB nominal) pada tahun 2005, pada tahun 2006 naik menjadi Rp. 259,866 milyar (25,36% dari PDRB nominal) atau naik sebesar 65,74%, tahun 2007 naik menjadi Rp 302.84 milyar atau naik sebesar 16,53 % dibandingkan dengan satu periode sebelumnya.

Fenomena yang hampir sama juga terjadi pada komponen belanja atau pengeluaran, yaitu dari Rp.160,694 milyar pada tahun 2004 (22,55% dari PDRB nominal) meningkat menjadi Rp.178,671 milyar (20,02% dari PDRB nominal) pada tahun 2005 pada tahun 2006 menjadi Rp.279,511 milyar (27,28% dari PDRB nominal) dan tahun 2007 naik menjadi Rp313,42 milyar atau naik sebesar 12,31 % dibandingkan dengan satu periode sebelumnya. Pada empat tahun terakhir (2003-2007), anggaran belanja selalu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau selama kurun waktu tersebut, APBD Kota Bau-Bau selalu defisit.

## BAB 4

### HASIL DAN ANALISA

#### 4.1. Hasil

##### 4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Kota Bau-Bau

###### a. Data Masyarakat Miskin

Menurut data BPS Kota Bau-Bau, jumlah masyarakat miskin di Kota Bau-Bau dalam kurun waktu 2003-2008 mengalami pasang-surut atau fluktuatif. Pada Tahun 2003 angka kemiskinan sebesar 19,08 persen (22.300 jiwa), sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 18,34 persen (22.100 jiwa), penurunan angka kemiskinan juga terjadi pada tahun 2005 menjadi 17,58 persen (21.300 jiwa). Namun, pada tahun 2006 angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali menjadi 18,14 persen (22.600 jiwa), meskipun kemudian dapat ditekan kembali pada tahun 2007 dan tahun 2008, yakni 18,14 persen (22.600 jiwa) di tahun 2007 dan 17,68 persen (22.200 jiwa di tahun 2008). Namun, survei pada tahun 2008 belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008.

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk miskin yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.



Tabel. 4.1 Data masyarakat Miskin Kota Bau-Bau  
Tahun 2003 – 2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Penduduk	116.901	120.502	121.180	122.339	124.609	127.743
Jumlah Penduduk Miskin	22.300	22.100	21.300	23.100	22.600	22.500
% Penduduk Miskin	19,08	18,34	17,58	18,88	18,14	17,61

Sumber : BPS Kota Bau-Bau

Sementara, dengan indikator-indikator yang lebih dikembangkan, survei BKKBN untuk masyarakat miskin di Kota Bau-Bau memperlihatkan angka-angka yang cukup tinggi. BKKBN mengistilahkan masyarakat miskin dengan sebutan keluarga pra sejahtera. Pada tahun 2002 masyarakat pra sejahtera di Kota Bau-Bau sebesar 21,27 persen, di tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 33,79 persen, dan di tahun 2007 masyarakat pra sejahtera naik menjadi 41,73 persen.

#### b. Profil Kemiskinannya

Menurut Sudjito (Kepala BAPPEDA) kondisi kemiskinan makro di Kota Bau-Bau dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu ; (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kondisi sosial; dan (iii) peningkatan kegiatan fisik lingkungan. Kondisi sosial ekonomi tampak dari pola hidup dan pekerjaan masyarakat yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, yang terbagi atas dua wilayah pesisir pantai (urban) dengan laju perkembangan ekonomi relatif tinggi, sedangkan wilayah pedalaman (*rural*) cenderung berpenghasilan rendah dan miskin.

Sudjiton melanjutkan bahwa profil kemiskinan Kota Bau-Bau umumnya dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi, yakni : (i) dimensi ekonomi: memberi gambaran pada aspek pekerjaan, penghasilan, simpanan, pengeluaran; (ii) dimensi sosial: menggambarkan aspek-aspek kesehatan, sikap hidup, pendidikan, kepedulian, perlindungan, tanggungan; (iii) dimensi fisik: menggambarkan aspek tempat tinggal (rumah) dan lingkungan fisik lainnya; (iv) dimensi asset: menggambarkan kepelikan, permodalan,; (v) dimensi politik: yang menggambarkan akses mendapatkan informasi, pengambilan keputusan. Adapun gambaran tentang kondisi keluarga miskin di Kota Bau-Bau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.2 Kondisi Keluarga Miskin di Kota Bau-Bau

No	Dimensi	Aspek	Kondisi
1.	Ekonomi	Penghasilan	Kurang dari Rp. 500.000,-
		Pekerjaan	Pengangguran
			Buruh tani, buru bangunan
			Tukang Becak
			Tukang Kayu
			Penjual ikan keliling
			Tukang cuci
			Tukang sampah
			PRT
			Pegawai / Guru
			Tukang batu
			Tukang gali sumur
			Nelayan
			Pembuat gerabah
			Tukang tenun
			Penjual sayuran
			Penjual bakso
			Tukang bengkel
			Buruh pelabuhan
			Petani rumput laut
Pekerja meubel			
Ternak			
Simpanan	Tidak punya simpanan		
Kompetensi	Kurang memiliki ketrampilan kerja		

No.	Dimensi	Aspek	Kondisi
2.	Sosial	Kesehatan	Sakit menahun
			Kurang gizi
			Tempat tinggal tidak higienis
			Pola makan tidak menentu
			Tidak memiliki MCK
			Tidak memanfaatkan layanan kesehatan
		Sikap hidup	Mudah putus asa
			Malas
			Boros
			Rendah diri
			Berpikir praktis
Pendidikan	Tidak menabung		
	Hanya tamat SD dan SMU		
	Kepedulian	Apatis, cuek	
	Tanggungjawab	4 s/d 6 orang	
3.	Fisik	Rumah	Atap bocor
			Lantai tanah sebagian semen
			Dinding papan/jelaja
		Pakaian	Tidak memiliki jamban
			Beli baru sekali setahun
			Beli bekas
4.	Asset	Kepemilikan	Tidak punya ganti untuk berbeda kepentingan
			Tidak punya tanah kebun/sawah
			Tidak memiliki rumah pribadi
5.	Politik	Informasi	Tidak memiliki barang-barang berharga
			Tidak memiliki media TV, Radio, dll
		Keputusan	Jarang diundang pada pertemuan
			Tidak melibatkan diri

Sumber : Bappeda Kota Bau-Bau

### c. Penyebab Kemiskinan

Filtar (Anggota Tim PKD) mengemukakan bahwa secara umum Pemerintah Kota Bau-Bau mengklasifikasi penyebab kemiskinan dalam dua bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Lebih jelasnya dalam pelaksanaan forum diskusi terarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Kota Bau-Bau dan kelompok masyarakat pemerhati lainnya, merumuskan akar penyebab kemiskinan di Kota Bau-Bau sebagaimana pada tabel berikut.

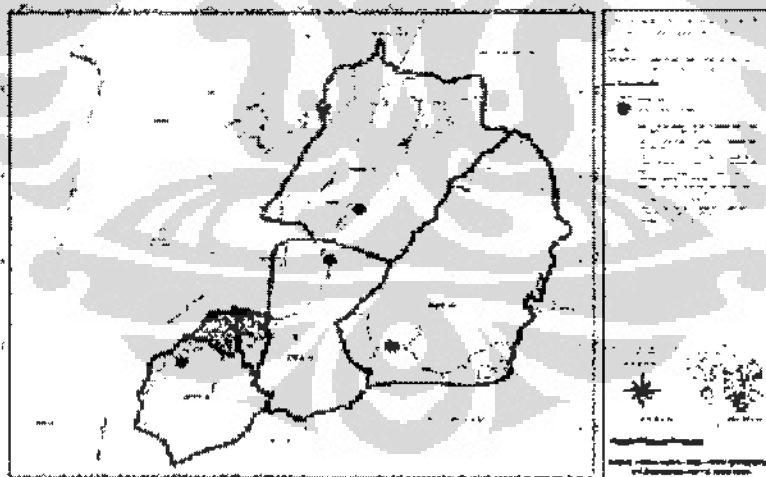
Tabel. 4.3 Penyebab Kemiskinan di Kota Bau-Bau

Dampak	Penyebab 4	Penyebab 3	Penyebab 2	Penyebab 1
Kemiskinan	Politik yang tidak membuka akses terhadap kaum miskin Kaum miskin kurang partisipasi	Kebijakan yang tidak berpihak	Institusi pengambilan keputusan yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan	Personal atau individu yang tidak baik dan murni karena masalah individu masyarakatnya
	Ekonomi yang tidak memihak, tidak ada kesempatan, tidak ada akses ke sumberdaya, dsb			
	Sosial yang segregatif, marginalisasi, intenasiasi budaya miskin			
	Fisik, lingkungan kumuh, dan ilegal, dsb			

#### 4.1.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau

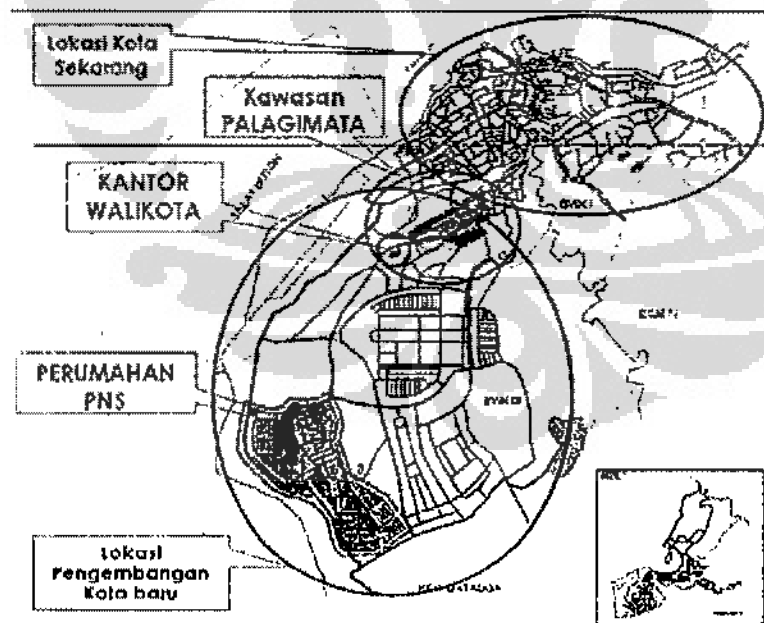
Masalah kemiskinan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Bau-Bau pada khususnya tercirikan pada kondisi fisik masyarakat miskin yang nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan), tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi), dan tidak adanya jaminan masa depan, karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.

Pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya menanggulangi kemiskinan di periode 2003-2008 telah melakukan berbagai macam pembangunan yang dapat memberikan nilai positif dalam dinamika sosial ekonomi kemasyarakatan di daerah. Penataan ruang kota dan pembenahan infrastruktur dasar merupakan beberapa langkah penting yang telah dilakukan dalam periode 2003-2008. Khusus untuk penataan ruang kota, maka wilayah Bau-Bau dikelompokkan dalam beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK), yakni sebagai berikut :



Gambar. 4.1 Peta Pembagian Wilayah Kota Bau-Bau  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau

- a. BWK I dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa grosir skala regional dan kota. Dikembangkan dengan pusat di Wale.
- b. BWK II dengan fungsi pendukung perdagangan dengan batas Sungai Bau-Bau kearah barat sampai Kelurahan Bone-bone dengan pusat di Wameo.
- c. BWK III dengan fungsi pusat pendidikan tinggi dan pemerintahan kota. Dikembangkan dengan pusat di Katobengke mencakup wilayah Lipu, Sulaa, Badia, dan Waborobo.
- d. BWK IV dengan fungsi pusat permukiman kota dengan pusat pelayanan di Waruruma dengan cakupan pelayanan sampai Lakologou diarah utara dan Kadolokatapi diarah selatan.
- e. BWK V dengan fungsi pertanian tanaman pangan dan pengembangan pusat permukiman kota. Berpusat di Liabuku mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bungi.
- f. BWK VI dengan fungsi utama pertanian hortikultura, perkebunan dan kehutanan dengan pusat di Kaisabu meliputi seluruh Kecamatan Sorawolio



Gambar. 4.2 Pengembangan Lahan Tidak Produktif menjadi Kawasan Perkantoran  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau



Gambar. 4.3 Kantor Walikota Bau-Bau yang Baru  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau

Sedangkan untuk pembenahan infrastruktur dasar, dapat dilihat dengan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung di daerah. Infrastruktur dasar yang di bangun dan dikembangkan dalam periode tahun 2003- 2008 antara lain : infrastruktur jalan dan angkutan darat; bandara dan angkutan udara; pelabuhan dan angkutan laut; pasar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pelabuhan, bandara, ruang publik, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

#### a) Jalan dan Angkutan Darat

Perbaikan infrastruktur jalan dilakukan untuk mendukung aktifitas sosial, ekonomi dan kemasyarakatan Kota Bau-Bau yang terus berkembang secara dinamis dan jalan sebagai urat nadi perekonomian sangat menentukan. Pembangunan serta peningkatan infrastruktur transportasi dan perhubungan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, yang diarahkan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pengguna jalan, juga untuk membuka daerah-daerah terisolasi dan kantong – kantong produksi, baik pertanian

maupun perikanan serta perkebunan dan hasil hutan lainnya juga untuk membangun koneksitas antar wilayah perkotaan maupun antar kota ditingkat regional.

Pada saat yang bersamaan pembukaan jalan baru juga ditujukan untuk membuka kawasan-kawasan baru sebagai akses ekonomi dan sosial terus dilakukan sebagai konsekuensi logis dari peningkatan fungsi dan perkembangan Kota Bau-Bau, sebagai pusat akumulasi kegiatan bagi daerah - daerah sekitarnya. Pemerintah membuka jaringan jalan pada kawasan-kawasan baru baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai kawasan pelayanan pemerintahan. Sementara itu upaya meningkatkan kualitas jalan terutama jalan arteri primer maupun sekunder sampai dengan jalan lingkungan, peningkatan dan pemeliharaan jalan akan terus dilakukan. Penanganan jalan dapat berupa perkerasan, pengaspalan *lasbutag* (olahan aspal Buton) sampai dengan jalan *hotmix* terus dilakukan. Sampai tahun 2007 panjang jalan di Kota Bau-Bau secara keseluruhan adalah 228,869 Km, yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 158,254 Km (69%) yaitu, permukaan *hotmix* 18.4947 Km, Lasbutag 6,603 KM; Jalan kerikil 65,665 Km (29%) dan sisanya sepanjang 4,95 Km (2%) merupakan jalan lainnya. Dilihat dari kondisi jalan di Kota Bau-Bau, dalam kondisi baik sepanjang 182,669 Km, kondisi sedang sepanjang 24,000 Km, sepanjang 17,000 Km dalam kondisi rusak, serta 5,200 Km dalam kondisi rusak berat.

Tabel. 4.4 Panjang Jalan menurut Pemerintah yang berwenang, jenis permukaan, kondisi dan kelas jalan 2007 (Km)

Perincian	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
<u>Jenis Permukaan :</u>				
- Aspal	62,076	-	96,178	158,254
- Kerikil	-	-	65,665	65,665
- Tanah	-	-	-	-
- Tidak diperinci	-	-	4,950	4,950
Jumlah	62,076	-	166,793	228,869
<u>Kondisi Jalan :</u>				



- Baik	41,076	-	141,593	182,669
- Sedang	10,500	-	13,5	24,000
- Rusak	6,500	-	10,5	17,000
- Rusak Berat	4,000	-	1,2	5,200
Jumlah	62,076	-	166,793	228,869
<u>Kelas Jalan :</u>				
- Kelas I	-	-	-	-
- Kelas II	-	-	-	-
- Kelas III	-	-	-	-
- Kelas III A	-	-	-	-
- Kelas III B	-	-	-	-
- Kelas III C	-	-	-	-
- Tidak diperinci	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Sumber Data : BPS Kota Bau-Bau (2008), Kota Bau-Bau dalam Angka 2008, diolah.



Gambar. 4.4 Salah Satu Ruas Jalan , Merupakan Urat Nadi Kegiatan Masyarakat  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sebagai pusat akumulasi kegiatan perekonomian bagi daerah sekitarnya, mobilitas penduduk Kota Bau-Bau sangat tinggi. Pada siang hari jumlah penduduk khususnya disekitar pusat- pusat perekonomian masyarakat seperti pasar, pusat

perbelanjaan bahkan melonjak 100 persen. Jumlah ini baru akan berkurang secara otomatis setelah berakhirnya kegiatan di pusat-pusat perekonomian. Pembangunan infrastruktur angkutan darat di Kota Bau-Bau diarahkan kepada terciptanya rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya baik siang maupun di malam hari.

Sarana angkutan darat seperti kendaraan bermotor, selain berfungsi sebagai angkutan penumpang juga digunakan sebagai angkutan barang, baik barang produksi pabrik maupun barang hasil produksi pertanian dan hasil-hasil lainnya. Jenis sarana angkutan darat berupa kendaraan bermotor yang ada meliputi mobil penumpang sebanyak 127 buah, mobil barang sebanyak 773 buah, mobil bus sebanyak 306 buah, dan sepeda motor sebanyak 8.293 buah. Selama periode tahun 2003-2007 Pemerintah Kota Bau-Bau telah membangun dan meningkatkan sarana pendukung angkutan darat yakni; 5 *traffic light*, 1.235 rambu-rambu lalu lintas, 15 halte, pagar pengaman jalan sepanjang 1.250 m<sup>2</sup>, jembatan Sukanaeo, serta 200 papan nama jalan. Keadaan sarana pendukung angkutan darat di Kota Bau-Bau tahun 2003-2007, yaitu ;

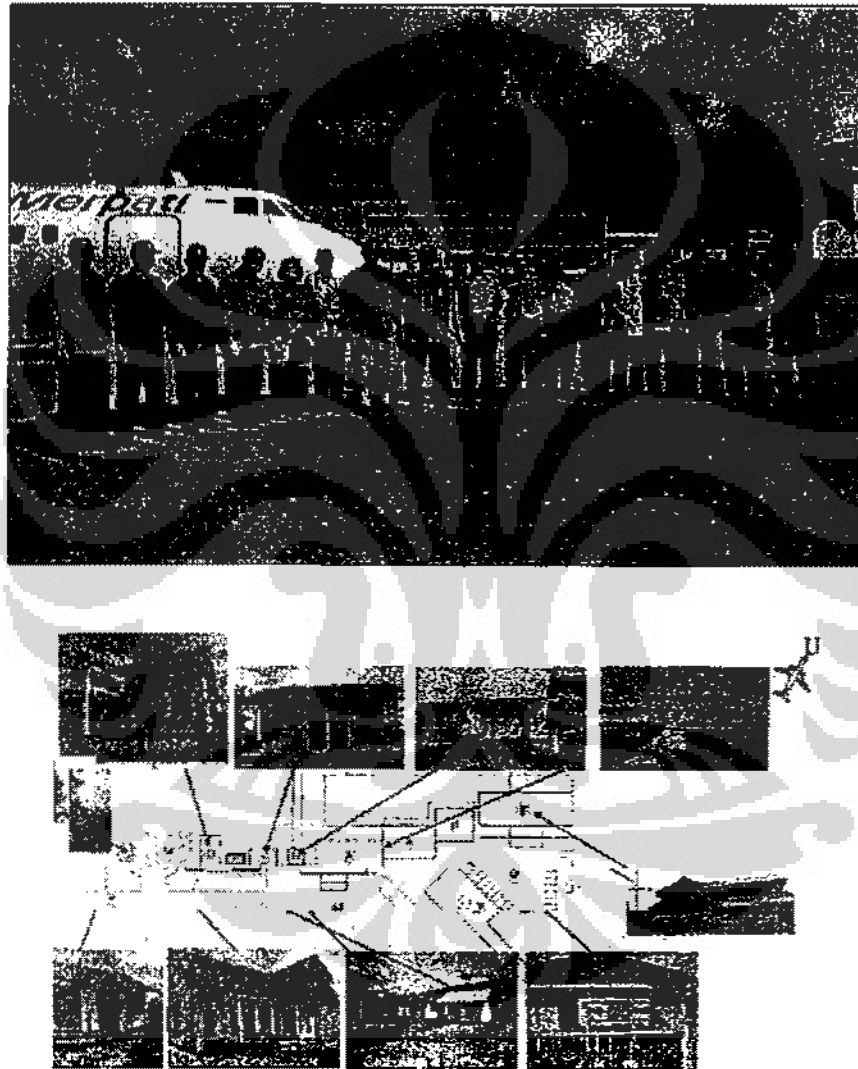
Tabel. 4.5 Sarana pendukung Angkutan Darat di - Kota Bau-Bau Tahun 2003 -2007

Nb	Jenis Sarana	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Terminal	1	1	2	3	3
2.	Halte	5	7	9	12	15
3.	Pagar Pengaman (m)	350	600	800	1.000	1.250
4.	<i>Trafic Light</i>	1	1	2	4	5
5.	Rambu-rambu jalan	600	800	1.000	1.100	1.250
6.	Papan Nama	60	75	85	90	200

Sumber data : Dishub Kota Bau-Bau (2008), diolah

b) Bandara dan Angkutan Udara

Bandar Udara Betoambari akan menjadi alternatif angkutan yang lebih cepat sebagai komplemen dari jenis-jenis model yang telah berkembang. Oleh karena itu perencanaannya tidak dapat dilepaskan dari sistem transportasi secara keseluruhan.



Gambar. 4.5 Bandara Betoambari Kota Bau-Bau dan Fasilitasnya  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau

Detail pengembangan Bandara Betoambari Kota Bau-Bau :

1. *Runway*, masih menggunakan runway eksisting ((1.050 x 23 m) dan pengembangan dilakukan ke arah runway 04 atau arah timur. Dimensi landasan pacu diperpanjang menjadi 1.400 x 30 m untuk tahap I dan tahap II. Sedangkan tahap III akan diperpanjang menjadi 1.650 x 30 m dengan lebar strip 1.520 x 150 m (tahap I & tahap II).
2. Adapun untuk apron tetap menggunakan *apron eksisting* dengan luas 120 x 60 m, dimana luas tersebut dapat menampung pergerakan pesawat pada tahap I & tahap II (2 pesawat ATR-42). Untuk tahap III diperluas menjadi 120 x 70 m guna menampung jenis pesawat ATR-72.
3. Terdapat satu *exit taxiway* dari *taxiway eksisting* dengan menambahkan dimensi menjadi 75 x 15 m.
4. Sirkulasi teknis dan penunjang dipisah dengan sirkulasi publik.
5. Menambahkan koridor beratap pada bangunan terminal.
6. Zona publik direlokasi ke arah timur dengan dengan pertimbangan kontur relatif datar (memudahkan arah pengembangan perencanaan *blok plan* sesuai fungsi masing-masing).
7. Jalan masuk menggunakan jalan eksisting.

Semakin tingginya mobilitas masyarakat Kota Bau-Bau ternyata tidak cukup didukung hanya oleh sarana angkutan darat dan laut melainkan juga oleh sarana angkutan udara. Hal ini mencerminkan pola pikir yang mengedepankan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan bagi *enterpreniur* di Kota Bau-Bau, disamping tentunya kemampuan Pemerintah Kota Bau-Bau melihat kebutuhan masa depan masyarakatnya berupa prasarana udara yakni pelabuhan udara. Pembangunan sarana dan prasarana angkutan udara diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana angkutan udara yakni pelabuhan udara. Satu-satunya sarana pelabuhan udara yang ada di Kota Bau-Bau yang dapat disinggahi pesawat udara sebagai angkutan penumpang dan barang adalah pelabuhan udara Betoambari yang dapat menghubungkan Bau-Bau dan Makassar sebagai pelabuhan transit.

Selama tahun 2007, kunjungan kapal udara yang datang melalui pelabuhan udara Betoambari sebanyak 47 kali dengan rata-rata jumlah penumpang datang sebanyak 50 orang dan rata-rata penumpang berangkat sebanyak 23 orang. Jumlah lalu lintas barang melalui pelabuhan udara Betoambari baru mencapai 250 kg untuk bongkar barang dan 270 kg untuk bongkar muat. Sedangkan untuk bagasi, jumlah bongkar bagasi mencapai 540 kg dan muat bagasi sebanyak 500 kg. Masih kurang panjangnya landasan pacu bandara berimplikasi pada rendahnya rata-rata jumlah penumpang berangkat, sedangkan minat masyarakat untuk menggunakan sarana tersebut sangat besar bahkan harus menunggu daftar keberangkatan. Untuk itu, pada tahun 2007 telah dilakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan udara Betoambari antara lain *study master plan* bandara Betoambari, peningkatan landasan pacu bandara seluas 9.580 m<sup>2</sup>, pembangunan tower bandara seluas 102,4 m<sup>2</sup>, dan rehabilitasi terminal bandara.

Untuk meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana Bandara Betoambari Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah menandatangani MoU dengan pihak PT Merpati Nusantara Airlines dan telah mulai beroperasi sejak tanggal 2 Oktober 2007 layanan penerbangan Merpati dengan pesawat berkapasitas 56 kursi dengan rute penerbangan Baubau - Makassar 4 kali seminggu.

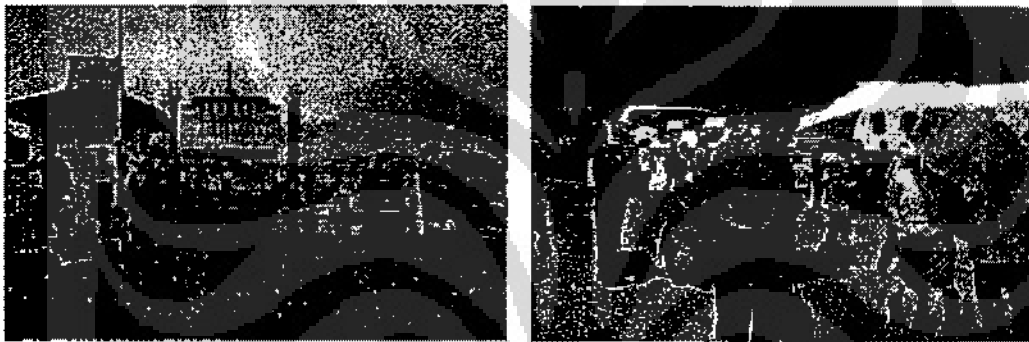
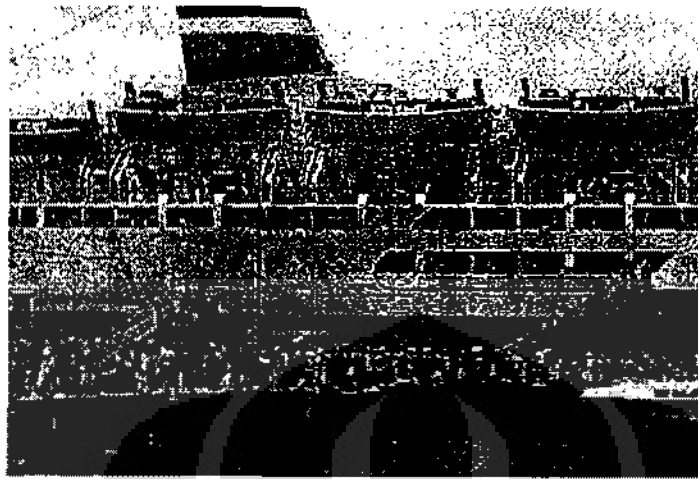
#### c) Pelabuhan dan Angkutan Laut

Menyikapi tuntutan kebutuhan pelayanan pada Pelabuhan Bau-Bau dalam rangka mendukung program jangka panjang untuk menjadikan Kota Bau-Bau sebagai Pintu Gerbang Ekonomi dan Pariwisata di Sulawesi Tenggara, maka Pelabuhan Bau-Bau akan terus dikembangkan secara berkesinambungan melalui peningkatan daya dukung sarana dan prasarana Pelabuhan. Kebutuhan dan fasilitas yang terkait dengan pembangunan pelabuhan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan menurut prakiraan jumlah muatan dan penumpang sebagaimana usulan penanganan sebagai berikut. Rencana Pengembangan Pelabuhan Murhum :

- Pengembangan Pelabuhan dan Reklamasi
- Pembangunan penahan dan pengikat talud

- Penambahan trestel dermaga
- Pengembangan Ruang Kawasan
- Pembangunan terminal penumpang
- Pembangunan gudang transit
- Penambahan lapangan penumpukan peti kemas
- Penambahan areal parkir dan pos penjagaan
- Penambahan pagar pengaman
- Penambahan jalan akses dan pengaman
- Pembangunan jembatan penghubung

Posisi Kota Bau-Bau yang strategis merupakan pintu gerbang pelayaran bagi kapal laut yang berasal dari kawasan Barat ke kawasan Timur Indonesia. dan sebaliknya. Untuk mendukung aktivitas kepelabuhanan Pemerintah Kota Bau-Bau mengarahkan pembangunan sarana transportasi laut pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai sarana dan prasarana pendukungnya antara lain perluasan pelabuhan murhum, pembangunan pelataran peti kemas, perluasan dermaga *speedboat*, pembangunan beberapa pelabuhan pendukung yakni di Sulea sepanjang 6.642 M, pemecah ombak di Tarafu, pembangunan dermaga Liwuto seluas 118 M2, pembangunan dermaga Wameo seluas 5,217 M2, dermaga Kalialia seluas 307 M2, dan peningkatan pelataran pelabuhan Lakologou.



Gambar. 4.6 Sarana Pelabuhan : Kapal PELNI, Kapal Cepat, dan Kapal Feri  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Bau-Bau telah selesai menyusun detail *design* Pelabuhan Peti Kemas Waramusio berlokasi di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna, semua itu ditujukan bagi terciptanya kelancaran arus barang bongkar dan muat, kenyamanan penumpang yang naik maupun yang turun. Sepanjang tahun 2006 jumlah kunjungan kapal laut di Pelabuhan Murhum Bau-Bau tercatat sebanyak 6.569 kunjungan dengan jumlah penumpang mencapai 414.231 orang. Sedangkan untuk volume bongkar barang mencapai 217.196.308 ton dan muat barang sebanyak 94.479.908 ton. Untuk penyeberangan kapal ferry, tercatat sebanyak 1.960 kunjungan dengan jumlah penumpang yang naik mencapai 147.349 orang, darmaga Kalia-Lia seluas 307 m<sup>2</sup>, dan rehabilitasi ruang tunggu dermaga speed boat.

Tabel. 4.6 Sarana pendukung angkutan laut di Kota Bau-Bau  
Tahun 2003 -2007

No.	Jenis sarana	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pelabuhan Utama	1	1	1	1	1
2.	Pelataran peti kemas	-	-	-	-	1
3.	Dermaga speeboat	1	1	1	1	1
4.	Pelabuhan pelra	1	1	2	2	2
5.	Dermaga kelurahan	1	2	3	4	5
6.	RS Pelabuhan	-	-	-	-	1
7.	Kantor Karantina	-	-	-	-	1

Sumber data : Dishub Kota Bau-Bau (2008), diolah

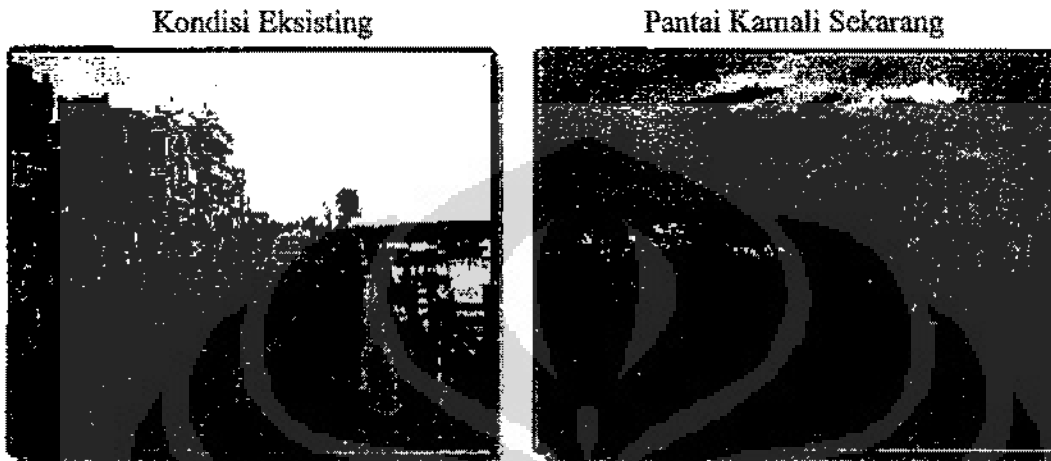
#### d) Ruang Publik (Pantai Kamali)

Kawasan *public space* (reklamasi pantai) adalah hasil penataan kawasan revitalisasi, meningkatnya arus penumpang dan barang di pelabuhan Bau-Bau, peningkatan lapangan usaha di sektor pedagang kaki lima serta kurangnya obyek wisata diperkotaan juga merupakan salah satu sisi pengembangan pantai kamali sebab ruang di perkotaan sudah sangat terbatas, sehingga dengan reklamasi pantai Bau-Bau sebagai wujud nyata pemerintah kota untuk menyelesaikan beberapa aspek pendukung dari hadirnya revitalisasi di Kota Bau-Bau. Secara kewilayahan Bau-Bau dikenal sebagai pintu gerbang (*outlet*) wilayah Sulawesi Tenggara melalui jalur transportasi laut.

Ruang terbuka dari hasil reklamasi pantai ini seluas 26.040 m<sup>2</sup> yang berada dipesisir pantai Kota Bau-Bau (istana ilmiah) sebagai obyek pendukung aktifitas wisata kota, maka dengan kehadiran reklamasi ini peranan dan fungsi sebagai wujud nuansa alami nilai-nilai dari sejarah Kesultanan Buton dimasa lalu. Ruang terbuka tersebut yang pemanfaatnya secara rutin terbagi beberapa kegiatan diantaranya 40% diperuntukkan bagi publik service termasuk pedagang kaki lima dan 60% lainnya diperuntukkan bagi pendopo, Perparkiran, Kios Souvenir, *Joging*



Trak, WC Umum dan reklamasi kota lainnya seperti taman dan areal olahraga air. Serta berfungsi sebagai paru-paru kota.



Gambar. 4.7 Pantai lokasi Kamali sebagai Titik Baru Sosial Ekonomi  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau

Saat ini ruang tersebut digunakan untuk kegiatan hiburan kota. Diasumsikan bahwa jumlah pengunjung (sampai dengan malam hari) rata-rata 200 - 1000 pengunjung setiap harinya. Dan jumlah terdapat pada saat hari libur, kegiatan artis atau pagelaran seni. Kawasan yang mudah dijangkau dari alun-alun kota.

#### e) Infrastruktur di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar ( APK ) jenjang pendidikan dasar sampai dengan usia dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah Kota Bau-Bau telah menjadikan isu pendidikan selain kesehatan sebagai isu utama yang prioritas dan strategis. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, baik melalui peningkatan akses masyarakat pada berbagai

jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai pendidikan menengah maupun melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga didik. Pembangunan pendidikan di Kota Bau-Bau diarahkan pada kompetensi penguasaan teknologi informasi yang akan mempermudah akses informasi bagi siswa agar menjelajahi dunia maya, mengeksplorasi sumberdaya pendidikan. Untuk mendukung proses tersebut disetiap sekolah secara bertahap telah dilengkapi dengan komputer dan piranti lunaknya guna mewujudkan perpustakaan digital disetiap sekolah.

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya gedung sekolah telah menunjukkan peningkatan yang pesat selama kurun waktu 2003 – 2007, yakni :

Tabel. 4.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Gedung)  
Tahun 2003-2007

Jenis Sarana	2003	2004	2005	2006	2007
TK/RA	47	52	54	55	60
SD/MI/SDLB	63	67	70	73	76
SMP/MTs/SMPLB	19	22	25	27	29
SMA/SMK/MA	16	19	21	21	22

Sumber data : Diknas Kota Bau-Bau (2008), diolah.

Salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan dibidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Selama periode tahun 2003 – 2007 Pemerintah Kota Bau-Bau telah membangun sejumlah lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMU/SMK sampai dengan tahun 2007 jumlah TK yang merupakan sarana pendidikan anak usia dini telah mencapai 60 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 3011 orang. Diberbagai jenjang pendidikan telah menunjukkan peningkatan yang cukup memadai. Lembaga pendidikan Anak usia dini (TK) pada tahun 2007 sebanyak 60

buah. Sedangkan jumlah siswa TK tahun 2007 sebanyak 3311 siswa. Angka Partisipasi PAUD Kota Bau-Bau pada tahun 2003 sebesar 44,32%, tahun 2004 sebesar 41,17%, tahun 2005 sebesar 49,12 %, tahun 2006 sebesar 50% dan tahun 2007 sebesar 59,88 %. Perkembangan jumlah siswa TK tahun 2003-2007.

Jumlah SD/MI pada tahun 2007 sebanyak 76 buah SD/MI meliputi 67 SD dan 7 MI dan 2 SLB. Sedangkan jumlah siswa SD/MI mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel. 4.8 Jumlah Siswa SD/MI/SLB Kota Bau-Bau  
Tahun 2003 -2007

Siswa	2003	2004	2005	2006	2007
SD	17.110	17.003	17.127	17.815	17.493
MI	201	400	581	631	645
<i>Jumlah</i>	<i>17.311</i>	<i>17.403</i>	<i>17.708</i>	<i>18.446</i>	<i>18.138</i>

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau (tahun 2008), diolah.

Jumlah SMP/MTs pada tahun 2007 sebanyak 29 buah. Pada tahun 2007 meliputi 21 SMP dan 7 MTs dan 1 SMPLB. Jumlah siswa SMP/MTs mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel. 4.9 Jumlah Siswa SMP/MTs Kota Bau-Bau  
Tahun 2003 -2007

Siswa	2003	2004	2005	2006	2007
- Siswa SMP	7.352	7.006	7.234	7.342	7.091
- Siswa MTs	485	368	346	458	394
<i>Jumlah</i>	<i>7.837</i>	<i>7.374</i>	<i>7.580</i>	<i>7.800</i>	<i>7.485</i>

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau (2008), diolah.

Angka Partisipasi Pendidikan SMP/MTs Kota Bau-Bau pada tahun 2003 sebanyak 88,78 %, tahun 2004 sebanyak 83,96%, tahun 2005 sebanyak 94,77 %, tahun 2006 sebanyak 96,75 %, dan tahun 2007 sebanyak 98,73 %.

Jumlah sekolah SMA/ SMK/ MA pada tahun 2007 sebanyak 21 sekolah yang meliputi 10 SMA,3 MA,1 SMLB dan 7 SMK. Jumlah siswa SMA/ SMK/ MA/SMLB pada tahun 2003 sebanyak 9263 orang, tahun 2004 sebanyak 10.564 orang, tahun 2005 sebanyak 9.657 orang tahun 2006 sebanyak 9.464 orang dan tahun 2007 sebanyak 9.657 orang.

Angka Partisipasi Pendidikan SMA/ SMK/ MA Kota Bau-Bau pada APK tahun 2003 sebanyak 65,48 , tahun 2004 sebanyak 121,80 %, tahun 2005 sebanyak 108,09 %, tahun 2006 sebanyak 81,27 %. dan tahun 2007 sebanyak 78,96 %. Angka Partisipasi Murni ( APM ) tahun 2003 sebanyak 89,70 % tahun 2004 sebanyak 90,73 %,tahun 2005 sebanyak 77,18 %, tahun 2006 sebanyak 57,13 % dan tahun 2007 sebanyak 57,58 % .

Gambaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMALB di Kota Bau-Bau tahun 2004–2007 dan proyeksi tahun 2008, yaitu :

Tabel. 4.10 APK, APM disemua Tingkatan  
Tahun 2004-2008

Tingkatan	2004	2005	2006	2007	2008
<b>APK</b>					
TK/SD/MI/SDLB	35,27	48,35	40,66	41,27	41,88
SMP/MTs/SMPLB	83,96	94,77	96,75	97,09	97,67
SMA/SMK/MA/SMALB	121,80	108,09	81,27	78,96	79,07
<b>APM</b>					
TK/SD/MI/SDLB	92,23	89,61	83,28	79,16	75,05
SMP/MTs/SMPLB	62,15	71,01	74,17	65,99	70,02
SMA/SMK/MA/SMALB	90,73	77,18	57,13	57,58	58,67

Sumber data : Diknas Kota Bau-Bau (2008), diolah

Jumlah perguruan tinggi di Kota Bau-Bau sampai dengan tahun 2007 sebanyak 6 (enam) perguruan tinggi masing-masing UNIDAYAN, STAI, UNISBUN, UMB, AMIK MILAN, AKPER, dan STIKES-IST BUTON. Sementara itu jumlah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi tersebut pada tahun 2002/2003 sebanyak 131 orang, tahun 2003/2004 sebanyak 132 orang, tahun 2004/2005 sebanyak 366 orang, tahun 2005/2006 sebanyak 1125 orang, dan tahun 2006/2007 sebanyak 4403 orang.

Pendidikan luar sekolah (PLS) sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah warga belajar (WB) yaitu tahun 2003 sebanyak 20 orang, tahun 2004 sebanyak 80 orang, tahun 2005 sebanyak 80 orang tahun 2006 dan tahun 2007 sebanyak 120 orang. Rincian masing-masing Wajib Belajar PLS, yaitu :

Tabel. 4.11 Jumlah Warga Belajar PLS Kota Bau-Bau  
Tahun 2003 -2007

No	WB	2003	2004	2005	2006	2007
1.	WB Paket A	-	20	40	40	40
2.	WB Paket B	-	40	40	80	40
3.	WB Paket C	20	20	-	-	-
<i>Jumlah</i>		<i>20</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>120</i>	<i>80</i>

Sumber data : *Diknas Kota Bau-Bau (2008), diolah.*

Dari total APBD Kota Bau-Bau di Tahun 2007 Rp. 302.841.425.010 alokasi anggaran pendidikan sebesar 28 %. Peruntukan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) 20% sedangkan Belanja langsung (Belanja yang diperuntukkan bagi belanja Publik) hanya sebesar 8 persen.

Mulai tahun 2008 Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan terobosan baru dibidang pendidikan yakni program pemberian makanan tambahan bagi sekitar 30.000 anak sekolah diseluruh Kota Bau-Bau. Program ini dimaksudkan tidak semata untuk peningkatan gizi anak sekolah, akan tetapi bertujuan menambah jumlah kalori/energi bagi anak sekolah, pertambahan kalori tersebut akan menambah prodktivitas belajar dan akhirnya anak sekolah akan semakin banyak menyerap informasi mengelolanya sesuai kemampuan kognisinya. Dalam jangka panjang program ini bertujuan menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di era global serta bisa berkontribusi pada pembangunan daerah bangsa dan negara.

#### f) Infrastruktur di Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan menjadi bagian penting dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bau-Bau selain pendidikan dan peningkatan

ekonomi masyarakat. Upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin merupakan strategi utama yang diwujudkan dengan membangun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas dan jaringannya, disertai peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

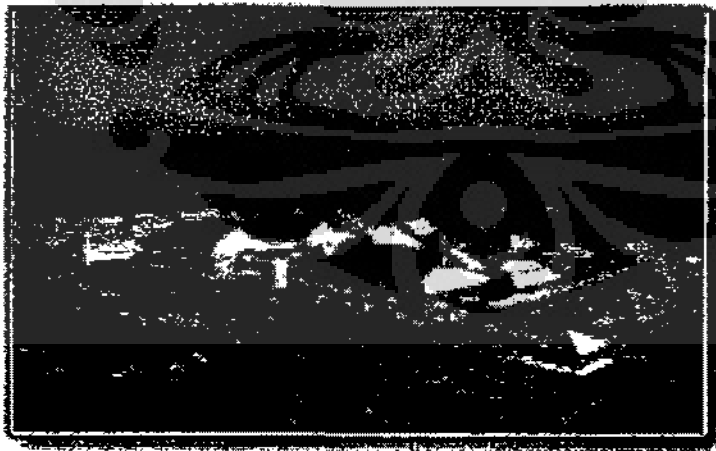
Selama kurun waktu 2003-2007, Pemerintah Kota Bau-Bau telah membangun berbagai sarana pelayanan kesehatan meliputi: 4 puskesmas perawatan, 12 puskesmas non perawatan, 17 puskesmas pembantu, yang didukung dengan menggerakkan 138 buah Posyandu, 15 unit puskesmas keliling serta 187 orang tenaga medis dan paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bau-Bau dengan orientasi kuratif dan rehabilitatif. Sementara itu untuk kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat didukung oleh 19 tenaga medis dan 232 tenaga para medis di puskesmas dan jaringannya.

Tabel. 4.12 Perkembangan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Kota Bau-Bau, 2003-2007

Jenis Sarana	2003	2004	2005	2006	2007
RSU	1	2	1	2	2
Puskesmas Perawatan	-	-	1	2	3
Puskesmas Non Perawatan	7	10	10	10	10
Puskesmas Keliling	4	4	9	12	15
Puskesmas Pembantu	12	15	12	12	12
Apotik	3	4	6	8	10
Rumah Bersalin	3	3	4	4	4
Posyandu	118	126	115	115	115

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau (2008), diolah.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Kota Bau-Bau, maka sejak tahun 2003 Pemerintah Kota Bau-Bau secara bertahap telah memulai pembangunan RSUD Type B dengan luas areal  $\pm$  4 Ha. Rumah sakit ini akan dikembangkan sebagai RSU Pusat Rujukan di Sultra setelah RSU Propinsi Kendari dan sudah beroperasi mulai Agustus tahun 2008. Dengan kapasitas 120 tempat tidur untuk pasien rawat inap, RSUD Kota Bau-Bau Type B secara bertahap akan dilengkapi dengan fasilitas Gedung Bersalin, Gedung Perawatan Umum, Gedung Perawatan Jiwa, Gedung Fisioterapi, Gedung Perawatan Anak, Gedung Perawatan VIP, Gedung Laundry/Dapur, Apotik, Gedung Operasi, ICU, Gedung Isolasi, UGD, Gedung Radiologi dan lain-lain. Fasilitas gedung sebagaimana disebutkan diatas akan dilengkapi secara bertahap pula dengan peralatan medis yang memenuhi standar dan kualifikasi. Sejalan dengan pembangunan RSUD Type B, Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan khususnya di RSUD yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan saja bagi masyarakat Kota Bau-Bau akan tetapi juga masyarakat yang berasal dari daerah belakangnya.



Gambar. 4.8 Dimensi Pengembangan RSUD Palagimata  
Sumber : Infokom Kota Bau-Bau



Tabel. 4.13 Perkembangan Tenaga Kesehatan Di RSUD Kota Bau-Bau,  
Tahun 2003 - 2007

Jenis Tenaga	2003	2004	2005	2006	2007
Dokter Spesialis	6	5	6	6	7
Dokter Gigi	2	2	2	2	2
Dokter Umum	4	4	4	4	5
Apoteker	1	1	1	1	1
Sarjana Kes. Masy.(SKM)	-	1	1	1	1
Sarjana Keperawatan (SI)	-	1	1	1	2
Perawat ( D III )	18	20	22	26	30
Analisis Kesehatan ( D III )	1	2	2	3	4
Fisioterapis ( D III )	1	1	1	1	6
Rephraksionis ( D III )	1	1	1	1	1
Radiolog ( D III )	-	-	1	2	2
Elektromedis ( D III )	-	-	-	1	1
Anestesian ( D III )	2	2	3	2	2
Nutrisionis ( D III )	2	2	3	4	4
Perawat Gigi ( D III )	1	1	1	1	2
Pembantu Paramedis	1	1	1	1	1
Bidan	11	14	16	19	23
Asisten Apoteker	2	2	2	2	2

Perawat Gigi	2	2	2	2	1
Perawat Kesehatan ( SPK)	46	68	82	84	86
Saniatrain	1	1	1	1	3
Jumlah	102	121	165	176	187

Sumber data : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau (2008), diolah.

Selain menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif di RSUD Kota Bau-Bau, Pemerintah Kota Bau-Bau juga menyelenggarakan upaya kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya.

Tabel 4.14 Perkembangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kota Bau-Bau, 2003 - 2007

Jenis Tenaga	2003	2004	2005	2006	2007
Dokter Umum	10	12	16	16	15
Dokter Gigi	4	4	4	4	4
Apoteker	2	2	2	2	2
Sarjana Kes. Masy.(SKM)	1	1	1	1	1
Perawat ( D III )	12	12	20	30	35
Bidan	6	44	53	55	55

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau (2008), diolah.

Untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang telah tersedia, maka Pemerintah Kota Bau-Bau berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. Total APBD Kota Bau-Bau di Tahun 2007 yakni sebesar Rp. 302.841.425.010, alokasi anggaran untuk kesehatan dari total APBD tersebut sebesar 8 % dengan perbandingan belanja langsung 5 % dan belanja tidak langsung 3 %.

Amirul Tamim (Walikota Bau-Bau pada periode 2003-2008) dalam wawancara tanggal 16 April 2009 mengemukakan bahwa :

”pendekatan utama yang kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bau-Bau yaitu : (i) mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin; dan (ii) meningkatkan pendapatan atau daya beli mereka/masyarakat miskin. Hal ini antara lain kita lakukan dengan melakukan penataan ruang dan memperbaiki infrastruktur-infrastruktur dasar seperti jalan raya, jalan usaha tani, pelabuhan, bandara, pasar, sarana dan prasarana bagi para pedagang, sarana dan prasarana bagi pedagang pasar malam, Rumah Sakit, dan ruang-ruang publik baru, serta infrastruktur dasar lainnya. Semuanya itu nantinya kita harapkan dapat menjadi rangsangan untuk terciptanya titik-titik ekonomi baru di masyarakat. Sebagai contoh misalnya perbaikan infrastruktur jalan raya, Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 melakukan perbaikan jalan raya diseluruh ruas jalan yang ada di Kota Bau-Bau, dan kesemuanya sebagian besar menggunakan aspal *hotmix* sebagai bahan baku jalan yang memiliki kualitas relatif cukup bagus dan dapat bertahan lebih lama. Perbaikan jalan raya tidak hanya dilakukan pada jalan-jalan utama, namun pada jalan-jalan yang bukan utama dilakukan perbaikan dan dengan tetap menggunakan aspal *hotmix* sebagai bahan dasarnya. Bahkan, ruas-ruas jalan yang merupakan jalan propinsi dan pembiayaannya semestinya dari APBD Pemerintah Propinsi juga kita lakukan perbaikan, hal ini kita lakukan karena mengingat banyaknya ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi, sehingga jalan-jalan propinsi harus secara bergilir untuk dianggarkan dalam APBD Propinsi, konsekuensinya adalah perbaikan jalan-jalan propinsi terkadang harus menunggu dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, sementara kondisi jalan-jalan tersebut kadang sudah sangat memprihatinkan dan disisi lain posisinya yang strategi, menjadi urat nadi dinamika sosial ekonomi masyarakat di daerah”.

Menurut Amirul, hasil yang dapat dilihat dari perbaikan infrastruktur jalan tersebut antara lain adalah titik-titik ekonomi baru mulai bermunculan disetiap ruas jalan, tidak hanya di jalan-jalan utama, pada jalan-jalan yang bukan utamapun titik-titik ekonomi mulai bermunculan. Dengan baiknya infrastruktur jalan, maka arus lalu lintas semakin tinggi, baik di jalan-jalan utama maupun pada ruas jalan yang bukan utama. Arus lalu lintas yang sudah cukup tinggi dilalui pada jalan-jalan yang bukan jalan utama, mengakibatkan usaha-usaha kecil yang dilakukan masyarakat pun mulai bermunculan, mulai dari yang menjajakan makanan jadi sebagai produk yang ditawarkan, maupun yang menawarkan produk jasa.

Pada sisi lain, dalam wawancara yang sama Amirul melanjutkan penjelasannya dengan mengemukakan bahwa :

"ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, maka dapat dilihat bahwa sebahagian besar masyarakat kita di Kota Bau-Bau yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, memilih tukang ojek sebagai mata pencaharian mereka. Nah, pada saat infrastruktur jalan belum dilakukan perbaikan, hampir setiap beberapa bulan para tukang ojek mengeluh baik karena nyaman mereka dalam mencari nafkah terganggu, maupun karena pengeluaran mereka yang relatif tidak dapat ditekan akibat dari kondisi jalan yang kurang bagus, biaya itu dikeluarkan karena untuk melakukan perbaikan pada kendaraannya, akibat karena kerusakan kecil, sedang, atau bahkan karena adanya kerusakan berat karena ruas jalan yang kurang baik. Peralatan-peralatan motor yang seharusnya dapat di gunakan selama beberapa tahun, namun karena medan jalan yang kurang baik, sehingga hanya dapat dimanfaatkan dalam beberapa bulan saja, belum lagi dengan resiko-resiko kecelakaan yang terjadi akibat kondisi jalan yang kurang baik tersebut, dan ketika kecelakaan itu terjadi pada mereka maka tentunya mereka akan mengeluarkan lagi biaya-biaya tambahan untuk perawatan".



Gambar. 4.9 Salah satu ruas jalan bukan utama yang tetap menggunakan aspal *hotmix*  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Contoh lainnya menurut Amirul adalah pembangunan Infrastruktur jalan usaha tani. Pada beberapa waktu yang lalu, para petani menyewa buruh angkut untuk mengangkat hasil pertanian mereka ke samping jalan raya untuk kemudian diangkut guna dipasarkan, tidak sedikit biaya yang mereka keluarkan untuk mengongkosi para buruh angkut tersebut. Saat ini, dengan adanya jalan usaha tani yang langsung menuju area pertanian mereka, sehingga biaya untuk buruh angkut sudah tidak diperhitungkan lagi, karena kendaraan pengangkut dapat secara langsung masuk dalam area pertanian mereka. Hasilnya, disamping biaya yang mereka keluarkan dapat berkurang, harga jual hasil pertanian mereka dapat dikurangi akibat berkurangnya biaya-biaya yang dikeluarkan, hal ini selain memberi keuntungan bagi mereka, juga memberi keuntungan bagi masyarakat secara umum.

Selanjutnya menurut Amirul, strategi lain selain perbaikan infrastruktur dasar, yakni pendekatan-pendekatan yang langsung ditujukan pada fenomena kemiskinan, misalnya dengan memberadayakan masyarakat miskin. Dalam periode 2003-3008 Pemerintah Kota Bau-Bau menganggarkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi usaha kecil guna memberikan dukungan modal bagi usaha-usaha kecil. Selain itu, program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan yang dimaksudkan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di kelurahan, program ini digulirkan sejak tahun 2004 sampai tahun 2008, bahkan saat ini di tahun 2009 Pemerintah Kota masih menganggarkan pula program tersebut.

Sementara itu, menurut Sudjito (Kepala BAPPEDA Kota Bau-Bau periode 2003-2008), mengemukakan bahwa secara sistematis strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam perodesasi 2003-2008 adalah :

- 1) Memetakan tingkat kemiskinan masyarakat (ekonomi, sosial budaya, akses, dll)
- 2) Mengubah *mindset* atau cara pandang masyarakat
- 3) Integrasi program

Memetakan kemiskinan masyarakat yakni ; (i) miskin ekonomi: dengan indikator tingkat penghasilan/pengeluaran perkapita, tingkat kesehatan dan gizi makanan, tingkat pendidikan, kepedulian lingkungan, penggunaan ruang, dll; (ii) miskin politik/akses terhadap kebijakan: dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kehidupannya, ketersediaan sarana kelembagaan guna terlibat secara langsung dalam proses politik; (iii) dimensi sosial budaya: dengan indikatornya antara lain tingkat kebersamaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, tingkat kemampuan psikologi individu (ketidakberdayaan, ketidakmampuan berpendapat, ketergantungan, rasa malu, rasa hina), tingkat kriminalitas (tingkat keamanan dan ketertiban).

Mengubah *mindset* atau cara pandang, yakni : (i) cara pandang masyarakat dari obyek pembangunan/perubahan menjadi subyek pembangunan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat; (ii) cara pandang masyarakat dari daftar keinginan dalam perencanaan pembangunan/perubahan yang mereka rencana lakukan menjadi daftar kebutuhan, sehingga daya serap program meningkat; (iii) cara pandang agar lebih cerdas dalam menentukan pilihan dan skala prioritas dalam kehidupan mereka.

Integrasi program penanggulangan kemiskinan Kota Bau-Bau, yakni ; (i) Integrasi dokumen; (ii) integrasi pelaku : pemerintah, masyarakat, dan swasta. (iii)

Integrasi program/sumber pembiayaan : APBN, APBD I, APBD Kota, BLN, Swadaya Masyarakat

Sementara, Filtar (Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau) mengemukakan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif, multidimensi dan mendasar dengan pendekatan yang bertumpu pada peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, upaya penanganan kemiskinan penduduk di Kota Bau-Bau dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menggambarkan berbagai program pemberdayaan.

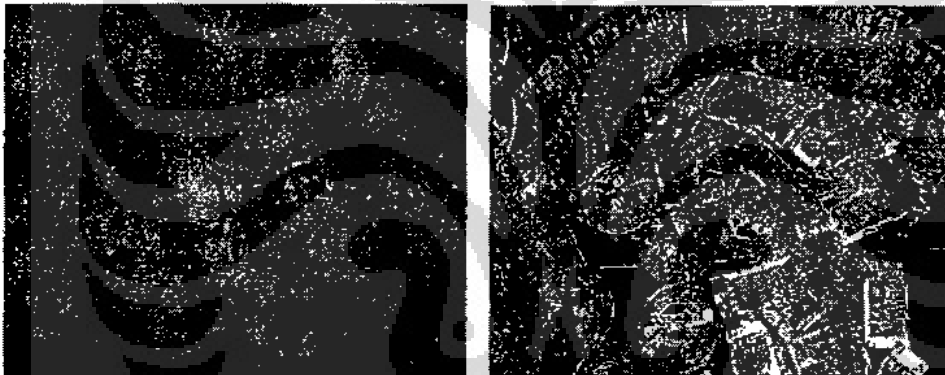
Kebijakan-kebijakan penunjang yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau, antara lain adalah :

- a) Identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan  
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menginventarisir kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari setiap sektor, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- b) Sinkronisasi antar program saat ini dan program yang akan datang  
Proses sinkronisasi diarahkan untuk menyelaraskan antar program yang ada disetiap instansi, serta antar program dari instansi pemda yang satu dengan instansi pemda lainnya.
- c) Membagi peran antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat  
Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi harus dilakukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Diantara ketiga kelompok ini harus dilakukan pembagian peran yang seimbang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun demikian, pembagian peran ini bukanlah sesuatu yang saling meniadakan, tetapi saling mendukung sehingga tercipta kerjasama antar pelaku.
- d) Penentuan kelompok sasaran dan perumusan sistem penyampaian  
Penentuan kelompok sasaran ditujukan agar kebijakan dan program yang dilakukan mencapai tujuan secara tepat. Kemudian dirumuskan cara penyampaian kebijakan dan program kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan.

Adapun program-program sektoral penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

a) Sektor Industri

- 1) Pembinaan teknologi tepat guna termasuk teknologi kemasan hasil produk.
- 2) Peningkatan ketrampilan kerja melalui magang ke industri-industri luar daerah
- 3) Bantuan peralatan produksi usaha dan alat-alat pertukangan
- 4) Pemberian bantuan alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) bagi penduduk bermata pencaharian sebagai pengrajin tenun.
- 5) Peningkatan ketrampilan pengolahan biji jambu mente.



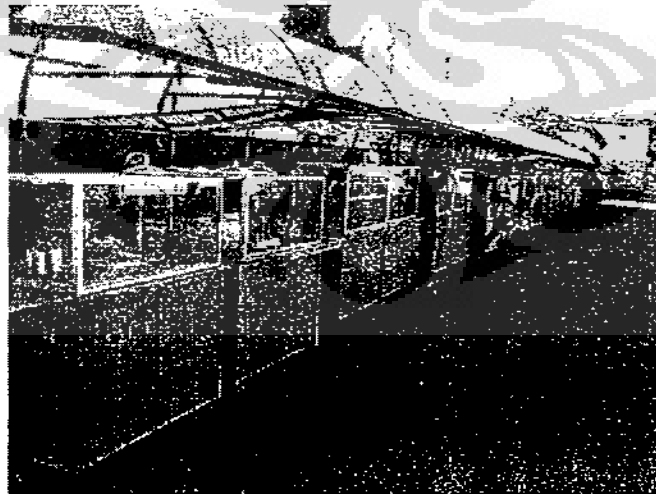
Gambar. 4.10 Pembinaan teknologi kemasan hasil produk & pengolahan biji jambu mente  
Sumber : Dinas UKM Kota Bau-Bau

b) Sektor Pertanian

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian
- 2) Pengembangan areal pertanian (padi dan palawija)
- 3) Pengembangan Holtikultura
- 4) Peningkatan akses pada lahan pertanian melalui pembukaan jalan usaha tani
- 5) Pemberian bantuan ternak
- 6) Peningkatan saran dan prasarana petani dan nelayan

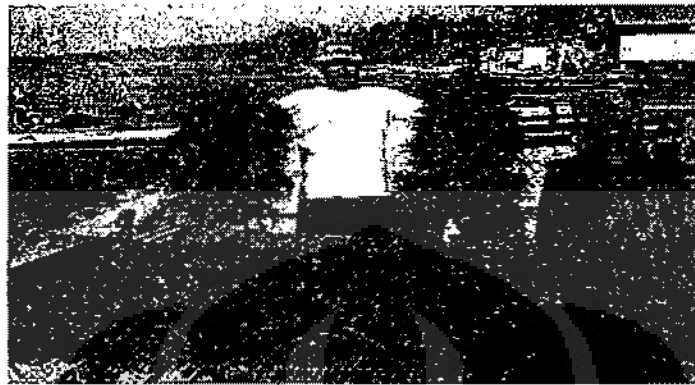


- 7) Peningkatan teknologi pasca panen
  - 8) Bantuan bibit tanaman jangka panjang yang bernilai ekonomi bagi masyarakat petani berpindah-pindah.
- c) Sektor Sumber daya Air dan Irigasi
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana air bersih pada kawasan-kawasan kumuh perkotaan dalam bentuk Hidran Umum, Terminal Air
  - 2) Perbaikan dan peningkatan saluran irigasi untuk meningkatkan produksi petani.
- d) Sektor Tenaga Kerja
- 1) Pembinaan tenaga kerja produktif sesuai tuntutan lapangan kerja yang ada
  - 2) Pembukaan lapangan kerja baru dengan menumbuhkan investasi baru
- e) Sektor Perdagangan dan Pengembangan Usaha Daerah
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan (pasar, kios, dan pertokoan) yang dapat dijangkau oleh pedagang kecil dan menengah
  - 2) Bantuan sarana usaha pedagang kaki lima dalam bentuk Gerobak dan tenda
  - 3) Bantuan modal usaha



Gambar. 4.11 Pembangunan sarana pedagang pasar malam  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

- f) Sektor Pendidikan
- 1) Pemberian bantuan *study* (bea siswa) bagi anak didik kurang mampu pada semua tingkatan
  - 2) Bantuan prasarana pendidikan (peralatan sekolah) bagi murid kategori miskin (pemberian buku-buku pelajaran, alat tulis)
  - 3) Rehabilitasi, Penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang padat jumlah muridnya
- g) Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja
- 1) Pelayanan kesehatan murah dan terjangkau bagi masyarakat miskin dalam bentuk pemberian obat-obatan dan makanan tambahan
  - 2) Perbaikan gizi bagi anak-anak serta balita.
  - 3) Pembinaan anak jalanan dan anak terlantar melalui rumah singgah
  - 4) Bantuan bagi penyandang cacat dalam bentuk pembinaan ketrampilan disertai bantuan peralatan kerja dan bantuan modal usaha.
  - 5) Bantuan untuk lanjut usia pra sejahtera
  - 6) Bantuan modal kelompok usaha wanita kurang mampu (janda) sesuai kelompok usaha produksi
- h) Sektor Perumahan dan Permukiman
- 1) Pembangunan perumahan bagi warga eksodus dan warga lokal yang berkategori kurang mampu dalam satu kawasan tertentu dalam bentuk program ALADIN (Atap Lantai dan Dinding)
  - 2) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh melalui pembangunan MCK, jalan setapak, drainase serta kebutuhan air bersih.



Gambar. 4.12 Petani rumput laut yang mendapat bantuan modal usaha dari dana bergulir PPMK

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sementara, La Ode Abdul Munafi (Pimpinan DPRD Periode 2003-2008) mengemukakan :

”strategi penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan dalam periode 2003-2008 tidak hanya kita arahkan pada pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin juga senantiasa kita anggarkan dalam kurun waktu tersebut, meskipun juga harus kita akui bahwa program-program pemberdayaan yang kita lakukan tersebut belum memperlihatkan hasil yang optimal, terkadang masih melenceng dari konsep dasarnya, ada persoalan pada tataran pelaksanaannya. Pada sisi lainnya, konsentrasi kita masih lebih didominasi pada program-program yang sifatnya pembangunan fisik, dengan mengabaikan pembangunan yang sifatnya non-fisik, padahal pembangunan non-fisik sebenarnya tidak kalah urgennya. Hal ini dapat kita lihat tidak hanya terjadi pada program-program yang direncanakan oleh pemerintah, namun pada program-program yang diusulkan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat pun lebih diwarnai dengan program-program dan kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, bahkan kadang tidak prioritas”.

Hal senada, juga diungkapkan oleh Aziana (Perwakilan JPKP Bau-Bau/Buton), seperti yang diungkapkannya berikut :

"harus kita mengerti, bahwa banyak program yang direncanakan untuk menangani kemiskinan belum dapat menjamin kalau kemiskinan itu dapat teratasi, variabel lain yang cukup penting adalah bagaimana implementasi dan tindak lanjut dari program yang direncanakan tersebut, dan kedua unsur inilah yang selalu kita kecolongan dilapangan, seringkali pada tataran implementasi program yang dilakukan melenceng dari konsep dasar yang telah dirumuskan, sebagai contoh Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang diperuntukan bagi usaha kecil dan pedagang kaki lima yang membutuhkan dukungan modal, namun realitasnya tidak sedikit dana-dana untuk dukungan permodalan tersebut didapatkan oleh mereka-mereka yang belum memiliki usaha produktif yang potensial, hanya karena memiliki hubungan-hubungan dengan pengelola program".

Sementara itu, salah seorang masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

"memang pemerintah Kota kita melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menggulirkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi para usaha kecil dan pedagang-pedagang kaki lima, hanya saja terkadang yang mendapatkan dana bergulir tersebut belum tepat sasaran, sehingga tidak usaha kita heran ketika adanya kredit macet dalam program PEK tersebut. Hal itu dapat terjadi karena; pertama, pihak pengelola tidak memiliki mekanisme yang baik dalam menyalurkan, semestinya yang berhak mendapatkan adalah yang telah memiliki usaha potensial dan hanya karena kendala permodalan sehingga perlu disentuh dengan bantuan modal tersebut; kedua, masih banyak kepentingan-kepentingan lain yang ikut masuk dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga terkadang tidak memiliki usaha potensial akan tetapi dapat memperoleh dana hanya karena rekomendasi dari kelompok tertentu, termasuk salah satunya dari para legislator kita".

Arif Tasila (Koordinator Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM Se Kota Bau-Bau) mengemukakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menanggulangi kemiskinan di daerah masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya general, sehingga terkadang pendekatan yang di gunakan tidak tepat dengan kondisi wilayah yang menjadi sasaran program, sehingga akan lebih baik dan efektif ketika penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya masyarakat lokal setempat.

Sedangkan menurut Sukri (Direktur LSM Sintesa Bau-Bau/Buton), mengungkapkan sebagai berikut :

"penanggulangan kemiskinan yang digalakkan di Kota Bau-Bau belum menjawab masalah kemiskinan politik secara substansi, yakni kemiskinan partisipasi masyarakat miskin dalam jalanya pembangunan, program-program yang digulirkan oleh pemerintah untuk menjawab kemiskinan politik masyarakat miskin belum sampai pada sasaran yang sesungguhnya, masih tereksplorasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang membuat bias pencapaian tujuan utama".

Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman (Univ. Muhammadiyah Buton/UMB), yang mengatakan bahwa : "Musrebang yang selama ini dilakukan sama sekali belum efektif, bahkan hanya merupakan kegiatan pemborosan anggaran, karena musrebang yang idealnya menjadi media partisipasi masyarakat untuk menencanakan pembangunan, namun realitasnya wadah ini hanya menjadi kegiatan formalitas belaka".

Sementara, Harpalani (Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Se Kota Bau-Bau) mengemukakan bahwa penanggulangan kemiskinan yang digalakkan belum membangkitkan swadaya masyarakat yang maksimal, saat ini yang terlihat di masyarakat adalah semangat kebersamaan, kekeluargaan dan rasa persaudaraan sesama masyarakat sudah mulai luntur, kepekaan masyarakat kita terhadap kondisi sosial masyarakat disekitarnya juga telah memudar, sehingga pemerintah juga harus

introspeksi diri bahwa mungkin pendekatan yang dilakukan selama ini ada yang harus diluruskan, yakni dengan tidak selamanya melakukan pendekatan proyek pada program-program pemberdayaan masyarakat.

#### **4.3. Program dan Kebijakan Penanganan Masyarakat Miskin di Tingkat Kelurahan**

Amirul Tamim (Walikota Bau-Bau Periode 2003-2008) memberikan penjelasan tentang penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan, dalam suatu wawancara tanggal 16 April 2009 sebagai berikut :

"untuk penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan, dalam periode tahun 2004-2008 kita telah menganggarkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PPMDK) yang kemudian berubah nama pada tahun 2005 menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Pada tahun 2004 dan tahun 2005 kita anggarkan dalam APBD Kota sebesar 27.500.000,- juta untuk setiap kelurahan, kemudian pada tahun 2006 dan 2007 kita tingkatkan menjadi 33.150.000,- untuk setiap kelurahan. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2007 dan 2008 kita tingkatkan kembali anggarannya menjadi 50.000.000 per kelurahan. Program kita lakukan di samping untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin, pada sisi lainnya kita harapkan pula dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam proses pengawasannya. Disamping itu kegiatan ini kita harapkan pula dapat meningkatkan kemandirian masyarakat kita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal kelurahannya masing-masing, serta dapat meningkatkan daya dukung Pemerintah Daerah dalam pengembangan perencanaan partisipatif oleh masyarakat lokal, sehingga nantinya dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat kita, dan mereka dapat berpikir secara rasional untuk melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing".

Sementara, menurut Jufri (Pejabat BPM yang bertanggung jawab secara Tekhnis pada Pelaksanaan PPMK) kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah masing-masing kelurahan. Lebih lanjut menurut Jufri, dalam 5 tahun pelaksanaan program PPMK, sebahagian besar diperuntukkan untuk pembangunan fisik, yakni seperti : sumur, jalan setapak, drainase, posyandu, gedung TK, dll. Khusus di tahun 2007 dan 2008 pembagian anggaran program disetiap kelurahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alokasi penggunaan sebagai berikut :

- a) Dana kegiatan atau program dibidang fisik Rp. 20.000.000,-
- b) Dana kegiatan bantuan mpdal usaha bagi kelompok usaha kecil dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan sebesar Rp.20.000.000,-
- c) Dana bantuan untuk pengembangan kegiatan Remaja Masjid sebesar Rp. 2.500.000,-
- d) Dana bantuan untuk pengembangan kegiatan kepemudaan melalui karang taruna sebesar Rp. 2.500.000,-
- e) Dana bantuan untuk operasional pelaksanaan tingkat kelurahan Rp. 5.000.000,- yang terbagi :
  - 1) Intensif Tim Pelaksana PPMK tingkat kelurahan Rp. 4.400.000,-
  - 2) Administrasi dan pelaporan Rp. 600.000,-

Jufri kemudian melanjutkan penjelasan tentang pelaksanaan tekhnis program PPMK sebagai berikut :

"penerima dana PPMK adalah masyarakat kelurahan yang paling membutuhkan dan dianggap prioritas dengan Tim Pelaksana Kegiatan adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 3 orang yang ditetapkan melalui rapat musyawarah pengurus LPM pada masing-masing kelurahan Pelaksana PPMK adalah pengurus LPM yang mempunyai waktu untuk mengurus kegiatan PPMK. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang direkomendasikan oleh Kepala Sekretariat

Program dan telah disetujui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau sebagai penanggung jawab program, penyaluran dana terdiri dari I tahap pencairan yaitu 100 %. Penentuan kegiatan yang akan didanai oleh program ini direncanakan secara partisipatif oleh Masyarakat kelurahan dalam musyawarah didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dan petugas dari sekretariat Kecamatan dan Kota. Bidang kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat adalah diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan atau peningkatan kegiatan kualitas hidup masyarakat dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan”.

La Peni, salah seorang Lurah di Kota Bau-Bau merasa sangat terbantu masyarakatnya dengan adanya kegiatan PPMK tersebut, sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut :

”kegiatan PPMK cukup membantu kami dalam melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan, ada beberapa program yang dianggap penting dan diusulkan dalam Musrenbang, namun tidak teranggarkan karena keterbatasan anggaran, sehingga dengan adanya kegiatan PPMK beberapa usulan yang tidak terakomodasi dan hal itu kita anggap penting, maka dapat dilaksanakan melalui kegiatan PPMK, apalagi dengan adanya pula program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), sehingga saling bersinergi untuk menangani masyarakat miskin di tingkat kelurahan, meskipun masih adanya beberapa kendala yang terlihat, namun secara umum ada nilai positif yang dapat diambil dari kegiatan PPMK tersebut, secara jujur anggaran PPMK relatif masih kurang, namun ada hal lain yang menjadi modal kita, yaitu karena yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program itu adalah masyarakat sendiri, sehingga ada dukungan-dukungan lainnya yang datang dari masyarakat sendiri, baik dukungan itu berupa materi ataupun dalam bentuk dukungan lainnya seperti tenaga, ada beberapa kegiatan yang



semestinya membutuhkan anggaran yang lebih besar, dan tidak mungkin terlaksana dengan anggaran yang ada, namun karena masyarakat sendiri yang melaksanakan sehingga biaya-biaya selama pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.



Gambar. 4.12 Gedung TK sebagai salah satu kegiatan fisik PPMK  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Menurut Jufri, selain kegiatan fisik, PPMK juga melayani permohonan pinjaman dana bergulir bagi kelompok usaha kecil yang telah menekuni usaha dan mempunyai keinginan untuk menambah volume usaha, bantuan modal di adakan pada PPMK tahun 2007 dan 2008. Peserta yang masuk dalam pelayanan pinjaman dana bergulir adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok yang mempunyai pengurus kelompok yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara, selebihnya adalah anggota. Jumlah pinjaman dalam kegiatan ini per orang maksimal sampai Rp. 750.000,-

Sementara, Harsono Wibowo (Fasilitator Kecamatan) mengungkapkan bahwa harus diakui bahwa untuk dana bergulir tahun 2007 dan 2008 hampir semua Kelurahan mengalami kemandekan, dana tidak bergulir sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yakni : (i) kesadaran masyarakat penerima dana bergulir yang belum sepenuhnya bertanggung jawab, sehingga ketika

fasilitator pendamping tidak ke lapangan untuk mempertanyakan pengembalian dana, maka pembayaran angsuran tidak dilakukan; (ii) keterbatasan tenaga dan waktu kerja para fasilitator, sehingga tidak dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara keseluruhan dalam waktu setahun penuh, akibat honor dan operasional fasilitator yang disiapkan hanya selama 7 bulan kerja.



Gambar. 4.14 pengrajin tenun yang mendapatkan dana bergulir dari PPMK.  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Marzuki (salah seorang tim pelaksana PPMK di Kelurahan), mengemukakan bahwa khusus kegiatan fisik, pelaksanaannya dilakukan seperti model padat karya, yakni dengan mengambil tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin di kelurahan setempat, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui penyediaan lapangan kerja bagi mereka. Meskipun, hal ini dipertanyakan oleh anggota masyarakat lainnya, Arianto (salah seorang ketua RT / Masyarakat) mengemukakan bahwa model *rekrutmen* tenaga kerja terkadang tidak secara terbuka disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi para pengurus program hanya melakukan *rekrutmen* secara tertutup, sehingga unsur KKN dapat terjadi dipelaksanaan kegiatan tersebut. Para tenaga kerja yang direkrut adalah mereka-mereka yang memiliki kedekatan dengan para tim pelaksana program di kelurahan, konsekuensinya adalah sasaran utama yakni masyarakat miskin dengan skala prioritas terkadang terabaikan.

Toni (salah seorang masyarakat) mengemukakan bahwa pengelolaan kegiatan PPMK di kelurahan masih jauh dari sikap transparan, karena kegiatan ini masih dimanfaatkan oleh elit-elit yang ada di tingkat kelurahan, apalagi yang merekomendasikan pengurus PPMK kelurahan adalah pengurus LPM yang *notabene* merupakan perwakilan elit masyarakat/tokoh masyarakat di kelurahan, unsur masyarakat miskin terlupakan, sehingga perdebatan hanya berkisar disepertarian kepentingan mereka dan menafikan apa yang menjadi substansi dari pelaksanaan program yakni penanggulangan masyarakat miskin yang ada di kelurahan.

Hal senada, juga di kemukakan oleh Nurhayati (anggota masyarakat lainnya/ ketua RT), yang mengemukakan bahwa terkadang pembahasan program dan sosialisasi program tidak melibatkan secara keseluruhan unsur-unsur masyarakat, misalnya RT dan RW atau kelompok masyarakat lainnya, pembahasan hanya dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan lain dari kegiatan program tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada pelaksanaan kegiatan fisik, dalam penyaluran dana bergulir demikian pula adanya, masyarakat hanya mendengar bahwa ternyata ada dana bergulir yang di salurkan di masyarakat.

La Ode Abdul Munafi (Pimpinan DPRD Periode 2003-2008) memberikan penjelasan tentang keberadaan kegiatan PPMK sebagai berikut :

"harus kita akui kalau masih ada sedikit persoalan dalam tataran pelaksanaan kegiatan PPMK, hal ini terjadi di karenakan beberapa hal, antara lain ; *pertama*, pemahaman masyarakat kita yang tidak paripurna tentang substansi dari pelaksanaan program tersebut, sehingga kadang pelaksanaan program melenceng dari konsep dasarnya, hal ini mungkin saja terjadi akibat sosialisasi tentang keberadaan program yang tidak maksimal; *yang kedua*, adalah kendala sosiologis, yakni mentalitas masyarakat kita, khususnya mereka-mereka yang dipercayakan untuk mengelola pelaksanaan program di di tingkat kelurahan.; dan kendala lainnya, yaitu persoalan sumber daya masyarakat miskin kita itu sendiri, yang belum cerdas dalam melihat kebutuhan dengan skala prioritas, sehingga kadang masih kurang tepat dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang mesti ditindaklanjuti, kita masih

menjumpai beberapa kegiatan fisik yang kami nilai tidak terlalu *relevan* dengan subansi program, misalnya saja pembangunan pagar kantor kelurahan, padahal yang seperti ini ada pos anggarannya tersendiri, mungkin pada kebijakan yang lain.”.

#### 4.4. Analisis

##### 4.4.1 Gambaran Kondisi Kemiskinan di Kota Bau-Bau

Kota Bau-Bau sebagai salah satu daerah pemekaran baru di propinsi Sulawesi Tenggara, memperlihatkan perkembangan yang cukup baik pada periodisasi 2003-2008 dalam upaya melakukan percepatan-percepatan pembangunan di daerahnya.

Selama kurun waktu 2004-2007, perekonomian Kota Bau-Bau menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,50%. Angka ini adalah lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,00% selama kurun waktu yang sama.

Sementara itu, pendapatan per kapita Atas Dasar Harga (ADH) berlaku penduduk Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,15% atau Rp. 7.567.786,63 per tahun. Apabila pada tahun 2003, pendapatan per kapita ADH berlaku hanya sebesar Rp. 5.166.560,51 atau Rp. 430.546,71 per bulan, maka pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 5.914.626,06 atau Rp. 492.885,51 per bulan. Pada tahun 2005, angka tersebut terus meningkat menjadi Rp. 7.365.270,34 atau Rp. 721.045,27 per bulan, Rp. 8.652.543,26 pada tahun 2006 atau Rp. 721.045,27 per bulan dan pada tahun 2007 menjadi Rp. 10.739.932,99 atau Rp. 894.994,44 per bulan.

Secara riil atau ADH konstan 2000, pendapatan per kapita Kota Bau-Bau tumbuh sebesar 5,80% per tahun atau Rp. 4.191.070,80 per tahun atau hanya Rp. 349.255,90 per bulan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita riil masyarakat Kota Bau-Bau hanya sekitar 55,38% dari pendapatan per kapita

nominalnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator lain untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu pun memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Nilai PDRB ADH berlaku Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,07% per tahun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH berlaku sebesar Rp. 603.976,09 juta, Rp. 712.724,27 juta pada tahun 2004, Rp. 892.523,46 juta pada tahun 2005, Rp. 1.058.543,49 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 1.338.292,31 juta. Pada sisi lain, nilai PDRB ADH konstan tahun 2000 Kota Bau-Bau selama kurun waktu 2003-2007 juga cenderung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,50% per tahun. Pada tahun 2003, nilai PDRB ADH sebesar Rp. 437.688,43 juta, Rp. 469.388,76 juta pada tahun 2004, Rp. 506.601,04 juta pada tahun 2005, Rp. 543.827,41 juta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 584.436,80 juta.

Sementara itu, hal lainnya menunjukkan pula peningkatan-peningkatan yang relatif cukup baik, Kota Bau-Bau memiliki nilai HDI yang cukup baik pada laporan *Human Development Indeks* (HDI) tahun 2005 untuk kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau menjadi salah satu dari kabupaten/kota yang memiliki nilai HDI diatas nilai HDI dari Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau menjadi daerah rangking kedua yang memiliki nilai HDI tertinggi di Propinsi Sulawesi Tenggara setelah Kota Kendari. Kota Bau-Bau ditahun 2005 memperoleh nilai 69,7 sementara Kota Kendari dengan nilai HDI 73,4. Laporan MDGs Kota Bau-Bau Tahun 2007, menjelaskan bahwa Human Development Indeks Kota Bau-Bau tahun 2006 tercapai 70.60 meningkat 0,70 atau 1% dibanding dengan HDI tahun 2005 sebesar 69.90 mengalami kenaikan 1,60 % dibanding dengan realisasi tahun 2004 sebesar 68.800. Angka HDI Kota Bau-Bau merupakan dua terbesar dipropinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan kriteria tingkat status pembangunan

manusia capaian HDI menunjukkan status pembangunan manusia telah mencapai taraf menengah keatas.

Namun, dari berbagai capaian-capaian positif yang diraih oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam perodesasi 2003-2008 diatas, nampaknya belum seiring dengan capaian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menekan angka kemiskinan diperiodesasi yang sama. Capaian-capaian yang diraih disektor pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PDRB, maupun pada peningkatan nilai HDI belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menangani masalah kemiskinan di daerah.

Menurut data BPS Kota Bau-Bau, jumlah masyarakat miskin di Kota Bau-Bau dalam kurun waktu 2003-2008 mengalami pasang-surut atau fluktuatif. Pada Tahun 2003 angka kemiskinan sebesar 19,08 persen (22.300 jiwa), sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 18,34 persen (22.100 jiwa), penurunan angka kemiskinan juga terjadi pada tahun 2005 menjadi 17,58 persen (21.300 jiwa). Namun, pada tahun 2006 angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali menjadi 18,14 persen (22.600 jiwa), meskipun kemudian dapat ditekan kembali pada tahun 2007 dan tahun 2008, yakni 18,14 persen (22.600 jiwa) di tahun 2007 dan 17,68 persen (22.200 jiwa di tahun 2008). Namun, survei pada tahun 2008 belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008.

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 terjadi karena adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya harga berbagai barang sehingga inflasi mencapai 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006. Akibatnya penduduk miskin yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Sementara, dengan indikator-indikator yang lebih dikembangkan, survei BKKBN untuk masyarakat miskin di Kota Bau-Bau memperlihatkan angka-angka yang cukup tinggi. BKKBN mengistilahkan masyarakat miskin dengan sebutan keluarga pra sejahtera. Pada tahun 2002 masyarakat pra sejahtera di Kota Bau-Bau sebesar 21,27 persen, di tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi 33,79 persen, dan di tahun 2007 masyarakat pra sejahtera naik menjadi 41,73 persen.

#### 4.4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau

Winarto (2007 :8) menuliskan bahwa pada dasarnya siasat atau strategi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

*Pertama*, siasat pembangunan yang menggunakan cara tidak langsung dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk memperbesar "kue ekonomi nasional".

*Kedua*, yang merupakan hasil kritik pertama. Berdasarkan pengalaman di India dan Pakistan, Mahbub UI (1995) berpendapat bahwa memerangi kemiskinan dengan cara tidak langsung ternyata menimbulkan makin parahnya kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya bertitik tolak pada serangan langsung terhadap kemiskinan, dimana salah satunya adalah pendekatan kebutuhan dasar.

Model kebutuhan dasar yang lahir dari prakarsa Gunnar Myrdal dalam karya agungnya "*Asian Drama*". Model ini merupakan penganjur program kesejahteraan dan bantuan bagi orang miskin pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, penguatan modal usaha bagi usaha kecil dan sebagainya.

Pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya menanggulangi kemiskinan di periode 2003-2008 telah melakukan berbagai macam pembangunan yang dapat memberikan nilai positif dalam dinamika sosial ekonomi kemasyarakatan di daerah. Penataan ruang kota dan pembenahan infrastruktur dasar merupakan beberapa langkah penting yang telah dilakukan dalam periode 2003-2008. Khusus untuk penataan ruang kota, maka wilayah Bau-Bau dikelompokkan dalam beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK), yakni sebagai berikut :

- a. BWK I dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa grosir skala regional dan kota. Dikembangkan dengan pusat di Wale.
- b. BWK II dengan fungsi pendukung perdagangan dengan batas Sungai Bau-Bau kearah barat sampai Kelurahan Bone-bone dengan pusat di Warneo.
- c. BWK III dengan fungsi pusat pendidikan tinggi dan pemerintahan kota. Dikembangkan dengan pusat di Katobengke mencakup wilayah Lipu, Sulaa, Badia, dan Waborobo.
- d. BWK IV dengan fungsi pusat permukiman kota dengan pusat pelayanan di Waruruma dengan cakupan pelayanan sampai Lakologou diarah utara dan Kadolokatapi diarah selatan.
- e. BWK V dengan fungsi pertanian tanaman pangan dan pengembangan pusat permukiman kota. Berpusat di Liabuku mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bungi.
- f. BWK VI dengan fungsi utama pertanian hortikultura, perkebunan dan kehutanan dengan pusat di Kaisabu meliputi seluruh Kecamatan Sorawolio

Sedangkan untuk pembenahan infrastruktur dasar, dapat dilihat dengan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung di daerah. Infrastruktur dasar yang dibangun dan dikembangkan dalam periode tahun 2003- 2008 antara lain : infrastruktur jalan dan angkutan darat; bandara dan angkutan udara; pelabuhan dan angkutan laut; pasar, Rumah Sakit Umum



Daerah (RSUD), pelabuhan, bandara, ruang publik, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Hal diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau di periode 2003-2008 telah menggunakan dua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya, baik strategi yang secara langsung maupun strategi yang secara tidak langsung dalam menjawab masalah kemiskinan. Secara tidak langsung dapat dilihat dengan kebijakan penataan ruang kota maupun perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau guna mendukung dinamika sosial ekonomi masyarakat. Sementara strategi penanggulangan kemiskinan secara langsung juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, yakni antara lain dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dapat dilihat dengan program-program yang secara langsung ditujukan bagi kelompok miskin itu sendiri, program itu antara lain: beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat miskin, bantuan modal usaha bagi usaha kecil dan pedagang kaki lima, program penyediaan lapangan kerja guna peningkatan penghasilan bagi masyarakat miskin, program pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan dan program-program lainnya yang langsung ditujukan bagi masyarakat miskin.

Bahkan dalam perspektif penganggaran, komitmen Pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan jelas dapat terlihat keberpihakannya. Khusus untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bau-Bau telah menganggarkan 28 persen dari APBD Kota Bau-Bau, melampaui yang di amanatkan oleh UUD 1945, meskipun kemudian perlunya pembagaaian yang proporsional antara belanja rutin dan belanja publik di masa yang akan datang.

Namun kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa masih adanya ketimpangan pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya, yakni antara pendekatan yang tidak langsung dan pendekatan yang secara langsung ditujukan pada

masalah kemiskinan. Pemerintah Kota Bau-Bau lebih cenderung memberi perhatian lebih pada strategi penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung, strategi penanggulangan kemiskinan secara langsungpun dilakukan, namun dengan porsi perhatian yang relatif lebih sedikit dibanding pendekatan secara tidak langsung.

Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam proses implementasi program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu wujud nyata kalau masih minimnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawal implementasi program di lapangan. Sikap yang tidak maksimal dalam mengawal dan mengontrol pelaksanaan program-program yang secara langsung ditujukan pada penanganan masyarakat miskin, merupakan indikator sederhana pula untuk melihat tingkat perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pendekatan yang secara langsung dalam menaggulangi kemiskinan.

Beberapa program dan kebijakan yang digulirkan sebagai penjabaran dari strategi langsung untuk menanggulangi kemiskinan masih menggunakan program dan kebijakan yang sifatnya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menggeneralisasi permasalahan kemiskinan dengan pendekatan yang sama, sehingga terkadang melahirkan jarak antara pendekatan yang digunakan dengan tradisi serta nilai-nilai di masyarakat. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan program tidak tercapai dengan baik.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dan kebijakan merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan program-program yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat miskin mengalami pergeseran dari konsep dasar yang direncanakan ketika diimplementasikan di lapangan, hal ini terjadi antara lain dikarenakan sumberdaya pelaksana program yang masih terbatas, baik karena keterbatasan pemahaman tentang eksistensi program maupun keterbatasan akan sikap dan mentalitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian dikenal dengan istilah kendala sosiologis yakni mentalitas SDM yang tidak mendukung untuk kesuksesan sebuah program yang digulirkan. Kendala sosiologis ini, antara lain disebabkan

oleh perilaku yang sudah membudaya dimasyarakat, misalnya saja sifat putus asa, malas, tidak produktif, serta sifat-sifat lain yang ada didalam masyarakat, sifat-sifat tersebut membuat program-program yang digulirkan kepada mereka menjadi tidak memberikan perubahan yang cukup berarti, karena mereka telah bersinergi dengan kondisi kemiskinan yang ada.

Konsekuensi dari ketimpangan pendekatan yang di lakukan dan permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi saat proses implementasi program/kebijakan secara langsung ditunjukkan pada masyarakat miskin, terlihat dari hasil yang dicapai dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bau-Bau. Beberapa permasalahan diatas, mengakibatkan angka kemiskinan dalam kurun waktu 2003-2008 tidak dapat ditanggulangi dengan baik, angka kemiskinan di Kota Bau-Bau mengalami fluktuatif atau naik-turun.

#### **4.4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penanggulangan Masyarakat Miskin di Kelurahan**

Menurut Pranowo (2006 :304-305) keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal, yakni :

- 1) Keterbatasan anggaran penanggulangan kemiskinan
- 2) SDM yang rendah

b. Faktor Eksternal, yakni :

- 1) Kebijakan Pemerintah
- 2) SDA terbatas.
- 3) Kondisi Sosial-Budaya

Secara umum, faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau dapat di klasifikasikan ke dalam dua kelompok diatas, yakni ; (i) faktor internal, dan (ii) faktor eksternal.

### Eksternal

Faktor pendukung eksternal penanggulangan masyarakat miskin di kelurahan yakni, adanya program-program penanggulangan yang disponsori oleh sumber lain selain Pemerintah Kota Bau-Bau, antara lain misalnya ; (i) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP); (ii) program NUSSP; (iii) program sanimas, dan program-program lainnya yang digulirkan oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Faktor penghambat dari lingkungan eksternal yakni akibat dari tingginya arus migrasi dari masyarakat disekitar Kota Bau-Bau, sehingga membutuhkan lahan-lahan pemukiman baru, yang terkadang melahirkan pemukiman-pemukiman kumuh baru di Kota Bau-Bau. Hambatan eksternal lainnya yakni sumberdaya alam yang terbatas, serta kondisi sosial budaya dilingkungan perkotaan seperti kesetiakawanan dan gotong royong yang mulai bergeser ke arah individualistis.

### Internal

Faktor pendukung program dari lingkungan internal yakni komitmen Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk penganggaran program penanggulangan masyarakat miskin di tingkat kelurahan. Sedangkan, faktor penghambat dari lingkungan internal adalah :

- (i) Sumber daya masyarakat kelurahan yang terbatas, untuk melakukan pembangunan partisipatif dengan mengedepankan program-program prioritas secara rasional;
- (ii) Rendahnya sumberdaya masyarakat miskin itu sendiri;
- (iii) Mentalitas masyarakat pengelola program di tingkat kelurahan yang belum menunjukkan sikap-sikap yang rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; dan
- (iv) Anggaran penanggulangan kemiskinan yang masih terbatas.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Pada bab ini, kesimpulan diajukan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu : (a) untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-2008. (b) untuk mengetahui dan menggambarkan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2003-2008. (c) untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pada program penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan.

Olehnya itu, beberapa kesimpulan yang diajukan adalah bahwa capaian-capaian yang diraih oleh Pemerintah Kota Bau-Bau disektor pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PDRB, maupun pada peningkatan nilai indeks pembangunan manusianya belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menangani masalah kemiskinan. Data BPS Kota Bau-Bau, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Kota Bau-Bau dalam kurun waktu 2003-2008 mengalami pasang-surut atau fluktuatif. Pada Tahun 2003 angka kemiskinan sebesar 19,08 persen (22.300 jiwa), sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 18,34 persen (22.100 jiwa), penurunan angka kemiskinan juga terjadi pada tahun 2005 menjadi 17,58 persen (21.300 jiwa). Namun, pada tahun 2006 angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali menjadi 18,14 persen (22.600 jiwa), meskipun kemudian dapat ditekan kembali pada tahun 2007 dan tahun 2008, yakni 18,14 persen (22.600 jiwa) di tahun 2007 dan 17,68 persen (22.200 jiwa di tahun 2008). Namun, survei pada tahun 2008 belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada akhir Mei 2008.

Pemerintah Kota Bau-Bau diperiode 2003-2008 telah menggunakan dua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya, baik strategi yang secara langsung maupun strategi yang secara tidak langsung dalam menjawab masalah kemiskinan. Secara tidak langsung dapat dilihat dengan kebijakan penataan ruang kota maupun perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau guna mendukung dinamika sosial ekonomi masyarakat. Sementara strategi penanggulangan kemiskinan secara langsung juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008, yakni antara lain dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Hal ini dapat dilihat dengan program-program yang secara langsung ditujukan bagi kelompok miskin itu sendiri, program itu antara lain: beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat miskin, bantuan modal usaha bagi usaha kecil dan pedagang kaki lima, program penyediaan lapangan kerja guna peningkatan penghasilan bagi masyarakat miskin, program pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan dan program-program lainnya yang langsung ditujukan bagi masyarakat miskin. Namun kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa masih adanya ketimpangan pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya, yakni antara pendekatan yang tidak langsung dan pendekatan yang secara langsung ditujukan pada masalah kemiskinan. Pemerintah Kota Bau-Bau lebih cenderung memberi perhatian lebih pada strategi penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung, strategi penanggulangan kemiskinan secara langsungpun dilakukan, namun dengan porsi perhatian yang relatif lebih sedikit dibanding pendekatan secara tidak langsung.

Secara umum, faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok diatas, yakni ; (i) faktor internal : Sumber daya masyarakat kelurahan yang terbatas untuk melakukan pembangunan partisipatif dengan mengedepankan program-program prioritas

secara rasional; rendahnya sumberdaya masyarakat miskin itu sendiri; mentalitas masyarakat pengelola program di tingkat kelurahan yang belum menunjukkan sikap-sikap yang rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; dan anggaran penanggulangan kemiskinan yang masih terbatas. (ii) faktor eksternal : faktor pendukung eksternal penanggulangan masyarakat miskin di kelurahan yakni, adanya program-program penanggulangan yang disponsori oleh sumber lain selain Pemerintah Kota Bau-Bau, antara lain misalnya ; (a) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP); (b) program NUSSP; (c) program animas, dan program-program lainnya yang digulirkan oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Sedangkan, faktor penghambat dari lingkungan eksternal yakni akibat dari tingginya arus urbanisasi dari masyarakat di wilayah disekitar Kota Bau-Bau, sehingga membutuhkan lahan-lahan permukiman baru, yang terkadang melahirkan pemukiman-pemukiman kumuh baru di Kota Bau-Bau. Hambatan eksternal lainnya yakni sumberdaya alam yang terbatas, serta kondisi sosial budaya dilingkungan perkotaan seperti kesetiakawanan dan gotong royong yang mulai bergeser ke arah individualistis.

## 5.2. Rekomendasi

Adapun beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

### Pemerintah :

- a) Pemerintah Kota Bau-Bau perlu lebih meningkatkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan didaerahnya. Khusus dalam hal pendekatan yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, sudah saatnya Pemerintah daerah mensejajarkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang secara langsung pada permasalahan kemiskinan dengan pendekatan yang secara tidak langsung yang selama ini mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah daerah. Mengawal dan

menjaga pelaksanaan kebijakan dan program yang secara khusus ditujukan bagi penanggulangan masyarakat miskin merupakan bentuk perhatian yang mesti dilakukan guna menjaga ketepatan sasaran program yang digulirkan.

- b) Dalam merumuskan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, idealnya menggunakan pendekatan yang lebih familiar dan menyentuh masyarakat miskin itu sendiri, pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai lokalitas merupakan cara efektif untuk memaksimalkan capaian program. Pada sisi lain, hal ini diharapkan akan meningkatkan rasa solidaritas sosial dikalangan masyarakat sendiri, yang pada beberapa dekade terakhir telah mulai luntur akibat kehidupan perkotaan.
- c) Program dan kebijakan yang digulirkan untuk menanggulangi kemiskinan, idealnya dievaluasi keberadaanya setiap tahunnya, untuk mengetahui ketepatan program dalam menanggulangi kemiskinan di daerah. Program-program yang tidak efektif perlu untuk dilakukan peninjauan kembali.
- d) Sosialisasi setiap program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dan pelaksana program di tingkat bawah memiliki wawasan yang paripurna tentang eksistensi setiap program yang digulirkan.
- e) Perlunya pelatihan-pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah, tentang keterampilan-keterampilan yang mumpuni untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- f) Selain pelatihan tentang skil dan penambahan wawasan untuk pelaksanaan program, para aparatur pemerintah dan pelaksana program di tingkat bawah, perlu pula dibekali dengan pelatihan tentang kecerdasan emosi dan spritualnya, karena salah satu kendala dalam pelaksanaan program selama ini, terletak pada mentalitas manusianya.

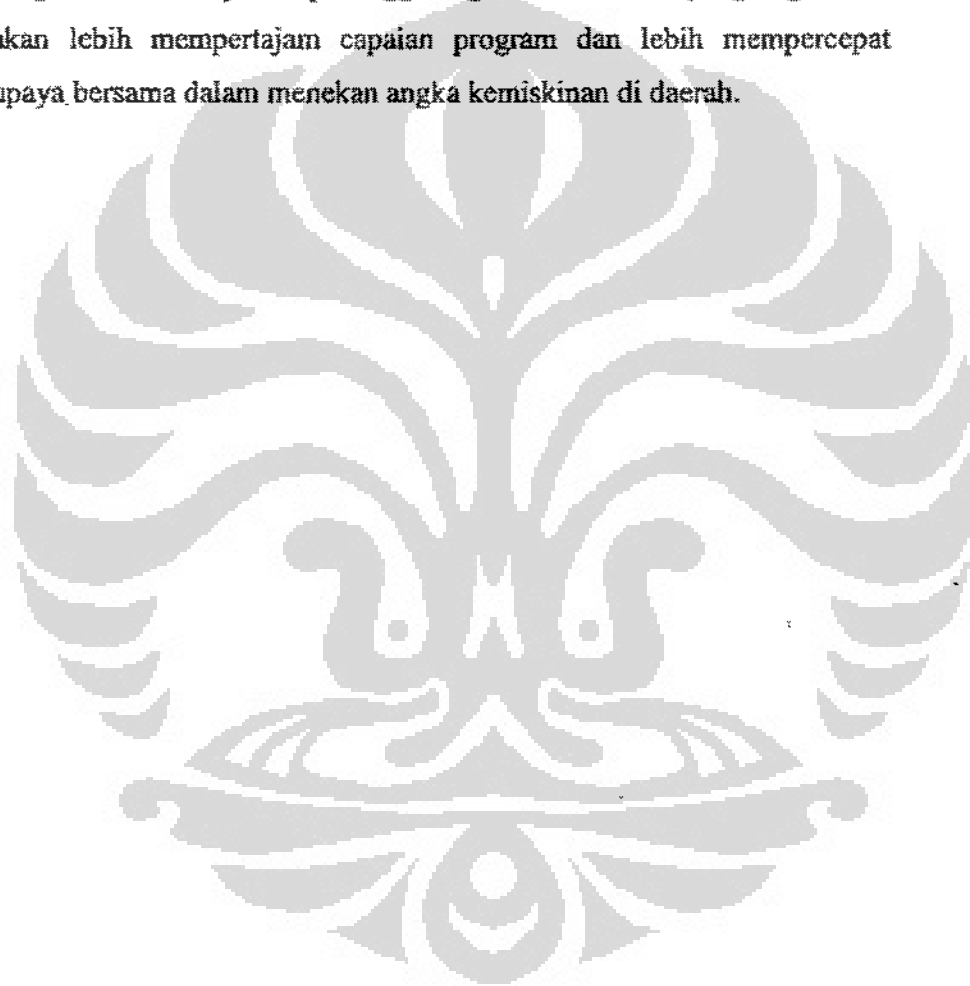


- g) Perwakilan masyarakat miskin, idealnya diikutkan dalam setiap pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan, baik pembahasan di tingkat Kota, Kecamatan, maupun pada tingkat desa/kelurahan.
- h) Perlunya menyelenggarakan forum-forum diskusi publik, sebagai media publik untuk menyampaikan aspirasi, termasuk ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program-program di lapangan. Pada sisi lainnya, media ini dapat membuat kehatia-hatian para pelaksana teknis program untuk menjalankan program sesuai dengan kaidah yang telah dirumuskan sebelumnya.

**Masyarakat :**

- a) Masyarakat miskin idealnya melakukan analisis internal terhadap kemiskinan mereka, mengapa mereka jadi miskin, dan potensi-potensi yang mereka miliki yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menanggulangi kemiskinannya. Analisis ini diperlukan, karena masyarakatlah yang lebih memahami kondisi internal mereka, karena penyebab kemiskinan yang dialami oleh individu yang satu dengan individu yang lain tidak selamanya memiliki kesamaan. Banyak kasus yang menunjukkan tentang berragamnya penyebab kemiskinan di masyarakat, meskipun dalam satu area pemukiman yang sama.
- b) Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih perwakilannya di tingkatan mana saja, karena kesalahan menentukan personal yang bertugas untuk mengurus kepentingan mereka, maka akan berakibat pada tidak maksimalnya persoalan masyarakat itu untuk dipikirkan.
- c) Semangat kebersamaan dan kekompakan harus dibangun diinternal masyarakat, karena dengan terbangunnya semangat tersebut maka persoalan-persoalan sosial yang ada didalam masyarakat akan dapat diselesaikan secara efektif.

- d) Anggota masyarakat yang dipercayakan untuk melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, idealnya harus mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan-kepentingan yang lain. Upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan tanggungjawab pemerintah semata, namun partisipasi masyarakat yang maksimal dalam program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan akan lebih mempertajam capaian program dan lebih mempercepat upaya bersama dalam menekan angka kemiskinan di daerah.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Seri Pemberdayaan Masyarakat 02*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Seri Pemberdayaan Masyarakat 03. Edisi Revisi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ala, Andre Bayo. (1996). *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Liberty
- Arikunto, Suharsimi, (2006) *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bank Dunia. (2007). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : INDOVOP-Bank Dunia.
- Berger, Peter L. (2005). *Piramida Kurban Manusia*. Jakarta : Pusat LP3ES Indonesia (Terjemahan).
- Chandler, Alfred. (1962). *Strategy dan Structure*. Cambridge, Ma : MIT Press
- Conyers, Diana. (1992) *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Penterjemah Susetiawan)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Creswell, John W. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Terjemahan). Jakarta : KIK Press
- Haq, Mahbub. (1995). *Tirai Kemiskinan : Tantangan untuk dunia ketiga* (Terjemahan). Jakarta : Yayasan Obor
- Hasiholan, Dheyne, dkk. (2007). *Politik dan Kemiskinan. Serial Politik*. Depok : Koekoesan.
- Hermawati, Istiana, dkk. (2005). *Studi Evaluasi Efektifitas KUBE dalam Pengentasan Keluarga Miskin di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Departemen Sosial RI.

- Irwanto, (2005). *Focused Group Discussion*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Jordan, Bill. (1996). *A theory of poverty and social exclusion*. Cambridge: Polity Press.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1993). *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Kebijakan dan Pembangunan Sosial*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Lipton, Michael. (1976). *Why poor people stay poor: urban bias in world development*. Massachussetts: Harvard University Press.
- Maarif, Syafii, dkk. (2007). *Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan. Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal*. Jakarta : Maarif Institut for Culture and Humanity.
- Maleong, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mcfate Katherine, Lawson Roger and Wilson Julius William. (1995). *Poverty, inequality and the future of social policy: western states and the new world order*. New York : Russell Sage Fondation.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective In Social Welfare*. London : SAGE Publications.
- Mingione, Enzo. (1996). *Urban poverty and the underclass: a reader*. Oxford UK : Urban Research Publications Ltd.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasikun, (1995), *Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press.
- Ostad, S.A. (1997). *Developmental progression of subtraction strategies: a comparison of mathematically normal and mathematically disabled children*. *European Journal of Special Needs Education*, 14(1), 21-36.

- Pramono, Agung. (2007). *Pengembangan Kelembagaan Lokal*. Jakarta : Management Studio dan Clinick.
- Rachbini, Didik (Peny) dan International NGO Forum on Indonesian Development. (1995). *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sanapiah, Faisal. (2005). *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Seers, Dudley. (1969). *The Meaning Of Development dari The Meaning Of Development* dalam International Development Review, Vol 11 no 4.
- Strahm, Rudolf. H (1999). *Kemiskinan Dunia Ketiga. Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial. Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, dkk. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Cetakan Pertama. Jakarta : IMPAC
- Suwarsono, dkk. (2006). *Perubahan Sosial dan Pembangunan: Teori-Teori Modernisasi, Dependensia, dan Sistem Dunia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Tan, Jo Hann, dkk. (2003). *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta : SEAPCP & ReaD.
- Todaro, Michael P. (1985). *Economic Development Report in The Third World*. New York : Oxford University Press.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta Indonesia : Media Pressindo.

#### Tesis

- Faisal, Fahma Sari. (2005). *Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Depok : Program Pascasarjana Ekonomi Regional dan Perkotaan.

Sumanta, Jaka. (2005). *Fenomena Lingkaran Kemiskinan Indonesia: Analisis Ekonomimetri Regional Data Panel Provinsi Tahun 1999-2002*. Depok : Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Triana, Lidya. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Analisis Data Susenas 2004*. Depok : Program Pascasarjana Kajian Kependudukan dan Sumberdaya Manusia Universitas Indonesia.

#### **Makalah Seminar, Jurnal dan Dokumen Lembaga**

Berita Resmi Statistik BPS. (2006). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Berita Resmi Statistik BPS. (2008). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Berita Resmi Statistik BPS Sultra (2008). *Profil Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari : BPS Sulawesi Tenggara.

Cahyono, S Agus Tri, (2004). *Strategi Dinas Sosial Kota Palangkaraya dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol III No 7. Dep. Sosial RI

Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional-BAPPENAS (2006). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. Jakarta : BAPPENAS

Pranowo (2006). *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jayapura, Papua*. Yogyakarta : Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Departemen Sosial RI.

Rangkuman Seminar Sehari. (1993) *Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pemerataan Hasil Pembangunan*. Jakarta : Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan.

Suharto, Edi. (2007). *Konsep Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial*. Bandung : STKS Press

Yhana (2007). *Laporan MDGs Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007*. Bau-Bau : JPKP

#### Publikasi elektronik

Chamsyah, Bachtiar. Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia: Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan. Diakses tanggal 23 Maret 2009  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=216&Itemid=](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=)

Kesejahteraan Sosial. Diakses tanggal 25 Maret 2009.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan_sosial)

Laporan Human Development Indeks (HDI) Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Diakses tanggal 25 Maret 2009  
[http://demografi.bps.go.id/versi1/index.php?option=com\\_label&task=show&Itemid=182](http://demografi.bps.go.id/versi1/index.php?option=com_label&task=show&Itemid=182)

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau. Diakses tanggal 28 Maret 2009.  
<http://www.baubau.go.id/index.php?pilih=hal&id=8>

Pendapatan Per Kapita Kota Bau-Bau. Diakses tanggal 28 Maret 2009.  
<http://www.baubau.go.id/index.php?pilih=hal&id=8>

Strategi Penghapusan Kemiskinan. Diakses tanggal 23 Maret 2009.  
[http://panimbang.blogspot.com/2007/07/strategi-penghapusan-kemiskinan-di.html -\\_ftn12](http://panimbang.blogspot.com/2007/07/strategi-penghapusan-kemiskinan-di.html-_ftn12)



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



Lampiran 1 :



### Daftar Istilah Penting

- 1) Constituent : bentuk kebijakan publik yang ditujukan untuk melindungi negara
- 2) Demokrasi-sosial : kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan akibat tersumbatnya kesempatan kelompok miskin. Orang menjadi miskin karena tidak bekerja.
- 3) Distributive : bentuk kebijakan publik dengan melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu
- 4) HDI : Indeks Pembangunan Manusia, dengan Indikator meliputi: (a) pendapatan perkapita; (b) akses terhadap pendidikan; dan (c) akses terhadap kesehatan.
- 5) Pembangunan Sosial : suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dikaitkan dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.
- 6) Kausalitas Melingkar : tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah, Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik per kapita yang rendah, permintaan domestik per kapita yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya.

- 7) Kebijakan Publik : arah dan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
- 8) Kebijakan Sosial : salah satu bentuk dari kebijakan publik. kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- 9) Kemiskinan : suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.
- 10) Kemiskinan Absolut : seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan.
- 11) Kemiskinan Alamiah : kemiskinan yang disebabkan lebih dikarenakan oleh masalah alam, misalnya kondisi geografis suatu daerah yang tidak mendukung untuk berkembang, atau dapat pula karena faktor-faktor alam lainnya seperti bencana alam
- 12) Kemiskinan Individu : kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.
- 13) Kemiskinan Kultural : kemiskinan yang di sebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya

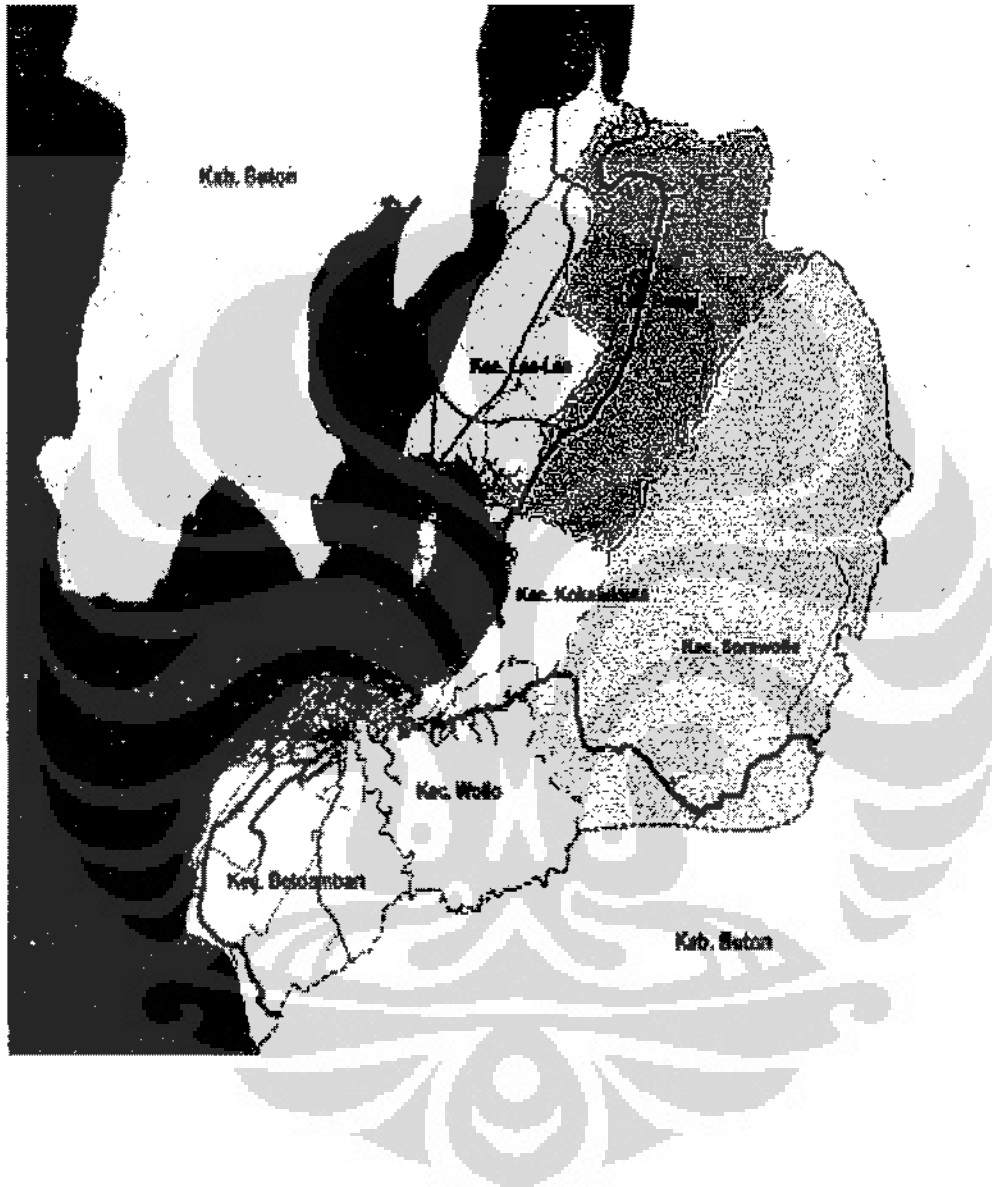
- sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya
- 14) Kemiskinan Relatif : kemiskinan yang subyektif, ditentukan oleh dirinya sendiri karena membandingkan dirinya dengan masyarakat sekelilingnya.
- 15) Kemiskinan Struktural : kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.
- 16) Mission (misi) : mengartikulasikan tentang yang sebenarnya dan apa yang akan dicapai, yang timbul bukan sebagai suatu konsep melainkan sebagai suatu pernyataan.
- 17) Model Kebutuhan Dasar : kesejahteraan dan bantuan bagi orang miskin, yang mencakup tidak hanya kesempatan memperoleh penghasilan tetapi juga akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan sebagainya.
- 18) Neo-liberal : kemiskinan sebagai ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak mampu membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang dianggap bodoh, malas, dan tidak punya mentalitas berprestasi. Karena itu, program pengentasan kemiskinan lebih berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan kemampuan perorangan.
- 19) Objective (tujuan) : target yang “merentangkan” dan harus dicapai oleh organisasi
- 20) Redistributive : Bentuk kebijakan publik dengan mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan yang kaya lalu memberikanya kepada yang miskin;

- 21) Regulatory : Bentuk kebijakan publik guna mengatur perilaku orang;
- 22) Strategi : penetapan sasaran, tujuan dan arah tindakan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- 23) Strategi Langsung : penanggulangan kemiskinan dengan memerangi kemiskinan dengan cara langsung terhadap kemiskinan, dimana salah satunya adalah pendekatan kebutuhan dasar.
- 24) Strategi Tdk Langsung : penanggulangan kemiskinan yang menggunakan cara tidak langsung berdasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk memperbesar "kue ekonomi nasional". Bila barang dan jasa tersedia sistem lebih dari cukup maka melalui proses *trickle down effect* dapat terbagi pada seluruh anggota masyarakat termasuk kaum miskin.
- 25) Tactics (taktik) : Tindakan, prosedur, serta manuver untuk menang di dalam persaingan.

Lampiran 2 :



## Peta Wilayah Kota Bau – Bau



Lampiran 3 :



**MATRIKS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KOTA BAU-BAU  
PADA PERIODE 2003-2008**



**PANEL UJIAN KEMAMPUAN KERJA DAN ANGGARAN BIAYA  
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KOTA BAUBAU (2006 - 2008)**

No.	Kecamatan Kerubuan	Data Dasar			Kegiatan	KEGIATAN DAN BIAYA		
		Lokasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	NK		Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.1.	Suka	107	1.014	818	417			13.577.700.000,00
								8.089.600.000,00
								22.500.000,00
						3 Unk	7.200.000,00	215.800.000,00
						2400 Meter	80.000,00	190.000.000,00
						2 Unk	50.000.000,00	5.250.000,00
						15 Unk	350.000,00	30.000.000,00
						2 Unk	80.000.000,00	1.750.000,00
						35 Buah	50.000,00	3.000.000,00
						500 Unk	150.000,00	50.000.000,00
						500 Meter	100.000,00	75.000.000,00
						500 Meter	150.000,00	261.000.000,00
						3000 Meter	60.000,00	30.000.000,00
						300 M2	1.000.000,00	1.500.000.000,00
						2000 Meter	300.000,00	50.000.000,00
						2 Set	25.000.000,00	15.000.000,00
						3 Paket	5.000.000,00	30.400.000,00
						20 M2	1.200.000,00	1.040.000.000,00
						2000 Meter	1.800.000,00	31.200.000,00
						24 M2	1.500.000,00	30.400.000,00
						28 M2	1.300.000,00	6.000.000,00
						50 Unk	100.000,00	300.000.000,00
						2000 Meter	150.000,00	300.000.000,00
						3000 Meter	100.000,00	72.800.000,00
						56 M <sup>2</sup>	1.300.000,00	36.000.000,00
						68 M <sup>2</sup>	1.000.000,00	30.000.000,00
						30 M <sup>2</sup>	1.300.000,00	58.500.000,00
						45 M <sup>2</sup>	1.300.000,00	124.900.000,00
						90 M <sup>2</sup>	1.300.000,00	8.089.600.000,00
						1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
						1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
						1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
						1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00

No.	Kecamatan Kelurahan	Data Dasar			KEGIATAN DAN BIAYA			Total Biaya (Rp)	
		Lokasi (Ha)	Jawa Wilayah (1/1a)	NK	Kepadatan Penduduk	Vol.	Satuan		Biaya Satuan (Rp)
11.2	Wahamba	1.228	1.015	383	1,11	: KEGIATAN			2.731.750.000,00
						1. KEGIATAN PISA			
						Peningkatan Bidang Lamin			37.500.000,00
						Peningkatan Dmasas			387.000.000,00
						Peningkatan Tempal SICK			190.000.000,00
						Peningkatan Gerobak Sampah			2.000.000,00
						Peningkatan Kontainer Sampah			40.000.000,00
						Peningkatan Lampu Jalan TL 40 Watt			37.500.000,00
						Peningkatan Duker			150.000.000,00
						Peningkatan Jalan Lingkungan			165.000.000,00
						Peningkatan Pipanisasi			120.000.000,00
						Peningkatan / Pengerasan pembukuan jalan baru			450.000.000,00
						Pembuatan Jalan Setapak			30.000.000,00
						Pembinaan Jalan Usaha Tani			200.000.000,00
						Peningkatan Jamblan Kahuara			40.000.000,00
						Peningkatan Puma/BAKESRA			135.000.000,00
						Peningkatan Lampu Markuri			20.000.000,00
						Peningkatan Bibit Bawang Merah			10.000.000,00
						Peningkatan Hard Sprayer			25.000.000,00
						Peningkatan Alat Pemadangan Kayu			10.000.000,00
						Rehab Gedung Poyandu			39.000.000,00
						Perbaikan Rumah Kumuh			100.000.000,00
						Peningkatan Pos Kesehatan			15.000.000,00
						Peningkatan Masjid/Pakuburan			30.000.000,00
						Peningkatan Fasilitas Jalan Laktapi			50.000.000,00
						Peningkatan Fasilitas Mobiler LPM			10.000.000,00
						Peningkatan Meja Pemotong Rumpuk			7.500.000,00
						Sub Jumlah			2.634.750.000,00
						2. KEGIATAN ANA PISA			
						Pelatihan Pelembutan			5.000.000,00
						Pelatihan Pelembutan			5.000.000,00
						Pelatihan Pembinaan Alon Daging Jambak Mente			20.000.000,00
						Pelatihan Pembinaan Tukang Saji			10.000.000,00
						Pelatihan Pembinaan Kebab Pisan			20.000.000,00
						Pelatihan Mtb			5.000.000,00
						Peningkatan Alat Qaidah			5.000.000,00
						Revitalisasi Karang Taruna			5.000.000,00
						Sertifikasi Jambak Perici			25.000.000,00
						Sub Jumlah			115.000.000,00

No.	Kecamatan Kelurahan	Data Yuzur			Kegiatan	Vol.	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Lokasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	NK					
1.3.	Ujuda	130	3076	1015	KEGIATAN			1.172.000.000,00	
					1. KEGIATAN ELSIS				
					Pengadaan 3 Hutan Unpuh	6	Unit	7.500.000,00	45.000.000,00
					Pembinaan Drainase	1000	Meter	80.000,00	80.000.000,00
					Pembangunan Tembak NCK	5	Unit	50.000.000,00	250.000.000,00
					Pengadaan Gerobak Samudra	10	Unit	350.000,00	3.500.000,00
					Pengadaan Kromaher Sampah	2	Unit	30.000.000,00	60.000.000,00
					Pengadaan Lampu Jalan TL 40 Watt	100	Buah	150.000,00	15.000.000,00
					Pengadaan Tong Sampah	100	Buah	50.000,00	5.000.000,00
					Pencapaian Jalan Lingkungan	500	Meter	150.000,00	75.000.000,00
					Pembangunan Rumah Adat	2000	M <sup>2</sup>	1.000.000,00	2.000.000.000,00
					Pengaspalan Jalan Lingkungan	500	Meter	150.000,00	75.000.000,00
					Pengadaan Jamban Keluarga	300	Unit	100.000,00	30.000.000,00
					Pengadaan Gedung TK	50	M <sup>2</sup>	1.500.000,00	75.000.000,00
					Pengadaan alat pertamanan listrik (Electric)	6	Unit	5.000.000,00	30.000.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA	3	Link	5.000.000,00	15.000.000,00
					Pengadaan mesin katup dan alat lengkap	3	Set	15.000.000,00	45.000.000,00
					Pembuatan jalan setapak	1000	M <sup>2</sup>	150.000,00	150.000.000,00
					Pembuatan Jalan Baru	1000	M <sup>2</sup>	100.000,00	100.000.000,00
					Sub jumlah				1.133.500.000,00
					2. KEGIATAN VOLUNTASIS				
					Pelatihan Bakti Daya Binsipul Lasi	1	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00
					Penguluhan Hukum Dan Kamtibmas	1	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00
					Penyuluhan Partokoperasi dan UKM	1	Paket	3.000.000,00	3.000.000,00
					Pembinaan Remaja Masjid	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
					Pelatihan Perbengkelan	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
					Pemberdayaan PKK dan Majelis Taklim	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
					Sub jumlah				42.000.000,00

No.	Kecamatan Kelurahan	Data Dasar			Kegiatan	KEGIATAN DAN BIAYA		Total Biaya (Rp)
		Lokasi (11a)	Luas Wilayah (11a)	KK		Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	
1.4.	Karohengke	142	5.861	1.281	41,69			1.578.450.000,00
					<b>1. KEGIATAN YONFISIA</b>			
					Pengadaan Jilidan Umum	6 Unit	7.500.000,00	45.000.000,00
					Pembuatan Drainase	7,50 Meter	86.000,00	645.000.000,00
					Pemeliharaan Tempal MCK	7 Unit	12.000.000,00	84.000.000,00
					Pengadaan Gerobak Sampah	12 Unit	350.000,00	4.200.000,00
					Pengadaan Kontainer Sampah	3 Unit	20.000.000,00	60.000.000,00
					Pengadaan Tong Sampah dari kayu	125 Buah	50.000,00	6.250.000,00
					Pengadaan Lampu Jalan TL 40 Watt	100 Unit	150.000,00	15.000.000,00
					Pembuatan Jalan Sepapak	500 Meter	100.000,00	50.000.000,00
					Pengaspalan Jalan Lingkungan	2000 Meter	150.000,00	153.000.000,00
					Pengadaan Sumur Resapan	4 Unit	10.000.000,00	40.000.000,00
					Perbaikan Rumah Kumuh	20 Unit	5.000.000,00	100.000.000,00
					Pembangunan Fasilitas TK Perumahan Kev. Belesambani	1 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00
					Pembuatan Banca	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
					Penyelesaian Teras Masjid	100 M <sup>2</sup>	800.000,00	80.000.000,00
					Pengadaan Jaring Ikan dan Motor Keleling	10 Paket	15.000.000,00	150.000.000,00
					Pengadaan Bibit Bunga dan Mangga	100 Orang	100.000,00	10.000.000,00
					Rehabilitasi TK Limba Wolio	100 M <sup>2</sup>	1.000.000,00	100.000.000,00
					Pengadaan Fasilitas LPM dan Karang Taruna	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
					Pembuatan Capura/Batas Kelurahan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
					<b>Sub Jumlah</b>			<b>1.503.050.000,00</b>
					<b>2. KEGIATAN YONFISIA</b>			
					Pelatihan Kejurangan Anak Puncak Sebelah Sertifikat Tanah	90 Orang	300.000,00	27.000.000,00
					Pelatihan Liransa dan Kadarakuai	100 KK	250000	25.000.000,00
					Bantuan Bibit Rumpuk Laut	90 Orang	50.000,00	4.500.000,00
					Penyediaan Insentif Kader Popyantu	1 Paket	10000000	10.000.000,00
					<b>Sub Jumlah</b>	10 orang	800.000,00	8.000.000,00
					<b>Sub Jumlah</b>			<b>74.500.000,00</b>

No.	Kecamatan Kehurahan Kotabukana	Daerah		Kecamatan Pendidikan	KEGIATAN DAN BIAYA		
		Kota	Wilayah		Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Wanayasa	10	127	1000	1. KEGIATAN		
					1.1. KEGIATAN NON-DESIK		
					1.1.1. Kegiatan Budidaya Ikan (KJA)		
					1.1.1.1. Pelatihan Kejuruan bagi Remaja Pesisir Sekolah		
					1.1.1.2. Pelatihan Pengolahan Limbah Organik Hidayah		
					1.1.1.3. Penediakan Insentif Nelayan Pesisir		
					Sub Jumlah		
					1.2. KEGIATAN DESIK		
					1.2.1. Kegiatan Hidro Umum		
					1.2.1.1. Pembangunan Tangkai WICK		
1.2.1.2. Pembangunan Tabak							
1.2.1.3. Kegiatan Lempu Jaban, TL-40 War							
1.2.1.4. Pembangunan TPS							
1.2.1.5. Kegiatan Pina Air Bersih							
1.2.1.6. Pembangunan Muzone							
1.2.1.7. Pengolahan Ikan Lanyungan							
Sub Jumlah							
1.3. KEGIATAN NON-FISIK							
1.3.1. Kegiatan Budidaya Kerpang Bikan							
1.3.1.2. Pelatihan Membaca Tamar Asin							
1.3.1.3. Penyaluran Insentif Nelayan Pesisir							
Sub Jumlah							
1.4. Kegiatan							
1.4.1. Kegiatan							
1.4.1.1. Kegiatan							
1.4.1.2. Kegiatan							
1.4.1.3. Kegiatan							
1.4.1.4. Kegiatan							
1.4.1.5. Kegiatan							
1.4.1.6. Kegiatan							
1.4.1.7. Kegiatan							
1.4.1.8. Kegiatan							
1.4.1.9. Kegiatan							
1.4.1.10. Kegiatan							
1.4.1.11. Kegiatan							
1.4.1.12. Kegiatan							
1.4.1.13. Kegiatan							
1.4.1.14. Kegiatan							
1.4.1.15. Kegiatan							
1.4.1.16. Kegiatan							
1.4.1.17. Kegiatan							
1.4.1.18. Kegiatan							
1.4.1.19. Kegiatan							
1.4.1.20. Kegiatan							
1.4.1.21. Kegiatan							
1.4.1.22. Kegiatan							
1.4.1.23. Kegiatan							
1.4.1.24. Kegiatan							
1.4.1.25. Kegiatan							
1.4.1.26. Kegiatan							
1.4.1.27. Kegiatan							
1.4.1.28. Kegiatan							
1.4.1.29. Kegiatan							
1.4.1.30. Kegiatan							
1.4.1.31. Kegiatan							
1.4.1.32. Kegiatan							
1.4.1.33. Kegiatan							
1.4.1.34. Kegiatan							
1.4.1.35. Kegiatan							
1.4.1.36. Kegiatan							
1.4.1.37. Kegiatan							
1.4.1.38. Kegiatan							
1.4.1.39. Kegiatan							
1.4.1.40. Kegiatan							
1.4.1.41. Kegiatan							
1.4.1.42. Kegiatan							
1.4.1.43. Kegiatan							
1.4.1.44. Kegiatan							
1.4.1.45. Kegiatan							
1.4.1.46. Kegiatan							
1.4.1.47. Kegiatan							
1.4.1.48. Kegiatan							
1.4.1.49. Kegiatan							
1.4.1.50. Kegiatan							
1.4.1.51. Kegiatan							
1.4.1.52. Kegiatan							
1.4.1.53. Kegiatan							
1.4.1.54. Kegiatan							
1.4.1.55. Kegiatan							
1.4.1.56. Kegiatan							
1.4.1.57. Kegiatan							
1.4.1.58. Kegiatan							
1.4.1.59. Kegiatan							
1.4.1.60. Kegiatan							
1.4.1.61. Kegiatan							
1.4.1.62. Kegiatan							
1.4.1.63. Kegiatan							
1.4.1.64. Kegiatan							
1.4.1.65. Kegiatan							
1.4.1.66. Kegiatan							
1.4.1.67. Kegiatan							
1.4.1.68. Kegiatan							
1.4.1.69. Kegiatan							
1.4.1.70. Kegiatan							
1.4.1.71. Kegiatan							
1.4.1.72. Kegiatan							
1.4.1.73. Kegiatan							
1.4.1.74. Kegiatan							
1.4.1.75. Kegiatan							
1.4.1.76. Kegiatan							
1.4.1.77. Kegiatan							
1.4.1.78. Kegiatan							
1.4.1.79. Kegiatan							
1.4.1.80. Kegiatan							
1.4.1.81. Kegiatan							
1.4.1.82. Kegiatan							
1.4.1.83. Kegiatan							
1.4.1.84. Kegiatan							
1.4.1.85. Kegiatan							
1.4.1.86. Kegiatan							
1.4.1.87. Kegiatan							
1.4.1.88. Kegiatan							
1.4.1.89. Kegiatan							
1.4.1.90. Kegiatan							
1.4.1.91. Kegiatan							
1.4.1.92. Kegiatan							
1.4.1.93. Kegiatan							
1.4.1.94. Kegiatan							
1.4.1.95. Kegiatan							
1.4.1.96. Kegiatan							
1.4.1.97. Kegiatan							
1.4.1.98. Kegiatan							
1.4.1.99. Kegiatan							
1.4.1.100. Kegiatan							

No.	Kerangka Kerja	Daerah			Kecamatan	KK	Sejumlah Pengada	Kegiatan	Val. Satuan (Rp)	Batas Gaman (Rp)	Tahun Berakhir							
		Lokasi (Ha)	Lokasi Wilayah (Ha)	Luas (Ha)														
2.3	Hutan	-	-	-	-	-	1. ALGATAVA, ELISIA				2008-2010							
							Pembangunan Gedung Sekolah Ganda	500 M <sup>2</sup>	800.000,00	2.000.000,00								
							Pembangunan Drainase	1000 Meter	86.000,00	86.000,00								
							Pembangunan Tembok MCK	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00								
							Pengalangan Gerobak Sampah	5 Unit	350.000,00	1.750.000,00								
							Pembangunan Gedung Pasyandu	1 Paket	36.000.000,00	36.000.000,00								
							Pembelian Rumah Klumpuk	2-3 Buah	2.000.000,00	4.000.000,00								
							Pembangunan TPS	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00								
							Pembangunan Tahap	300 Meter	1.800.000,00	1.800.000,00								
							Pengalangan Jalan Keluar	100 Buah	180.000,00	1.800.000,00								
							Pembangunan Jalan Setapak	500 Meter	100.000,00	500.000,00								
							Pembangunan Dukler	1 Buah	15.000.000,00	15.000.000,00								
							Pengalangan Jalan Lingkungan	4000 Meter	150.000,00	600.000,00								
2.4	Masyarakat	-	-	-	-	-	2. ALGATAVA, ELISIA				2008-2010							
							Pelatihan Keterampilan bagi Remaja Pesisir Sekolah	50 Orang	300.000,00	1.500.000,00								
							Pelatihan Budidaya Tumbuhan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00								
							Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00								
							Penyediaan Insentif Nuder Poyandu	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00								
							Sub Jumlah								30.880.000,00	157.300.000,00	1.573.000.000,00	
							2.4	Masyarakat	-	-	-	-	-	3. ALGATAVA, ELISIA				2008-2010
														Pembangunan TPS	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	
														Pembangunan Drainase	1000 Meter	86.000,00	86.000,00	
														Pembangunan Tembok MCK	2 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	
														Pengalangan Gerobak Sampah	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	
														Pembangunan Jalan Setapak	500 Meter	100.000,00	500.000,00	
														Pengalangan Bagan dan Redi	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
Pembangunan Jambatan Pengalangan Ke Lawu-Lawu	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00															
Pembangunan Pos Polisi	50 M <sup>2</sup>	1.500.000,00	1.500.000,00															
Pembangunan Bak Air Wudhu Masjid	25 M <sup>2</sup>	1.000.000,00	25.000.000,00															
Pembangunan Mobilisasi Sekolah	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00															
Sub Jumlah														1.849.000.000,00	1.849.000.000,00	1.849.000.000,00		
														4. KEGIATAN NON FISIK				2008-2010
							Pelatihan Pembinaan Aliran Baru	1 Paket	5.000.000	5.000.000								
							Pelatihan Budidaya Tumbuhan	1 Paket	10.000.000	10.000.000								
Sub Jumlah								20.000.000	20.000.000	20.000.000								
								36.880.000,00	1.869.000.000,00	1.869.000.000,00								

No	Kecamatan Seturahan	Lokasi (Ha)	Jalur Waduk (Ha)	KK Penduduk	KEGIATAN	KEGIATAN DAN BIAYA		Total Biaya (Rp)		
						Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)			
1		80	92	1167	6	<b>1. KEGIATAN FISIK</b>				
							2 Unit	30.000.000,00		
							300 Meter	86.000,00		
							3 Unit	50.000.000,00		
							6 Buah	350.000,00		
							1 Unit	90.000.000,00		
							400 Meter	1.800.000,00		
							3 Buah	15.000.000,00		
							400 Meter	100.000,00		
							140 Unit	2.000.000,00		
							Sub jumlah			
							<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>			
								90 Orang	900.000	
								100 Orang	250.000	
		10 Set	15.000.000							
		100 Orang	100.000							
		4 KSM	30.000.000							
		Sub jumlah								
					686.500.000,00					
					97.000.000					
					25.000.000					
					150.000.000					
					10.000.000					
					120.000.000					
					312.000.000					

No.		Kecamatan / Kelurahan	Data Dasar		KECIATAN	Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
			Luas Wilayah (Ha)	KK	Kepadatan Penduduk			
11		BUNGI Nampomabo	1.399,04	288	0,61			107.826.725,000
						27,50 Meter	75,000	6.187.350,000
						1500 Meter	150,000	246.250,000
						1 Unit	55.000.000	245.000,000
						150 Unit	21.600.000	55.000,000
						6 Unit	7.500.000	45.000,000
						5 Unit	350,000	1.750,000
						2 Basah	2.500,000	5.000,000
						1 Unit	30.000,000	30.000,000
						50 Unit	2.000,000	100.000,000
						4000 Meter	86,000	344.000,000
						4000 Meter	100,000	500.000,000
						1 Paket	10.000,000	10.000,000
						6 Paket	100.000,000	600.000,000
						2 Paket	5.000,000	10.000,000
						3 RKB	100.000,000	300.000,000
						1 RKB	500,000	500,000
						2 Paket	100.000,000	200.000,000
						200 Unit	10.000,000	2.000.000,000
						6000 Meter	30,000	180.000,000
						2 Paket	100.000,000	200.000,000
						2000 Meter	12.000,000	24.000,000
						2 Paket	20.000,000	40.000,000
						1 Paket	10.000,000	10.000,000
						1 Paket	50.000,000	50.000,000
						2 Paket	10.000,000	20.000,000
						3000 Meter	30,000	90.000,000
						1000 Meter	100,000	100.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000
						2000 Meter	20,000	40.000,000



No.	Kecamatan / Kelurahan / Desa	Desa / Dusun	Kecamatan	Kegiatan Dan Biaya		Vol / Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
				Kegiatan	Biaya			
	Kampungbaru / Lajubawati		Kecamatan	Kegiatan	• Pengadaan 5000 Lembar	500.000	500.000	5.000.000
					• Pengadaan 1000 Lembar	5.000.000	5.000.000	100.000.000
					• Pengadaan 200 Lembar	200.000	200.000	20.000.000
					• Pengadaan 300 Lembar	3.000.000	3.000.000	15.000.000
					• Pengadaan 400 Lembar	4.000.000	4.000.000	40.000.000
					• Pengadaan 500 Lembar	5.000.000	5.000.000	50.000.000
					• Pengadaan 600 Lembar	6.000.000	6.000.000	60.000.000
					• Pengadaan 700 Lembar	7.000.000	7.000.000	70.000.000
					• Pengadaan 800 Lembar	8.000.000	8.000.000	80.000.000
					• Pengadaan 900 Lembar	9.000.000	9.000.000	90.000.000
				Sub Jumlah			6.231.000.000	
				2. KEGIATAN NON FISIK				
				• Survei Monev	50 Orang	5.000	500.000	1.500.000
				• Kurun Mengabb	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				• Pelatihan Makanan Gizi Berimbang / Kader Pangan	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				• Pelatihan Pemantauan Gula Merah	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				• Pelatihan Bina Lambah Mele	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				• Pelatihan Keterampilan Janyama Kerajinan	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				• Pelatihan Pemantauan Hutan Swakarsa	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				• Pembinaan Binasid Bagi Himpun Pengurus PKK	1 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				• Pembinaan Sosial Pijaman Kpd Anggota Desa Wisata	1 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000
				• Sudi Bareding Para Ketua LDM	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Sub Jumlah			136.200.000	



No	Kecamatan	Kelas Wilayah (Ha)	Data Dasar		Kegiatan	Vol. Kegiatan	Bios x Satuan /Rpa	Total Biaya (Rp)
			Desa	KK				
					Keperluan Penduduk			
					• Pekerjaan Membangun	1 Paket	10.000.000	10.000.000
					• Bantuan Musel	1 Paket	2.500.000	2.500.000
					• Pemukiman TIK	4 Unit	5.000.000	20.000.000
					• Pemberian Insentif Kader Posyandu	20 Orang	600.000	12.000.000
					• Pemberian Insentif Kader PKK	20 Orang	600.000	12.000.000
					• Pemberian Insentif Kaki Dan Perulangan	1 Paket	2.000.000	2.000.000
					• Pemberian Grafik Lintuk Karang Taruna	1 Paket	10.000.000	10.000.000
					• Pemberian Kader Posyandu dan Pelatihan BNS	1 Paket	5.000.000	5.000.000
					• Pemberian Kepemimpinan ORP dan Kader	1 Paket	10.000.000	10.000.000
					• Pemberian Pengalihan Jambu Mentis	1 Paket	5.000.000	5.000.000
					• Pemberian Kader Keperasi	1 Paket	5.000.000	5.000.000
					Sub Jumlah			86.500.000

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi		Kepadatan Penduduk	KEGIATAN		Vol. Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Desa / Dukuh	Desa / Dukuh		KEGIATAN	KEGIATAN			
3.3.	Kalene	Desa Wilyah	Desa Wilyah	251					
<b>1. KEGIATAN FISIK</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengerukan Pipa PVC Dia 101 mm</li> <li>- Pengerukan Pipa PVC Dia 50 mm</li> <li>- Pengerukan Waduk Meter</li> <li>- Pengukuran Hidrolika Liman</li> <li>- Pengukuran Geoteknik Sampah</li> <li>- Pengukuran TDS</li> <li>- Pengukuran Kontaminat Sampah</li> <li>- Pengerukan Lumpur Jaloh TL 40 Waduk</li> <li>- Pembangunan Demarase</li> <li>- Penghapusan Jalan Embung</li> <li>- Pembangunan Jalan Setapak</li> <li>- Pembangunan Teras</li> <li>- Plat Druker</li> <li>- Pembangunan Temper MCK</li> <li>- Perawatan Perkebunan Jambu</li> <li>- Penghapusan Mubuh MIS di Jambak dan Nelus</li> <li>- Penghapusan Perumahan Kebun Misionis</li> <li>- Penghapusan Fasilitas Pagarudu</li> <li>- Pembangunan Jalan Batu</li> <li>- Rehabilitasi Kandang Kerdaban</li> <li>- Penghapusan Meremur dan Berek</li> <li>- Penghapusan Moya Kebarung</li> </ul>									
<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghapusan dan Negeri Lela Jambak</li> <li>- Sanitasi Tanah Pertanian</li> <li>- Pembangunan Abu Zaidar</li> <li>- Pembuatan dan Penghapusan Bangunan MCK</li> <li>- Pembuatan Penghapusan MCK</li> </ul>									
<b>Sub Jumlah</b>									
<b>Sub Jumlah</b>									

No.	Keramaian / Kelurahan	Dan Dapur Nama Widyais (FHA)	KK	Kepadatan Penduduk	KEGIATAN DAN BIAYA			Total Biaya (Rp)
					Kegiatan	Unit, Satuan	Biaya Satuan (Rp)	
3.5.	Lontar-Loni	4028	423	2.33			10.230.800.000	
					<b>I. KEGIATAN FISIK</b>			
					- Pengadaan Pipa PVC dia 100 mm	25000 Meter	25.000	1.015.000.000
					- Pengadaan Pipa PVC dia 75 mm	1200 Meter	45.000	54.000.000
					- Pengadaan Pipa PE dia 100 mm	1200 Meter	75.000	90.000.000
					- Pengadaan Wajan Meter	30 Meter	150.000	4.500.000
					- Pengadaan Hidran Gering	2 Unit	7.500.000	15.000.000
					- Pengadaan Gerekas Sampah	30 Unit	300.000	9.000.000
					- Pengadaan TPS	30 Unit	2.500.000	75.000.000
					- Pengadaan Nomor Sampah	20 Unit	90.000.000	1.800.000.000
					- Pengadaan Lampu Jalan TL-40 Watt	50 Buah	150.000	7.500.000
					- Pembangunan Drainase	2500 Meter	86.000	215.000.000
					- Pembangunan Ducket	5 Buah	25.000.000	125.000.000
					- Pembangunan Tahan	2500 Meter	1.500.000	3.750.000.000
					- Pembangunan Kamar Kebersihan	2500 Meter	150.000	375.000.000
					- Pembangunan Jalan Lingkungan	2500 Meter	150.000	375.000.000
					- Pembangunan Jalan Seapak	2500 Meter	100.000	250.000.000
					- Pembangunan Tempat MCK	2 Unit	12.000.000	24.000.000
					- Rehabilitasi Kamar Kebersihan	2500 Meter	1.500.000	3.750.000.000
					- Instalasi Bera Kumah Kapuk, Dosa Lantai	1 Unit	1.500.000.000	1.500.000.000
					- Refresh Pematang Jilidan Lantai	12 Meter	1.500.000.000	18.000.000
					- Pembangunan Mushallah	1 Unit	1.500.000.000	1.500.000.000
					- Pembangunan Ruang LK	1 Unit	20.000.000	20.000.000
					- Pengadaan Mobil Listrik 2 SDN 2 Lontar-Loni	1 Unit	50.000.000	50.000.000
					- Pengadaan Pakaya Listrik 1 SDN 3 Lontar-Loni	3 Unit	30.000.000	90.000.000
					- Penyelenggaraan Gedung TK	20 Unit	50.000.000	1.000.000.000
					- Pembangunan Ruang SDN 2 Bantolan	2 Unit	20.000.000	40.000.000
					- Pembangunan Ruang SDN 3 Bantolan	2 Unit	1.200.000.000	2.400.000.000
					- Pembangunan Politikus	2 Unit	20.000.000	40.000.000
					- Pembangunan Belatungul	2 Unit	150.000	300.000
					- Pembangunan Sabuk Irigasi	1 Unit	150.000	150.000
					- Penyelenggaraan Listrik Tahun	1 Unit	100.000	100.000
					- Pembangunan Gang Trokolan	2 Unit	200.000	400.000
					- Perencanaan Sabuk Banjir	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Instalasi MIPA Untuk Monev di K.M.	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Penyelenggaraan Umum Desa	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Penyelenggaraan PKU	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Pembangunan Alat Perawatan	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Rehabilitasi Perumahan Bantolan	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Pembangunan Air Bersih	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Pengadaan Himpun Yover	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Pengadaan Himpun Himpun Jalan dan Perumahan	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Pembangunan dan Perumahan Bantolan	1 Unit	1.000.000	1.000.000
					- Pembangunan Listrik	1 Unit	1.000.000	1.000.000

Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009



No.	Kecamatan	Desa	Lokasi (Hak)	Lama Wilayah (Ha)	Dua Dsar	KK	Kepidanan Penduduk	KEGIATAN DAN BIAYA			
								KEGIATAN	Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
3.	Palsabua		32/13	1383	334	0.72	1. KEGIATAN FISIK				
							* Pengadaan Pipa PVC Dia 100 mm				
							* Pengadaan Pipa PVC Dia 75 mm				
							* Pemasangan Jalan				
							* Pengadaan Water Meter				
							* Pengadaan Hidran Umum				
							* Pembangunan Drainase				
							* Pengadaan Cerebok Sampah				
							* Pengadaan Komposter Sampah				
							* Pengadaan TPS				
							* Pembangunan Jalan Setapak				
							* Pengadaan Jalan Lengkungan L-1 m				
							* RKB SD Paluhua				
							* Pagar Keliling SD Paluhua				
							* Rehab Ruang Guru				
							* Pengadaan Bako Paket				
							* Pagar Keliling Kantor Lurah Paluhua				
* Pagar Keliling Puskesmas											
* Pengadaan Poma Sambilan Tanah Rakyal											
* Rehab Pemukiman Kumuh											
Sub Joridit											
2. KEGIATAN NON FISIK											
* Pekerjaan Jasa Mengajar											
* Pekerjaan Pengadaan Hasil Rumpun Jata											
* Pembangunan PKBM											
Sub Joridit											
T. Lainnya											







No.	Keterangan Keberhasilan Baru	Lokasi (Ha.)	Luas Wilayah (Ha.)	KK 1-22	Kepuasan Penduduk 2011	KEGIATAN	Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.2		10.00	31.00	1-22	302,1	<b>1. KEGIATAN FISIK</b>			1.202.803.000
						• Pengadaan Mesin Handling	3 Unit	7.500.000	22.500.000
						• Perbaikan Matriose	350 Meter	56.000	20.100.000
						• Pembangunan Tempat MCK	1 Unit	12.000.000	12.000.000
						• Pengadaan Perhiasan Sempah	3 Unit	350.000	700.000
						• Pengadaan Konsuler Sampah	1 Unit	20.000.000	20.000.000
						• Pengadaan Drog Sampah Dari Naya	30 Buah	50.000	1.500.000
						• Pekerjaan Jalan Lingkungan	1000 Meter	150.000	150.000.000
						• Pembangunan Jalan Sempak	500 Meter	100.000	50.000.000
						• Pemukiman Tegal	500 Meter	1.500.000	750.000.000
						Sub Jumlah			1.192.800.000
						<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>			
						• Pelatihan Gender Bagi TP-PKK Kelurahan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Prima Se-kab	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Bantuan Modal kerja Bagi UKM	1 Paket	35.000.000	35.000.000
						• Pelatihan Insentif Bagi Peternak LPM	1 Paket	5.000.000	5.000.000
						Sub Jumlah			70.000.000
						1. KEGIATAN FISIK			70.000.000
						• Pendataan Petusge	1.000 Meter	80.000	80.000.000
						• Pengalihan Contoh Sampah	20 Unit	350.000	7.000.000
						• Pengalihan Konsuler Sampah	20 Unit	20.000.000	400.000.000
						• Pembangunan Jalan Sempak	200 Meter	100.000	20.000.000
						• Pembangunan Diker	20 Unit	15.000.000	300.000.000
						Sub Jumlah			412.000.000
						<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>			
						• Pelatihan Gender Bagi TP-PKK Kelurahan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Prima Se-kab	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Bantuan Modal Kerja Bagi UKM	1 Paket	35.000.000	35.000.000
						• Pelatihan Insentif Bagi Peternak LPM	1 Paket	5.000.000	5.000.000
						Sub Jumlah			70.000.000
						1. KEGIATAN FISIK			70.000.000
						• Pendataan Petusge	1.000 Meter	80.000	80.000.000
						• Pengalihan Contoh Sampah	20 Unit	350.000	7.000.000
						• Pengalihan Konsuler Sampah	20 Unit	20.000.000	400.000.000
						• Pembangunan Jalan Sempak	200 Meter	100.000	20.000.000
						• Pembangunan Diker	20 Unit	15.000.000	300.000.000
						Sub Jumlah			412.000.000
						<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>			
						• Pelatihan Gender Bagi TP-PKK Kelurahan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Prima Se-kab	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Bantuan Modal Kerja Bagi UKM	1 Paket	35.000.000	35.000.000
						• Pelatihan Insentif Bagi Peternak LPM	1 Paket	5.000.000	5.000.000
						Sub Jumlah			70.000.000

No.	Kecamatan Kelurahan	Lokasi (H2)	Dasar Daerah (H2)	KX	Kepada Penguat	KEGIATAN	Vol. Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
4.3.	Wadukam.	19	14	407	113.1	<b>KEGIATAN DAN BIAYA</b>			
						<b>1. KEGIATAN FISIK</b>			
						Pengalihan Jalan Lurus	3 Unit	7.500.000	22.500.000
						Pembuatan Drainase	500 Meter	80.000	40.000.000
						Pembangunan Barier Liris	1 Paket	300.000.000	300.000.000
						Pengalihan Gerobak Sampah	10 Unit	350.000	3.500.000
						Pengalihan Kontainer Sampah	2 Unit	30.000.000	60.000.000
						Pengalihan Tong Sampah dan Kayu	35 Bundel	50.000	1.750.000
						Pengalihan Lampu Jalan TL 40 Watt	20 Lamp	150.000	3.000.000
						Pembuatan Jalan Sepak	500 Meter	100.000	50.000.000
						Pembangunan Gedung Serba Guna	100 M <sup>2</sup>	1.500.000	150.000.000
Sub Jumlah								615.500.000	
<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>									
Pelatihan Gender Bagi TP-PAS Kelurahan	1 Paket	15.000.000	15.000.000						
Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Putri Sekolah	1 Paket	15.000.000	15.000.000						
Pelatihan Penanggulangan Bencana	1 Paket	35.000.000	35.000.000						
Pemberian Inisiatif Bagi Pengurus LPM	1 Paket	5.000.000	5.000.000						
Sub Jumlah								70.000.000	
<b>3. KEGIATAN FISIK</b>					307.7				
Pengalihan Jalan Lurus	1 Unit	7.500.000	7.500.000						
Pembuatan Drainase	50 Meter	80.000	40.000.000						
Pengalihan Tong Sampah dan Kayu	4 Bundel	50.000	200.000						
Pengalihan Gerobak Sampah	10 Unit	350.000	3.500.000						
Pengalihan Kontainer Sampah	2 Unit	30.000.000	60.000.000						
Pengalihan TPS	2 Unit	2.000.000	4.000.000						
Pembangunan Gedung	1 Unit	15.000.000	15.000.000						
Tempat Sidakan Drainase Ke Sungai	1 Bundel	3.000.000	3.000.000						
Pengalihan Pagar Dinding	50 Meter	200.000	10.000.000						
Sub Jumlah								113.100.000	
<b>4. KEGIATAN NON FISIK</b>									
Pelatihan Gender Bagi TP-PAS Kelurahan	1 Paket	15.000.000	15.000.000						
Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Putri Sekolah	1 Paket	15.000.000	15.000.000						
Pelatihan Penanggulangan Bencana	1 Paket	35.000.000	35.000.000						
Pemberian Inisiatif Bagi Pengurus LPM	1 Paket	5.000.000	5.000.000						
Sub Jumlah								70.000.000	

No.	Kecamatan Kelurahan	Data Dasar			Kepada dan Penduduk	KEGIATAN	KEGIATAN DAN BIAYA		
		Lokasi (Ha)	Luas-Wilayah (Ha)	KK			Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
4.7.	Tomba	19	30,52	780	208	<b>1. KEGIATAN FISIK</b>			
						• Revisi Drainase Komunal	1 Buah	10.000.000	10.000.000
						• Pembuatan Drainase	500 Meter	86.000	43.000.000
						• Pengadaan Tong Sampah dari Kayu	75 Buah	50.000	3.750.000
						• Pengalangan Gerobak Sampah	15 Unit	350.000	5.250.000
						• Pengadaan Konvensional Sampah	3 Unit	20.000.000	60.000.000
						• Pengadaan Perangkap Pda Drainase	250 Meter	900.000	225.000.000
						• Pembuatan jalan setapak	110 Meter	100.000	11.000.000
						• Clep Sakuran Drainase Ke Sungai	2 Buah	5.000.000	10.000.000
						• Pengobatan TPS	2 Buah	2.500.000	5.000.000
						Sub Jumlah			198.000.000
						<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>			
						• Pelatihan Jember Bagi TP-P&K Kelurahan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Pelatihan Kelembagaan Bagi Rerangka Puma Sekolah	1 Paket	15.000.000	15.000.000
						• Pelatihan Peningkatan Berencana	1 Paket	35.000.000	35.000.000
						Sub Jumlah			65.000.000

No.	Kecamatan Keturahan MURUHUM	Data Dasar			Kegiatan	Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Lokasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	KK				
5.1.	Melai	37	1.689	389	45,65		7.863.000.000,00	
1. KEGIATAN FISIK								
					3	Unit	7.500.000,00	
					500	Meter	43.000.000,00	
					5	Unit	350.000.000,00	
					1	Unit	1.750.000,00	
					35	Buah	50.000,00	
					50	Buah	150.000,00	
					500	Meter	100.000,00	
					5	Meter	160.000,00	
					5	Buah	10.000.000,00	
					50	Unit	5.000.000,00	
					1	Paket	10.000.000,00	
					2	PALU	180.000.000,00	
					1	Paket	100.000.000,00	
					1	Paket	130.000.000,00	
					1	PALU	130.000.000,00	
					1	Paket	100.000.000,00	
					1	Paket	5.000.000,00	
							1.797.000.000,00	
2. KEGIATAN NON FISIK								
					1	Paket	5.000.000,00	
					1	Paket	15.000.000,00	
					1	Paket	15.000.000,00	
					1	Paket	15.000.000,00	
							50.000.000,00	

No.	Kecamatan Kelurahan	Data Dasar			Kegiatan	Vol.	Sama	Biaya Sasaran (Rp)	Total Biaya (Rp)
		Lokasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	KK					
5.2.	Banda	200	2003	441	10.52			660.000.000,00	
<b>1. KEGIATAN FISIK</b> Pengadaan Hidran Umum Pembuatan Drainase Pembangunan Dak Penampungan Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan Koneksi Sampah Pengadaan Gerobak Sampah Pembinaan Duktur Pembinaan Jalan Setapak Pengaspalan Jalan Lingkungan Pengadaan Pipa PVC Dia 10 mm Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sub Jumlah									
	Banda (Lanjutan)								
5.3.	W.40	100	3935	763	39,35				
<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b> Pembelian Perumahan Kualitas Perumahan Teratai Rehabilitasi Karang Taruna Pembinaan Maglis Taklim Pemberian Insentif Kader Posyandu LPM-Harasp Sub Jumlah									
<b>1. KEGIATAN FISIK</b> Pengadaan Hidran Umum Pembuatan Drainase Pembangunan Tempat MCR Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengaspalan Jalan TL 40 W.40 Pembinaan Jalan Setapak Pengaspalan Jalan Lingkungan Pengadaan Tangk Sampah Dan Kloa Sub Jumlah									
<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b> Rehabilitasi Perumahan Berapok Berkolah Pembinaan Masjid Candi Sub Jumlah									

No.	Kecamatan Kerjurdhan	Desa Dasa	Lokasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	KK	Kepadatan Penduduk	KEGIATAN DAN BIAYA			Total Biaya (Rp)							
							KEGIATAN	Vol.	Biaya Satuan (Rp)								
5.4	Lumpang		46	78	952	62,3	L.A.GIATAN YON FISA										
							Pengadaan Hidran Umum	5	7.500.000,00	37.500.000,00							
							Pembangunan Drainase	300	86.000,00	25.800.000,00							
							Pembangunan Tempat MCK	2	50.000.000,00	100.000.000,00							
							Pengadaan Gerobak Sampah	20	350.000,00	7.000.000,00							
							Pengadaan Korbakor Sampah	2	20.000.000,00	40.000.000,00							
							Pembangunan Fasad	200	1.800.000,00	360.000.000,00							
							Pengadaan Lampu Jalan TL 40 Watt	3	150.000,00	450.000,00							
							Pembangunan Jalan Sepak	400	100.000,00	40.000.000,00							
							Pembangunan Diker	3	15.000.000,00	45.000.000,00							
Pengadaan Jalan Lingkungan			4.000	150.000,00	600.000.000,00			1.255.750.000,00									
Sub Jumlah																	
5.5	Tangampada		46	75	596	46,3	L.A. GIATAN YON FISA										
							Sertifikasi Tanah	45	250.000,00	11.250.000,00							
							Restorasi Sarang Tupaia	1	10.000.000,00	10.000.000,00							
							Rehabilitasi Zonasi	1	10.000.000,00	10.000.000,00							
							Pelatihan Nelayan Ikan Rempang Pesisir Sekolah	1	13.000.000,00	13.000.000,00							
							Sub Jumlah								46.250.000,00		
							L.A. GIATAN YON FISA							L.A. GIATAN YON FISA			
														Pengadaan Hidran Umum	2	7.500.000,00	15.000.000,00
														Pembangunan Drainase	500	86.000,00	43.000.000,00
														Pembangunan Tempat MCK	2	50.000.000,00	100.000.000,00
Pengadaan Gerobak Sampah	15	350.000,00	5.250.000,00														
Pengadaan Korbakor Sampah	2	20.000.000,00	40.000.000,00														
Pengadaan Lampu Jalan TL 40 Watt	30	150.000,00	4.500.000,00														
Pembangunan Torak Sampah Dari Kayu	35	50.000,00	1.750.000,00														
Pembangunan Jalan Sepak	1.000	100.000,00	100.000.000,00														
Pengaspalan Jalan Lingkungan	8.500	150.000,00	1.275.000.000,00														
Sub Jumlah								1.432.900.000,00									
L.A. GIATAN YON FISA							L.A. GIATAN YON FISA										
							Sertifikasi Tanah	50	250.000,00	12.500.000,00							
							Restorasi Sarang Tupaia	1	10.000.000,00	10.000.000,00							
							Rehabilitasi Zonasi	1	10.000.000,00	10.000.000,00							
Sub Jumlah								22.500.000,00									

No.	Kecamatan Kelurahan	Lokasi (Ha)	Desa Damar		Kepadaan Penduduk	KEGIATAN		Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
			Luas Wilayah (Ha)	KK		KEGIATAN	KEGIATAN			
5.6.	Lanis	33	4.637	927	140,52	1. KEGIATAN FISIK				
							Pembangunan Drainase	1.000 Meter	86.000.000	86.000.000,00
							Pembangunan Tempal MCK	2 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00
							Pengadaan Gerobak Sampah	1 Unit	350.000.000	350.000.000,00
							Penyediaan Kontainer Sampah	1 Unit	20.000.000.000	20.000.000.000,00
							Pengadaan Tong Sampah dari Baja	59 Buah	50.000.000	2.950.000.000
							Pengadaan Lampu Jalan TL-40 Watt	50 Buah	150.000.000	7.500.000.000
							Pembuatan Jalan Setapak	160 Meter	100.000.000	16.000.000.000
							Perbaikan Rumah Kumuh	50 Buah	2.000.000.000	100.000.000.000
							Pembuatan TPS	2 Unit	2.500.000.000	5.000.000.000
							Sub Jumlah			337.850.000,00
							2. KEGIATAN NON FISIK			
							Pelatihan Kewirausahaan	1 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000
							Bantuan Modal Usaha Bagi UKM	1 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000
							Sub Jumlah			30.000.000.000
5.7.	Nyangaumata	19	3.335	695	186,05	1. KEGIATAN FISIK				310.350.000,00
							Pembuatan Jalan Setapak	150 Meter	100.000.000	15.000.000,00
							Pembuatan Drainase	500 Meter	86.000.000	43.000.000,00
							Pembangunan Tempal MCK	2 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00
							Pengadaan Gerobak Sampah	1 Unit	350.000,000	350.000,000
							Pengadaan Tong Sampah Dan Lon	30 Buah	50.000,000	1.500.000,000
							Pengadaan Lampu Jalan TL-40 Watt	50 Buah	150.000,000	7.500.000,000
							Pembuatan TPS	2 Unit	15.000.000,000	30.000.000,000
							Pembuatan Pos Kamling	1 Unit	10.000.000,000	10.000.000,000
							Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	50 buah	2.000.000,000	100.000.000,000
							Sub Jumlah			497.500.000,000
							2. KEGIATAN NON FISIK			
							Pelatihan Gender	1 Paket	10.000.000,000	10.000.000,000
							Sertifikasi Tanah	32 Orang	250.000,000	8.000.000,000
							Kevidualan Penyantun	1 Paket	15.000.000,000	15.000.000,000
							Sub Jumlah			33.000.000,000



No.	Kecamatan Kelurahan	Data Dasar				KEGIATAN DAN BIAYA								
		Lokasi (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	KK	Kepadatan Penduduk	KEGIATAN	Vol. Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)					
5. 8.	Kaobula	19	3,535	695	186,05	<b>1. KEGIATAN FISIK</b>			172.500.000,00					
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	500/Buah	2.000.000,00	100.000.000,00					
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif TK	1/Set	10.000.000,00	10.000.000,00					
						Pembangunan Tempat MCK	1/Unit	50.000.000,00	200.000.000,00					
						Pengadaan Kontainer Sampah	2/Unit	20.000.000,00	40.000.000,00					
						Pengadaan Tong Sampah dari kayu	500/Buah	50.000,00	2.500.000,00					
						Pengadaan Generator Masjid	1/Unit	5.000.000,00	10.000.000,00					
						Pembuatan Jalan Setapak	1500/Meter	100.000,00	50.000.000,00					
						Sub Jumlah								172.500.000,00
												<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>		
Pelatihan Ketrampilan Bagi Karang Taruna	1/Paket	20.000.000,00	20.000.000,00											
Pembekalan Majelis Taklim	1/Paket	20.000.000,00	20.000.000,00											
Pembekalan Keluarga Muda Mandiri	1/Paket	20.000.000,00	20.000.000,00											
Sub Jumlah								60.000.000,00						
5. 9.	Wameo	16	18	948	240,7	<b>1. KEGIATAN FISIK</b>			817.700.000,00					
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	500/Buah	2.000.000,00	100.000.000,00					
						Pembuatan Drainase	2000/Meter	85.000,00	25.800.000,00					
						Pembangunan Tempat MCK	1/Unit	50.000.000,00	50.000.000,00					
						Pengadaan Gerobak Sampah	100/Unit	350.000,00	35.000.000,00					
						Pembangunan Gedung Kelurahan	2600/Bag	1.300.000,00	178.000.000,00					
						Pembuatan Pagar SD Wameo	600/Meter	1.000.000,00	600.000.000,00					
						Pembuatan Jalan Setapak	2500/Meter	100.000,00	25.000.000,00					
						Pertaspasan Jalan Lingkungan	3000/Meter	150.000,00	45.000.000,00					
						Sub Jumlah								787.700.000,00
						<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>								
						Pelatihan Ketrampilan Bagi Karang Taruna	1/Paket	20.000.000,00	20.000.000,00					
						Pembekalan Majelis Taklim	1/Paket	20.000.000,00	20.000.000,00					
						Pembekalan Keluarga Muda Mandiri	1/Paket	20.000.000,00	20.000.000,00					
Sub Jumlah								60.000.000,00						

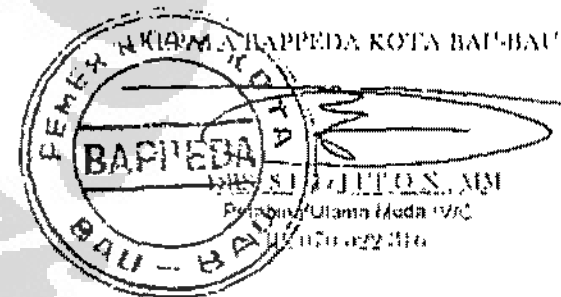
No.	Kecamatan Kelurahan	Lokasi (Ha.)	Luas Wilayah (Ha.)	SK	Keperluan Penduduk	KEGIATAN	Unit	Volume						
5. 10.	Bone-Bone	38	5,722	1,017	304	<b>1. KEGIATAN FISIK</b>		1.000.500.000,00						
						Pembangunan Hidran Umum	3 Unit	7.500.000,00	72.500.000,00					
						Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	30 Unit	9.000.000,00	40.000.000,00					
						Pengadaan Sarana Produksi Nelayan	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00					
						Rehabilitasi Kantor Lurah	200 M <sup>2</sup>	1.000.000,00	950.000.000,00					
						Pembangunan TPS	2 Unit	2.500.000,00	5.000.000,00					
						Pembangunan Drainase	750 Meter	85.000,00	64.500.000,00					
						Pembangunan Tempat MGK	2 Unit	50.000.000,00	60.000.000,00					
						Pengadaan Gerobak Sampah	1 Unit	350.000,00	5.150.000,00					
						Pengadaan Kemplar Sampah	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00					
						Pengadaan Tong Sampah dari kayu	50 Bush	50.000,00	17.50.000,00					
						Pengadaan Lampu Jalan TL 40 Watt	50 Bush	150.000,00	7.500.000,00					
						Pembangunan Jalan Setapak	1.000 Meter	100.000,00	100.000.000,00					
Pengaspalan Jalan Lingkungan	800 Meter	150.000,00	100.000.000,00											
Sub Jumlah														
5. 11.	Tarafs	26	42	992	108,6	<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>		1.000.000,00						
						Pembinaan Budaya Rumpat Laut	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00					
						Pengadaan Bakti Aysin Burna	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00					
						Pelatihan Ketrampilan Berdagang	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00					
						Pelatihan Ketrampilan Menjahit	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00					
						Sub Jumlah								
						1. KEGIATAN NON FISIK								
							Pembinaan Sumur Resapan	4 Unit	10.000.000,00	40.000.000,00				
							Pembinaan Drainase	500 Meter	85.000,00	64.500.000,00				
							Pengadaan tong Sampah dari kayu	50 Unit	50.000,00	17.50.000,00				
							Pengadaan Gerobak Sampah	4 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00				
							Pengadaan Lampu Jalan TL 40 Watt	50 Bush	150.000,00	7.500.000,00				
							Pembangunan Jalan Setapak	500 Meter	100.000,00	100.000.000,00				
Pembangunan Rumah Sumpul	30 Unit	2.000.000,00	60.000.000,00											
Pengaspalan Jalan Lingkungan	800 Meter	150.000,00	100.000.000,00											
Sub Jumlah														
2. KEGIATAN NON FISIK														
	Pelatihan Ketrampilan Berdagang dan Prakerjasama Nelayan Tegal	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00										
Sub Jumlah														

VI	5.1.1	5.1.1.5	1.373	314	1,47	KEGIATAN	Qty	1. Total
<b>Kota Cirebon</b> <b>SORAYOLLO</b> Ganda Baru								
<b>1. KEGIATAN FISIK</b>								
Pengadaan Pipa PVC Dia 100 mm							1000 Meter	75.000,00
Pengadaan Pipa PVC Dia 75 mm							1500 Meter	45.000,00
Pembangunan Boreapiering							1 Unit	55.000.000,00
Pengadaan Wastu meser							75 Buah	11.250.000,00
Pengadaan Hidran Umum							5 Unit	37.500.000,00
Pembuatan Jalan Lurunglirangan							500 Meter	43.000.000,00
Pengadaan TPS							1 Unit	12.000.000,00
Rehabilitasi Bak Mandi Air							1 Unit	350.000,00
Pengadaan Cerobok Sampah							5 Unit	30.000.000,00
Pengamanan Jalan Perumahan							800 Meter	40.000.000,00
Pembangunan Dalkar							5 Buah	150.000,00
Pembangunan Kantor Kelurahan Gonda							84 M2	100.000,00
Pagar Keliling Kantor Kelurahan							80 M2	150.000,00
Pembangunan Pagar							1 Paket	125.000.000,00
Penambahan Ruang Belajar SD Ganda Baru							240 M2	1.300.000,00
Pembangunan Ruang Kamar SD Ganda Baru							60 M2	1.500.000,00
Penambahan Ruang Kelas SMP Ganda Baru							240 M2	1.300.000,00
Pembangunan Perpustakaan SD Ganda Baru							1 Paket	10.000.000,00
Pengamanan SD N Ganda Baru							1 Paket	75.000.000,00
Pengadaan Jamban Melayang							30 Buah	100.000,00
Pembangunan Pelebaran Banyu							168 M2	500.000,00
Pembangunan Jalan Usaha Tani							2000 Meter	100.000,00
Sub Jumlah								1.686.250.000,00
<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>								
Pengadaan Bibit Tanaman Hortikultura							1 Paket	30.000.000,00
Pelatihan Pembangunan Ksrijik Maninjau							1 Paket	30.000.000,00
Pembinaan KUEP (Keluarga Ekampususkuat)							1 Paket	10.000.000,00
Sub Jumlah								1.647.000.000,00

K. R. N		G. R. P		K. R. N	
L. KEGAYATAN SISIA					619.000.000,00
Pengadaan Pipa PVC Dia 100 mm		1000	Meter	75.000,00	75.000.000,00
Pengadaan Pipa PVC Dia 75 mm		1500	Meter	45.000,00	67.500.000,00
Perbaikan Broomkastig		1	Unit	55.000.000,00	55.000.000,00
Pengadaan Wast meter		75	Buah	150.000,00	11.250.000,00
Pengadaan Hidran Umum		5	Unit	7.500.000,00	37.500.000,00
Pembuatan Jalan Lingkaran		500	Meter	150.000,00	75.000.000,00
Pengadaan TTS		2	Buah	2.500.000,00	5.000.000,00
Perbaikan Gerobak Sampah		5	Unit	350.000,00	1.750.000,00
Perbaikan Jalan Setapak		500	Meter	100.000,00	50.000.000,00
Pembuatan Drainir		2	Buah	15.000.000,00	30.000.000,00
Pembuatan Drainase		1000	Meter	86.000,00	86.000.000,00
Pembuatan Jamban Keluarga		100	Buah	900.000,00	90.000.000,00
Pengadaan Bisk Buah-buahan		1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Pengadaan Bisk Tiram Kembang		1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
Sub Jumlah					604.000.000,00
L. KEGAYATAN NON SISIA					
Perbaikan Seterak Kambing		1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Perbaikan Kader Poyanda		1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Pembelajaran Kader PNN		1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Sub Jumlah					15.000.000,00
6.3.	Kasabu Haru	0.42			357.700.000,00
L. KEGAYATAN SISIA					
Pengadaan Pipa PVC Dia 100 mm		1000	Meter	75.000,00	75.000.000,00
Pengadaan Pipa PVC Dia 75 mm		1500	Meter	45.000,00	67.500.000,00
Pembelajaran Broomkastig		1	Unit	55.000.000,00	55.000.000,00
Pengadaan Wast meter		75	Buah	150.000,00	11.250.000,00
Pengadaan Hidran Umum		5	Unit	7.500.000,00	37.500.000,00
Pembuatan TTS		2	Buah	2.500.000,00	5.000.000,00
Perbaikan Gerobak Sampah		5	Unit	350.000,00	1.750.000,00
Perbaikan Jalan Setapak		500	Meter	100.000,00	50.000.000,00
Pembuatan Drainir		2	Buah	15.000.000,00	30.000.000,00
Pembuatan Drainase		1000	Meter	86.000,00	86.000.000,00
Sub Jumlah					232.940.000,00
L. KEGAYATAN NON SISIA					
Perbaikan Perbukit Kambing		1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Pembelajaran Kader Poyanda		1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Sub Jumlah					10.000.000,00

						KEGIATAN DAN BIAYA				
No.	Keturahan	Zona (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	KK	Keperluan Penduduk	KEGIATAN	Vol.	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
6.4.	Rugi	1,095	1,61	322	1,47					784.250.000,00
						<b>1. KEGIATAN FISIK</b>				
						Pengadaan Pipa PVC Dia 100 mm	1000	Meter	75.000,00	75.000.000,00
						Pengadaan Pipa PVC Dia 75 mm	1500	Meter	45.000,00	67.500.000,00
						Pembangunan Broncaptering	1	Unit	55.000.000,00	55.000.000,00
						Pengadaan Water meter	70	Buah	150.000,00	10.500.000,00
						Pengadaan Hidran Umum	5	Unit	7.500.000,00	37.500.000,00
						Pengadaan TPS	2	Buah	2.500.000,00	5.000.000,00
						Pengadaan Gerbak Sampah	5	Unit	350.000,00	1.750.000,00
						Pengerasan Jalan Setapak	500	Meter	100.000,00	50.000.000,00
						Pembuatan Dusker	6	Buah	15.000.000,00	90.000.000,00
						Pembuatan Jalan Lingkungan	500	Meter	150.000,00	75.000.000,00
						Pembuatan Tempat MCK	1	Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
						Pembuatan Drainase	2000	Meter	85.000,00	172.000.000,00
						Sub jumlah				689.350.000,00
						<b>2. KEGIATAN NON FISIK</b>				
						Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
						Pelatihan Pembuatan Tungku Hemat Energi	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
						Pelatihan Kepramukaan Bagi Remaja Putus Sekolah	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
						Pemberian insentive Kader Posyandu, PKK	1	Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
						Pelatihan Beternak Kambing	1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
						Pemberdayaan Kader Posyandu, PKK, LPM, Hansip	1	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
						Sub jumlah				95.000.000,00

Ban - Ban. 02 Oktober 2006



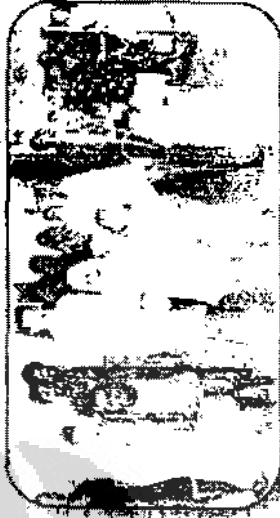
Lampiran 4 :



**MAKALAH KEPALA BAPPEDA KOTA BAU-BAU  
PADA FORUM DISKUSI PUBLIK  
SEBAGAI RANGKAIAN AWAL KEGIATAN FGD**



**KEPALA  
BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BAU-BAU  
PROFIL KEMISKINAN DI KOTA BAU-BAU  
DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA**



# Masalah Utama Pembangunan

## Besarnya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Indonesia

Penduduk Miskin:

Maret 2007                      37,17 Juta Jiwa

Pengangguran:

Agustus 2007                    12,7 Juta Jiwa

### Mengapa bisa terjadi?

Di mana letak  
kesalahannya?

Pada masyarakat  
ataukah sistem?  
Atau Keduanya?

Apa yang harus  
kita lakukan?





**Masyarakat miskin  
karena  
tidak TAHU  
apa yang membuat  
mereka miskin**

## **Faktor pemicu Kemiskinan Kota Bau-Bau**

- **Urbanisasi yang tinggi dari hinterland**



- **Mengakibatkan meningkatnya:**
  - **Tuntutan Lapangan Kerja dan Kebutuhan Ruang Permukiman**
  - **Kebutuhan Pelayanan Umum utamanya Pendidikan dan Kesehatan**

## **3 Langkah Strategis Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Bau-Bau**

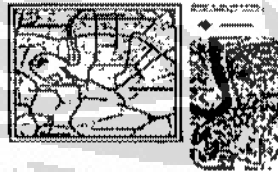
1. Memetakan tingkat kemiskinan masyarakat (ekonomi, sosial budaya, akses, dll)

2. Mengubah Mindset Masyarakat

3. Integrasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan



### **1 Memetakan Kemiskinan Masyarakat**



- ▣ Miskin Ekonomi
- ▣ Miskin Politik/ akses terhadap kebijakan
- ▣ Miskin Sosial Budaya
- ▣ Miskin Lingkungan



## DEFINISI KEMISKINAN

**Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial  
(World Summit for Social Development) di Kopenhagen Maret 1995 :**

*Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk meliputi :*

- Rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan
- Kelaparan dan kekurangan gizi
- Rendahnya tingkat kesehatan
- Keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya
- Kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat
- Kehidupan bergelandang dan tempat yang tidak memadai
- Lingkungan yang tidak aman
- Diskriminasi dan keterasingan sosial.
- Rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya.

*Secara umum kemiskinan diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan seseorang untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi sehingga berkembang beberapa indikator yang disesuaikan dengan sudut pandang/dimensi masing-masing.*

## DEFINISI KEMISKINAN

**BKKBN : Keluarga Prasejahtera + Keluarga Sejahtera I**

*Keluarga Prasejahtera : Keluarga yang belum dapat memenuhi*

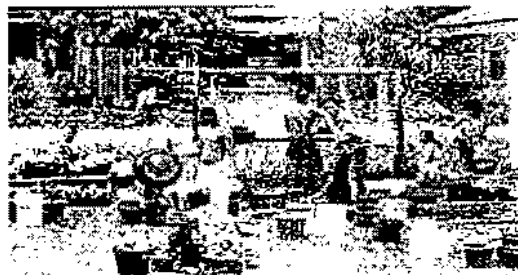
*Keluarga Sejahtera I : Keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya minimum tetapi belum memenuhi*

**BPS : Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (Poverty Line)**

*Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar meliputi (Setara dengan 2100 kalori/kapita/hari) dan ( perumahan, pendidikan, pakaian, kesehatan, barang dan jasa lainnya)*

**Kebutuhan dasar minimum meliputi :**

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
2. Umumnya makan dua kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga menggunakan pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian
4. Bagian lantai terluas dari rumah bukan dari tanah
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin berKB dibawa ke sarana kesehatan



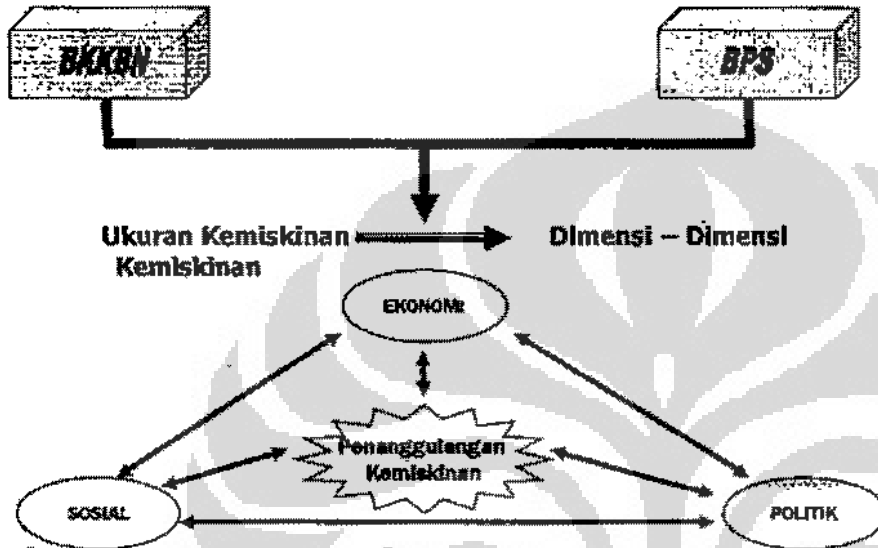
**Kebutuhan sosial psikologis meliputi :**

1. Kebutuhan pendidikan
2. KB
3. Kesehatan
4. Transportasi

# INDIKATOR KEMISKINAN

2 pendekatan :

- (1) Kebutuhan Dasar (BKKBN)
- (2) Pendapatan / Pengeluaran (BPS)



# INDIKATOR KEMISKINAN

## Dimensi Politik :

- > Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kehidupannya.
- > Ketersediaan sarana kelembagaan guna terlibat secara langsung dalam proses politik.

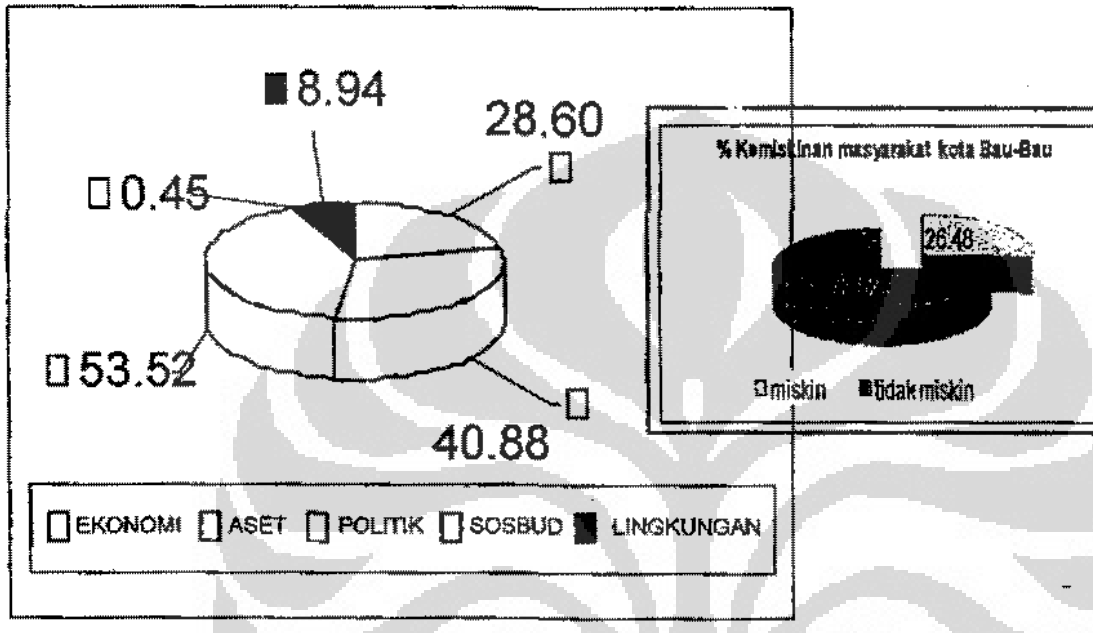
## Dimensi Sosial :

- ❖ Tingkat kebersamaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.
- ❖ Tingkat kemampuan psikologi individu, antara lain ketidakberdayaan (powerlessness), ketidakmampuan berpendapat (*voicelessness*), ketergantungan (*dependency*), rasa malu (*shame*), rasa hina (*humiliation*).
- ❖ Tingkat kriminalitas (tingkat keamanan dan ketertiban).

## Dimensi Ekonomi :

- Tingkat penghasilan/pengeluaran perkapita
- Tingkat kesehatan dan gizi makanan
  - Indikator BPS : Miskin < 2100 kalori/hari/kapita ;
  - Indikator Prof. Sayogyo : Miskin < 480 Kg beras/tahun;  
Miskin sekali < 360 Kg beras/tahun;  
Paling miskin < 270 kg beras/tahun.
- Tingkat pendidikan, kepedulian lingkungan dan penggunaan ruang, dll.

# TINGKAT KEMISKINAN MULTIDIMENSI KOTA BAU-BAU TAHUN 2003



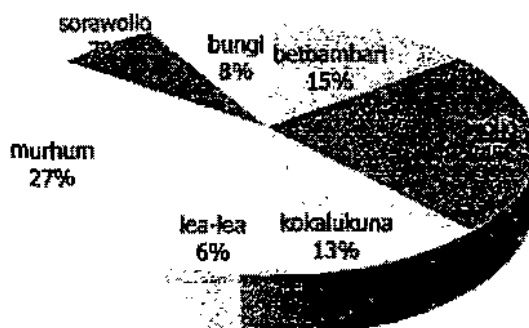
# STATISTIK MASYARAKAT MISKIN KOTA BAU-BAU Tahun 2007 (DIMENSI EKONOMI)

**VERSI BPS**

Jumlah penerima BLT tahun 2007

Kecamatan	Jumlah (KK)	Persentase
Betoambari	2.251	14,68
Wolio	3.599	23,47
Kokalukuna	2.046	13,34
Lea-lea	912	5,95
Murhum	4.167	27,17
Sorawolio	1.083	7,06
Bungl	1.278	8,33
<b>KOTA BAU-BAU</b>	<b>15.336</b>	<b>100,00</b>

Sebaran Penerima BLT



Jumlah Penerima Raskin Tahun 2007 :

**12.452 KK** Strategi Penanggulangan..., Marsudi, FISIP UI, 2009

**STATISTIK MASYARAKAT MISKIN****KOTA BAU-BAU Tahun 2007****(DIMENSI EKONOMI)****VERSI BKKBN**

	Status KK	Jumlah KK Pra Sejahtera / Sejahtera I								Total KK Kota Bau-Bau	% thdp total Kota Bau-Bau
		Betambari	Murhum	Wallo	Kakulukuna	Leq-Leq	Bungi	Sora Walla	Kota Bau-Bau		
2002	Prasejahtera	1.697		1.598			956	785	5.036	23.676	21,27
	Sejahtera I	2.914		1.745			434	327	5.420	23.676	22,89
2003	Prasejahtera	3.054		2.588			1.485	874	8.001	23.962	33,99
	Sejahtera I	3.909		3.222			873	333	8.337	23.962	34,79
2007	Prasejahtera	1.613	3.456	3.103	1.453	1.270	929	1.070	12.894	30.895	41,73
	Sejahtera I	1.079	2.332	1.695	1.305	322	427	343	7.503	30.895	24,29

**2 Mengubah Mindset**

- ▣ Obyek → Subyek (tingkat partisipasi yang tinggi)
- ▣ Daftar Keinginan → Daftar Kebutuhan
- ▣ Daya serap Program Meningkat
- ▣ Cerdas dalam menentukan pilihan dan skala prioritas



Dipelihara melalui Komunikasi publik yang intensif  
antar pemerintah dengan masyarakat



HARIAN UMUM SURE

# SINAR HARAPAN



**INDEX**

- Halaman Utama
- Jajuk Rencana
- Nasional
- Ekonomi
- Uang & Lira
- Jabarabek
- Nusa Niara
- Luar Negeri
- Diah Raga
- Spick
- Niswan
- Kelelu
- Mandiri
- Kidul
- Mebi

**PROFIL**

**Asuhul Taalim  
Menggusur PKL Tanpa Konflik**

Diah  
Agus Sana's


**BABBAU** - Duluuk nongkrong berbagi cerita sembari minum teh bersama para pedagang kaki lima (PKL) di tempat kediamannya, Diah berusaha kesulungannya ketika berencana melakukan pengusiran pedagang PKL.

Melalui cuitan di webring teh Dendaq, Diah dan Dendrat Kutah ia banyak menasihati dan berdiskusi dengan pedagang yang berada di Dialeh Wali Kota Babau Amunt. Diah dan Dendrat Kutah ia banyak berdiskusi dengan pedagang yang berada di Dialeh Wali Kota Babau Amunt.

Di mata Asuhul Taalim, Diah dan komunitas masyarakat kota yang harus dimusnahkan dan diusir karena membuat wajah kota jadi sarwasul. Namun, Diah dan Dendrat Kutah ia, dipandang sebagai aset yang bisa dimanfaatkan bisa sebagai aset yang ke kas pemerintah kota (Pemkot).

Diah dan Dendrat Kutah ia PKL harus dikurangi agar memiliki pendapatan lebih.

*Handwritten notes:*  
- "dret" (top right)  
- "Asuhul Taalim" (circled in the title)  
- "Diah dan Dendrat Kutah" (written in the text)  
- "Dendrat Kutah" (written in the text)



**PELUNCURAN/PENYERAHAN DANA  
BLM.P2KP TAHAP I DAN DANA PPMK  
SE KOTA BABAU TAHUN 2005**

Bau-Bau & Surabaya

*Terlibat langsung*




Pada tahun 2004 Walikota Bau-Bau menyatakan

dirinya sebagai relawan **P2KP**

## 3 Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bau-bau

### 1. Integrasi Dokumen

PJM Pronangkis Kota – Kelurahan kedalam RPJMD – RKPD/KUA melalui pelaksanaan MUSRENBANG setiap tahun

### 2. Integrasi Pelaku

Pemerintah – Masyarakat – Swasta dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

### 3. Integrasi Program / Sumber pembiayaan

APBN – APBD 1 – APBD Daerah – BLN – Masyarakat

→ Program Inti : P2KP, NUSSP, PPK,

→ Program Pendukung : Sanimas, PEK, Sektorial Pertanian & Kelautan

## BEST

### A. Best Practices Lintas Sektor

1. Integrasi 3 aspek: Tradisi dalam pembangunan Kawasan Perairan Komoditi Pujasereta, Pasar Buah, Revitalisasi DAS Bau-Bau, Kawasan Wamoa Kota Mada
2. Aspek Ekonomi → Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK), Peningkatan secara nyata value added dari industri rumah tangga Pengkajian jambu mete, Pengembangan Komoditi, Pungut Laut
3. Aspek Sosial: Tertinggalnya Lemishin Politik → Peran aktif EK/MSK dalam membuka akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan mengkalibatkan masyarakat lebih luas terhadap tindakan dekonstruktif pada Pilkada

### B. Best Practices PNPM D2MD → Channelling BKM Suka Dharma



## DAFTAR PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KOTA BAU - BAU TAHUN 2005 - 2007

NO	PROGRAM	TAHUN						JENIS KEGIATAN
		2005		2006		2007		
		ANGGARAN	LOKASI	ANGGARAN	LOKASI	ANGGARAN	LOKASI	
1	NLESP	Rp. 1,38 M (Rp.154 jt/Kel)	2 kec, 9 Kel.	Rp. 4 M (Rp. 500 jt / Kel.)	5 kec., 8 Kel.	Rp. 5,8 M (Rp. 300 - 800 jt / Kel.)	2 kec, 10 Kel.	Pembangunan infrastruktur Kel.
2	PPMK	Rp. 1,1 M (Rp. 30 jt/Kel)	4 kec, 38 Kel.	Rp. 1,6 M (Rp. 50 jt/Kel)	4 kec, 36 Kel.	Rp. 1,75 M (Rp. 50 jt / Kel.)	6 kec., 41 Kel.	Pembangunan Fisik dan Non Fisik
3	PKPS/BBM	Rp. 3 M (Rp. 250 jt / Kel.)	4 kec, 12 Kel	-	-	-	-	Pembangunan Infrastruktur Kel.
4	UNDP	Rp. 1 M (Rp. 300-400 jt / Kel)	2 kec, 3 Kel.	-	-	-	-	Pemberdayaan Ekonomi
5	P2KP	Rp. 1,5 M (Rp. 150 jt / Kel.)	2 kec. BUSO, 10 Kel.	Rp. 4 M (Rp.150 - 250 jt / Kel.)	1 kec. BETOAMB ARI, 14 Kel.	-	-	TRIDAYA (Kegiatan Pembangunan Infrastruktur & Lingkungan, Ekonomi, Sosial)
	a. PKET	-	-	-	-	Rp. 6 M (Rp. 150- 300 jt / Kel.)	6 kec., 24 Kel.	
	b. P2PM	-	-	-	-	Rp. 7,6 M (Rp. 150- 200 jt / Kel.)	6 kec., 38 Kel.	
	KOTA BAU - BAU	Rp. 10,6 M (Rp. 300 - 500 jt /Kel.)	TERSEBAR MERATA	Rp. 9,6 M (Rp.150-500 jt /Kel.)	TERSEBAR MERATA	Rp. 21,15 M (Rp. 150- 800 jt / Kel.)	TERSEBAR MERATA	



Lampiran 5 :



**DAFTAR HADIR  
PESERTA FORUM DISKUSI PUBLIK  
"Cerdas dan Sistematis Menjawab Fenomena Kemiskinan  
di Daerah"**

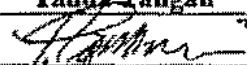

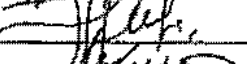
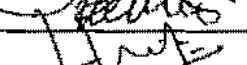
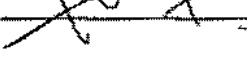
**DAFTAR HADIR  
FORUM DISKUSI PEMBANGUNAN  
"Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bau-Bau"**

Bau-Bau, 4 Mei 2009

No	Nama	Utusan/Delegasi	Tanda Tangan
1	WD. NURMALA. M. ✓	HPM	<i>[Signature]</i>
2	WD. NETTY R	HPM	<i>[Signature]</i>
3	Asis ✓	HMI	<i>[Signature]</i>
4	SARNI	Kelurahan Baadria	<i>[Signature]</i>
5	ZAFIA. TULLAH	SMA. N 4 BAU-BAU	<i>[Signature]</i>
6	LUH DOE AYU W.	SMA NEG 1 BAU BAU	<i>[Signature]</i>
7	AYU PUTRI W.	SMA NEG 1 BAU BAU	<i>[Signature]</i>
8	AULLA AFRIANY	SMA NEG 1 BAU BAU	<i>[Signature]</i>
9	KARIF ZULFAHRI	SMA NEG 1 BAU BAU	<i>[Signature]</i>
10	APRIDA	STIKES IST-BUTON	<i>[Signature]</i>
11	RENIXANTI	STIKES IST. BUTON	<i>[Signature]</i>
12	ASTRI IVO Kamudin	Kel. Baneu	<i>[Signature]</i>
13	MAM. AL HASAN	Kel. LAMANGSA	<i>[Signature]</i>
14	WAODE ERMAYANI	KEL. MANGSA	<i>[Signature]</i>
15	DAHRUL ZAM	KEL. TARAFU	<i>[Signature]</i>
16	Moh. Athiya Aringsi	SMA Neg 1 Bau-Bau	<i>[Signature]</i>
17	MUSRIF. A	BEM ST	<i>[Signature]</i>
18	HENDRA	BEM STAI	<i>[Signature]</i>
19	Ruslan	KAMMI	<i>[Signature]</i>
20	MURHASMAH	KELURAHAN WALE	<i>[Signature]</i>
21	MUNARWIS	KAMMI	<i>[Signature]</i>
22	Syolanda	Kel. Tangampar	<i>[Signature]</i>
23	Syamsul Bahri	Kel. Tarafu	<i>[Signature]</i>
24	GAFAR-UDDIN	BEM STAI	<i>[Signature]</i>
25	M. RAHMAD.	# STIKIP.	<i>[Signature]</i>
26	JUFRI WILSON.S	KEL. BATARAGURU	

No	Nama	Utusan/Delegasi	Tanda Tangan
27	Siti Mafyan	SMA Negeri-4 Baw-Baw	[Signature]
28	Mirdani	SMA Negeri-4 Baw-Baw	[Signature]
29	Suryati, AM	PNPM-MA/PAKP	[Signature]
30	Muh. Nasrum	SMA Negeri-4 Baw-Baw	[Signature]
31	ARMAWAN	SMA Negeri-4 Baw-Baw	[Signature]
32	HARIANTO.PALANI	SMP N 3 BAW-BAW	[Signature]
33	HILSAM	SMA N 3 BAW-BAW	[Signature]
34	MARINA.ATI	SMA N 3 BAW-BAW	[Signature]
35	Agus Suryanta S	Kelurahan Wameo	[Signature]
36	Wade Lani Febiani	KAMM Komar Baw-Baw	[Signature]
37	Abd. Malik Akbar	" " Baw-Baw	[Signature]
38	HASMA.SARMAWAN	KELURAHAN WASE	[Signature]
39	AMAT ASWAR	" " LAMONGA	[Signature]
40	HAMPANI	BEM UMB	[Signature]
41	Muh. Rizky Gabif	Kel. Wangkapani	[Signature]
42	Yanuar Daniel	Kel. Wangkapani	[Signature]
43	Lb. HAFEDIN	HIPMIKA	[Signature]
44	ASRIN	KEL. MELAI	[Signature]
45	YANA		[Signature]
46	IBUSTAM	KEL. BARABULU	[Signature]
47	MARDANI	KEL. KADULAH	[Signature]
48	A R I D A	KEL. KATOBENKE	[Signature]
49	Vira.Yuliana.OH	HPM	[Signature]
50	SALAMUN, M.Pd.	Kel. Betanagun	[Signature]
51	TRUSITA	HIPMIKA	[Signature]
52	RIDWAN LA ROSAMATI	Forum Fraternitas - WAMEO	[Signature]
53	Sunarmi	Fatayat	[Signature]
54	LAGU SUPRO	BEA WUDANGAN	[Signature]
55	Adiwan Hayuddin	119 M	[Signature]

No	Nama	Utusan/Delegasi	Tanda Tangan
56	ALAMIN	KEL-MELAI	
57	AHMAD EDISON	BEM STIKES IST BUNON	
58	ZULBA MUCI & R	UT- BUNYANJATI / BEM	
59	MUH. IRADAT	BEE-STIKIP IST JUTOT	
60	ANDRI R.	KEL BONE-BONE	
61	MUH. HIRAHING	KEL. BONE - BONE	
62	SAHIDIN OTO	KEL. KATAMONG	
63	RAHUL	PERC	
64	M-ASDAR	KEL NGANGARAN/UMUDA	
65	JOHI KARNO	-	
66	LD. SURIANTO	BEM UNIDAYAN	
67	ANSER	BR-TV	
68	UDIN	BR-TV	
69	LD MUBIN	-	
70	AMALUDDIN.A	KEL BATAPAGURU	
71	AWALLUDDIN	BEM UNIRAYON	
72	SUPARI	HUMIKAD	
73	BAKHARIN	WAMED	
74	THOMAS	WAMED	
75	ADIF TASILA	KEL. WATA	
76	Ridwan Odo	BEM Unidayan	
77	Muelchis	STAI	
78	BAHARUDDIN	Kel. BAPDIA	
79	Rohi Mandakia	Radio Baru / Radio Laversa	
80	UMI WANI	WAMGO	
81	AL ALHAR	MEDIA SULTRA	
82	MAJID ANSAR	HMI	
83	YLM FITRIH .R	UMB	
84	SAHLAN	Kel. Wale	
85	MORBOM	UMB	

No	Nama	Utusan/Delegasi	Tanda Tangan
86	ABDUL RAHMAN	BEM UMB	
87	FAHRI	BSC	
88	JUHARMIN S.	BEM UMB	
89	KASIM	<del>A</del>	
90	Amirudin. S.Pd	Kel. Cawang	
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			

Lampiran 6 :



**DAFTAR HADIR  
PESERTA KEGIATAN FORUM DISKUSI TERARAH**

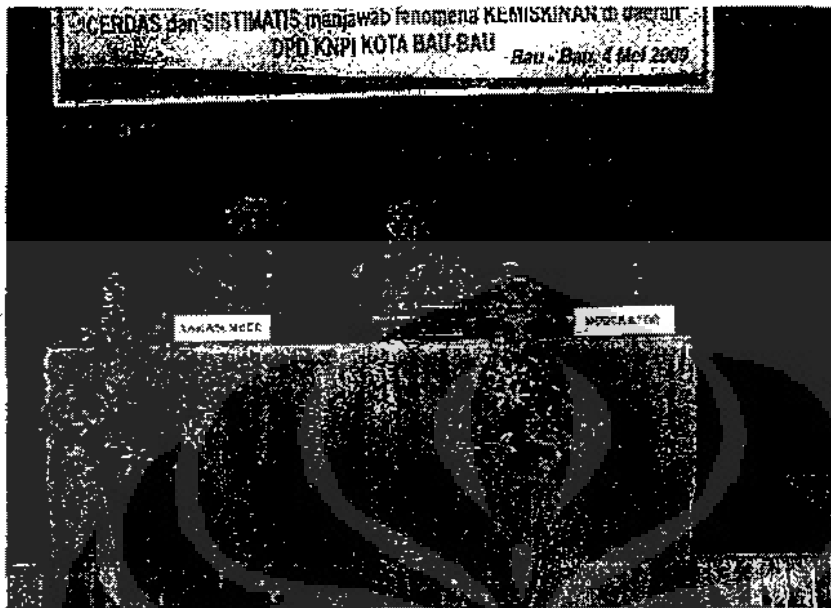




Lampiran 7 :



**DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN FORUM DISKUSI PUBLIK**  
**"Cerdas dan Sistematis Menjawab Fenomena Kemiskinan**  
**di Daerah"**



**Narasumber pada kegiatan Forum Diskusi Publik  
(Kepala BAPPEDA & Kadis Peridag, Kop dan UKM Kota Bau-Bau)**



**Pembanding Utama Kegiatan Forum Diskusi Publik  
(Koordinator PZKP Kota Bau-Bau & Koordinator Asosiasi LPM Se Kota Bau-Bau)**



**Para peserta kegiatan Forum Diskusi Publik**



**Para Peserta Kegiatan Forum Diskusi Publik**



**Aziana (Perwakilan JPKP) memberikan tanggapannya**



**Salamun (Perwakilan BKM Kelurahan) memberikan tanggapannya**

Lampiran 8 :



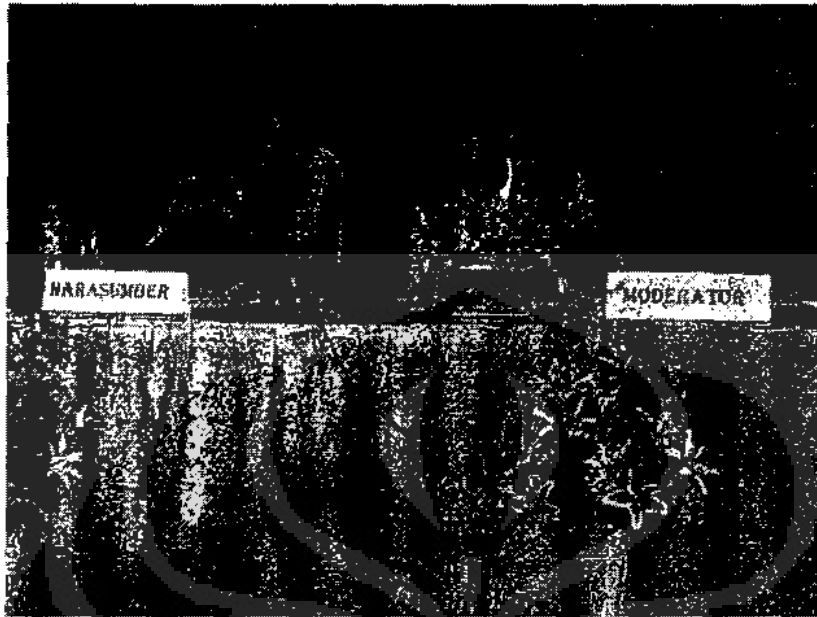
**DOKUMENTASI  
KEGIATAN FORUM DISKUSI TERAPAN**



**Suasana Forum Diskusi Terarah**



**Peserta FGD sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya**



**Peneliti selaku penanggungjawab kegiatan sedang memberikan penjelasan di damping Ketua KNPI selaku mitra penyelenggara**

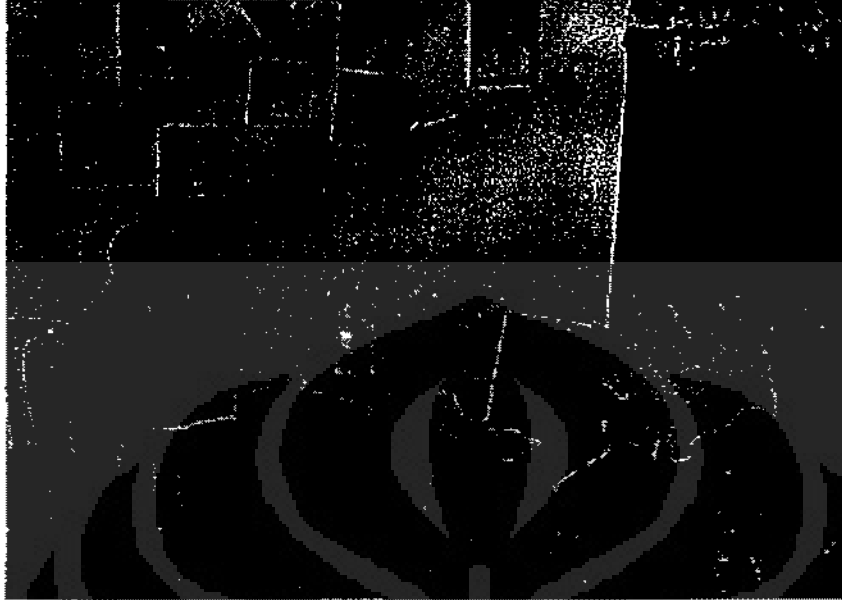


**Peneliti sedang mengarahkan jalanya kegiatan Forum Diskusi Terarah**

Lampiran 9 :







**Wawancara dengan Pimpinan DPRD Kota Bag-Bau**



**Wawancara dengan Sekda Kota Bag-Bau**



**Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kota Baubau**



**Wawancara dengan Pejabat Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan PPMK**



**Wawancara dengan salah seorang Lurah**



**Wawancara dengan salah seorang pengurus PPMK Kelurahan**



**Wawancara dengan salah seorang Anggota TPKB Kota Ban-Ban**



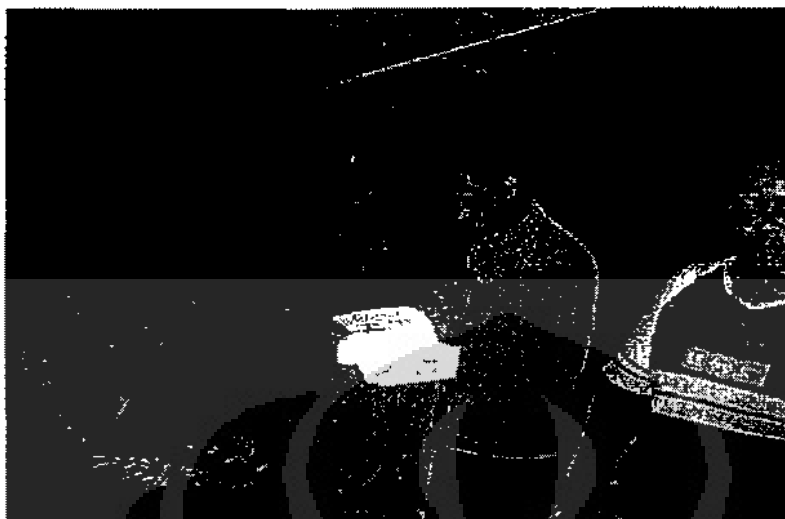
**Wawancara dengan salah seorang Fasilitator PPMK**



**Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Ban-Ban**



**Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Ban-Ban**



**Wawancara dengan salah seorang Anggota Masyarakat**

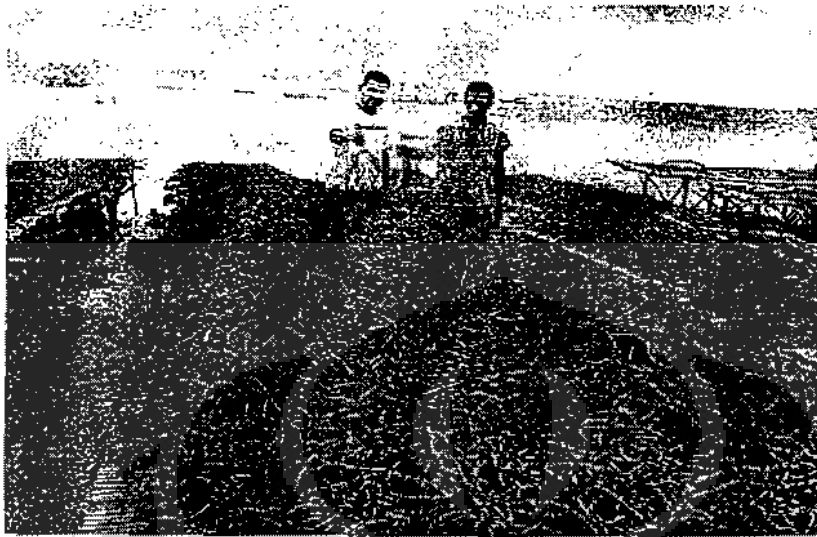


**Wawancara dengan salah seorang Ketua RT**

Lampiran 10 :



**DOKUMENTASI  
PELAKSANAAN PROGRAM PPMK**

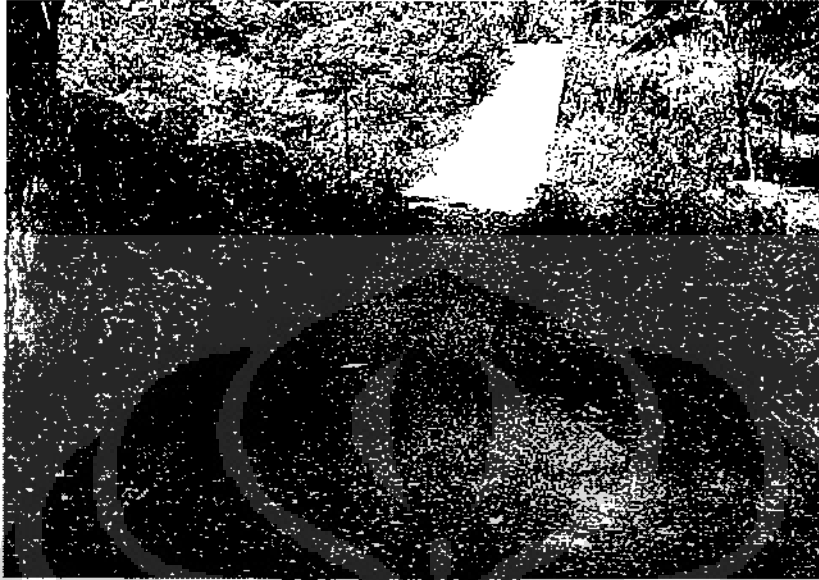


**Kelompok usaha petani rumput laut  
penerima dana bergulir PPMK**

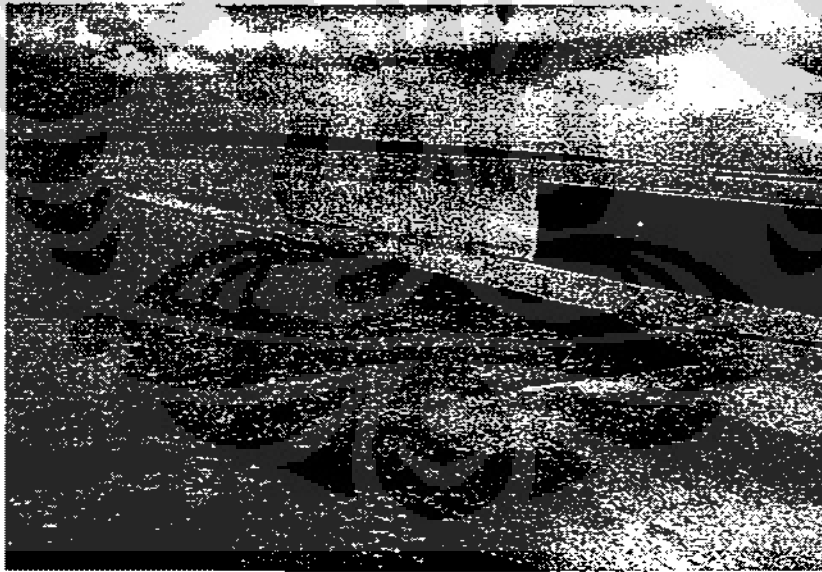


**Kelompok usaha biji jambu mente  
penerima dana bergulir PPMK**





**Kegiatan fisik PPMK,  
Jalan setapak kelurahan**



**Kegiatan fisik PPMK  
Talud penghalang ombak**

Lampiran 11 :



## PEDOMAN WAWANCARA

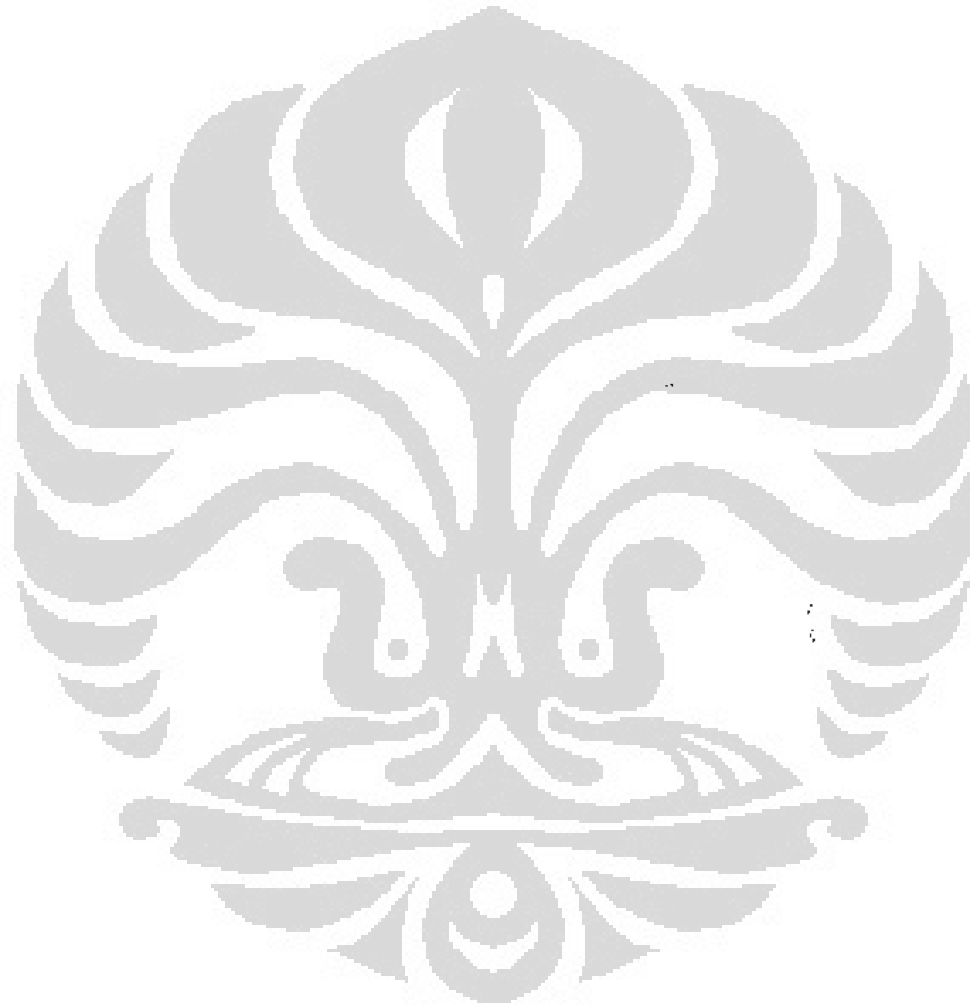
Pada rancangan penelitian ini, peneliti hanya mengemukakan secara garis besar apa yang menjadi point-point penting dalam wawancara, secara mendalam kemudian akan dikembangkan oleh peneliti ketika proses wawancara dengan informan telah berjalan, sehingga informasi/data yang lengkap dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian dapat diperoleh dengan baik.

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan Wawancara	Topik Pertanyaan	Informan
1	Bagaimana profil kemiskinan di Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008? Strategi atau pendekatan apa yang digunakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan tersebut?, Apa saja wujud program dan kebijakan yang dilakukan sebagai penjabaran dari pendekatan tersebut? Bagaimana dengan pelaksanaannya dilapangan? Apa wujud program penanganan masyarakat miskin ditingkat kelurahan?, Bagaimana pelaksanaannya dilapangan?, Sejauhmana efektifitasnya selama ini?.	Gambaran Kemiskinan dan Strategi yang digunakan	Walikota Bau-Bau, Pimpinan DPRD, Kepala BAPPEDA, Pejabat BPM, Anggota TPKD, Aparatur Pemkot Lainnya

2	<p>Bagaimana konsep penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh PEMKOT Bau-Bau?,</p> <p>Apa saja wujud program dan kebijakan yang digulirkan?,</p> <p>Sejauhmana efektifitasnya dalam menekan angka kemiskinan?,</p> <p>Apa wujud program penanganan masyarakat miskin ditingkat kelurahan?,</p> <p>Bagaimana pelaksanaannya dilapangan?,</p> <p>Faktor apa yang menjadi pendukung atau penghambatnya?,</p> <p>Sejauhmana efektifitasnya selama ini?.</p>	Tanggapan terhadap strategi yang digunakan	ORMAS, OKP, dan Unsur Perguruan Tinggi
3	<p>Apa saja wujud program dan kebijakan yang digulirkan oleh Pemkot Bau-Bau guna menanggulangi masalah kemiskinan?,</p> <p>Bagaimana pelaksanaannya dilapangan?, sejauhmana efektifitasnya dalam menanggulangi masalah kemiskinan?,</p> <p>Apa wujud program penanganan masyarakat miskin ditingkat kelurahan?,</p> <p>Bagaimana pelaksanaannya</p>	Tanggapan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan	Unsur Masyarakat

<p>dilapangan?, Faktor apa yang menjadi pendukung atau penghambatnya?, Sejauhmana efektifitasnya selama ini?</p>		
--	--	--



Lampiran 12 :



## Transkrip hasil wawancara

### Pertanyaan tentang strategi dalam menanggulangi kemiskinan :

”pendekatan utama yang kita lakukan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Bau-Bau yaitu : (i) mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin; dan (ii) meningkatkan pendapatan atau daya beli mereka/masyarakat miskin. Hal ini antara lain kita lakukan dengan melakukan penataan ruang dan memperbaiki infrastruktur-infrastruktur dasar seperti jalan raya, jalan usaha tani, pelabuhan, bandara, pasar, sarana dan prasarana bagi para pedagang, sarana dan prasarana bagi pedagang pasar malam, Rumah Sakit, dan ruang-ruang publik baru, serta infrastruktur dasar lainnya. Semuanya itu nantinya kita harapkan dapat menjadi rangsangan untuk terciptanya titik-titik ekonomi baru di masyarakat. Sebagai contoh misalnya perbaikan infrastruktur jalan raya, Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 melakukan perbaikan jalan raya diseluruh ruas jalan yang ada di Kota Bau-Bau, dan kesemuanya sebagian besar menggunakan aspal *hotmix* sebagai bahan baku jalan yang memiliki kualitas relatif cukup bagus dan dapat bertahan lebih lama. Perbaikan jalan raya tidak hanya dilakukan pada jalan-jalan utama, namun pada jalan-jalan yang bukan utama dilakukan perbaikan dan dengan tetap menggunakan aspal *hotmix* sebagai bahan dasarnya. Bahkan, ruas-ruas jalan yang merupakan jalan propinsi dan pembiayaannya semestinya dari APBD Pemerintah Propinsi juga kita lakukan perbaikan, hal ini kita lakukan karena mengingat banyaknya ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi, sehingga jalan-jalan propinsi harus secara bergilir untuk dianggarkan dalam APBD Propinsi, konsekuensinya adalah perbaikan jalan-jalan propinsi terkadang harus menunggu dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, sementara kondisi jalan-jalan tersebut kadang sudah sangat memprihatinkan dan disisi lain posisinya yang strategi, menjadi urat nadi dinamika sosial ekonomi masyarakat di daerah”. strategi lain selain perbaikan infrastruktur dasar, yakni pendekatan-pendekatan yang langsung ditujukan pada fenomena kemiskinan, misalnya dengan memberadayakan masyarakat miskin. Dalam periode 2003-3008 Pemerintah Kota Bau-Bau menganggarkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi usaha kecil guna memberikan dukungan modal bagi usaha-usaha kecil. Selain itu, program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di kelurahan, program ini digulirkan sejak tahun 2004 sampai tahun 2008, bahkan saat ini di tahun 2009 Pemerintah Kota masih menganggarkan pula program tersebut. (AT, Wawancara 16 April 2009)

“secara sistimatis strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dalam perodesasi 2003-2008 adalah : memetakan tingkat kemiskinan masyarakat (ekonomi, sosial budaya, akses, dll); mengubah *mindset* atau cara pandang masyarakat; integrasi program. Memetakan kemiskinan masyarakat yakni ; (i) miskin ekonomi: dengan indikator tingkat penghasilan/pengeluaran perkapita, tingkat kesehatan dan gizi makanan, tingkat pendidikan, kepedulian

lingkungan, penggunaan ruang, dll; (ii) miskin politik/akses terhadap kebijakan: dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kehidupannya, ketersediaan sarana kelembagaan guna terlibat secara langsung dalam proses politik; (iii) dimensi sosial budaya: dengan indikatornya antara lain tingkat kebersamaan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, tingkat kemampuan psikologi individu (ketidakberdayaan, ketidakmampuan berpendapat, ketergantungan, rasa malu, rasa hina), tingkat kriminalitas (tingkat keamanan dan ketertiban). Mengubah *mindset* atau cara pandang, yakni : (i) cara pandang masyarakat dari obyek pembangunan/perubahan menjadi subyek pembangunan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat; (ii) cara pandang masyarakat dari daftar keinginan dalam perencanaan pembangunan/perubahan yang mereka rencana lakukan menjadi daftar kebutuhan, sehingga daya serap program meningkat; (iii) cara pandang agar lebih cerdas dalam menentukan pilihan dan skala prioritas dalam kehidupan mereka. Integrasi program penanggulangan kemiskinan Kota Bau-Bau, yakni : (i) Integrasi dokumen; (ii) integrasi pelaku : pemerintah, masyarakat, dan swasta. (iii) Integrasi program/sumber pembiayaan : APBN, APBD I, APBD Kota, BLN, Swadaya Masyarakat". (SJ, Wawancara 20 April 2009).

"penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif, multidimensi dan mendasar dengan pendekatan yang bertumpu pada peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, upaya penanganan kemiskinan penduduk di Kota Bau-Bau dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menggambarkan berbagai program pemberdayaan. Kebijakan-kebijakan penunjang yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bau-Bau, antara lain adalah : (a) identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (b) kegiatan ini dilakukan dalam rangka menginventarisir kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari setiap sektor, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.; (c) sinkronisasi antar program saat ini dan program yang akan datang, proses sinkronisasi diarahkan untuk menyelaraskan antar program yang ada disetiap instansi, serta antar program dari instansi pemda yang satu dengan instansi pemda lainnya. (d) membagi peran antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi harus dilakukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Diantara ketiga kelompok ini harus dilakukan pembagian peran yang seimbang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun demikian, pembagian peran ini bukanlah sesuatu yang saling meniadakan, tetapi saling mendukung sehingga tercipta kerjasama antar pelaku; (e) penentuan kelompok sasaran dan perumusan sistem penyampaian. Penentuan kelompok sasaran ditujukan agar kebijakan dan program yang dilakukan mencapai tujuan secara tepat. Kemudian dirumuskan cara penyampaian kebijakan dan program kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan". (FT, Wawancara 3 mei 2009)



Pertanyaan tentang tanggapan terhadap strategi penanggulangan yang dilakukan :

"strategi penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan dalam periode 2003-2008 tidak hanya kita arahkan pada pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin juga senantiasa kita anggarkan dalam kurun waktu tersebut, meskipun juga harus kita akui bahwa program-program pemberdayaan yang kita lakukan tersebut belum memperlihatkan hasil yang optimal, terkadang masih melenceng dari konsep dasarnya, ada persoalan pada tataran pelaksanaannya. Pada sisi lainnya, konsentrasi kita masih lebih didominasi pada program-program yang sifatnya pembangunan fisik, dengan mengabaikan pembangunan yang sifatnya non-fisik, padahal pembangunan non-fisik sebenarnya tidak kalah urgennya. Hal ini dapat kita lihat tidak hanya terjadi pada program-program yang direncanakan oleh pemerintah, namun pada program-program yang diusulkan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat pun lebih diwarnai dengan program-program dan kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik, bahkan kadang tidak prioritas". (AM, Wawancara 5 Mei 2009)

"harus kita mengerti, bahwa banyak program yang direncanakan untuk menangani kemiskinan belum dapat menjamin kalau kemiskinan itu dapat teratasi, variabel lain yang cukup penting adalah bagaimana implementasi dan tindak lanjut dari program yang direncanakan tersebut, dan kedua unsur inilah yang selalu kita kecolongan dilapangan, seringkali pada tataran implementasi program yang dilakukan melenceng dari konsep dasar yang telah dirumuskan, sebagai contoh Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang diperuntukan bagi usaha kecil dan pedagang kaki lima yang membutuhkan dukungan modal, namun realitasnya tidak sedikit dana-dana untuk dukungan permodalan tersebut didapatkan oleh mereka-mereka yang belum memiliki usaha produktif yang potensial, hanya karena memiliki hubungan-hubungan dengan pengelola program". (WA, Wawancara 3 Mei 2009)

"memang pemerintah Kota kita melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UKM telah menggulirkan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) bagi para usaha kecil dan pedagang-pedagang kaki lima, hanya saja terkadang yang mendapatkan dana bergulir tersebut belum tepat sasaran, sehingga tidak usaha kita heran ketika adanya kredit macet dalam program PEK tersebut. Hal itu dapat terjadi karena; pertama, pihak pengelola tidak memiliki mekanisme yang baik dalam menyalurkan, semestinya yang berhak mendapatkan adalah yang telah memiliki usaha potensial dan hanya karena kendala permodalan sehingga perlu disentuh dengan bantuan modal tersebut; kedua, masih banyak kepentingan-kepentingan lain yang ikut masuk dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga terkadang tidak memiliki usaha potensial akan tetapi dapat memperoleh dana hanya karena rekomendasi dari kelompok tertentu, termasuk salah satunya dari para legislator kita". (XX, Wawancara 4 Mei 2009)

strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menanggulangi kemiskinan di daerah masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya general, sehingga terkadang pendekatan yang di gunakan tidak tepat dengan kondisi wilayah yang menjadi sasaran program, sehingga akan lebih baik dan efektif ketika penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya masyarakat lokal setempat. (AT, Wawancara 2 Mei 2009)

"penanggulangan kemiskinan yang digalakkan di Kota Bau-Bau belum menjawab masalah kemiskinan politik secara substansi, yakni kemiskinan partisipasi masyarakat miskin dalam jalanya pembangunan, program-program yang digulirkan oleh pemerintah untuk menjawab kemiskinan politik masyarakat miskin belum sampai pada sasaran yang sesungguhnya, masih tereksplorasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang membuat bias pencapaian tujuan utama". (SK, Wawancara 25 April 2009)

"Musrebang yang selama ini dilakukan sama sekali belum efektif, bahkan hanya merupakan kegiatan pemborosan anggaran, karena musrebang yang idealnya menjadi media partisipasi masyarakat untuk menencanakan pembangunan, namun realitasnya wadah ini hanya menjadi kegiatan formalitas belaka". (AR, Wawancara 3 Mei 2009).

"penanggulangan kemiskinan yang digalakkan belum membangkitkan swadaya masyarakat yang maksimal, saat ini yang terlihat di masyarakat adalah semangat kebersamaan, kekeluargaan dan rasa persaudaraan sesama masyarakat sudah mulai luntur, kepekaan masyarakat kita terhadap kondisi sosial masyarakat disekitarnya juga telah memudar, sehingga pemerintah juga harus introspeksi diri bahwa mungkin pendekatan yang dilakukan selama ini ada yang harus diluruskan, yakni dengan tidak selamanya melakukan pendekatan proyek pada program-program pemberdayaan masyarakat". (HP, Wawancara 3 Mei 2009)

#### Pertanyaan tentang Keberadaan Program PPMK :

"untuk penanganan masyarakat miskin di tingkat kelurahan, dalam periode tahun 2004-2008 kita telah menganggarkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (PPMDK) yang kemudian berubah nama pada tahun 2005 menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Pada tahun 2004 dan tahun 2005 kita anggarkan dalam APBD Kota sebesar 27.500.000,- juta untuk setiap kelurahan, kemudian pada tahun 2006 dan 2007 kita tingkatkan menjadi 33.150.000,- untuk setiap kelurahan. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2007 dan 2008 kita tingkatkan kembali anggarannya menjadi 50.000.000 per kelurahan. Program kita lakukan di samping untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin, pada sisi lainnya kita harapkan pula dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses

pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam proses pengawasannya. Disamping itu kegiatan ini kita harapkan pula dapat meningkatkan kemandirian masyarakat kita dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal kelurahannya masing-masing, serta dapat meningkatkan daya dukung Pemerintah Daerah dalam pengembangan perencanaan partisipatif oleh masyarakat lokal, sehingga nantinya dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat kita, dan mereka dapat berpikir secara rasional untuk melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing". (AT, Wawancara 16 April 2009)

"kegiatan PPMK ini diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah masing-masing kelurahan. dalam 5 tahun pelaksanaan program PPMK, sebahagian besar diperuntukkan untuk pembangunan fisik, yakni seperti : sumur, jalan setapak, drainase, posyandu, gedung TK, dll. Khusus di tahun 2007 dan 2008 pembagian anggaran program disetiap kelurahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alokasi penggunaan sebagai berikut : (a) dana kegiatan atau program dibidang fisik Rp. 20.000.000,-; (b) dana kegiatan bantuan mpdal usaha bagi kelompok usaha kecil dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan sebesar Rp.20.000.000,-; (c) dana bantuan untuk pengembangan kegiatan Remaja Masjid sebesar Rp. 2.500.000,-; (d) dana bantuan untuk pengembangan kegiatan kepemudaan melalui karang taruna sebesar Rp. 2.500.000,-; (e) dana bantuan untuk operasional pelaksanaan tingkat kelurahan Rp. 5.000.000,- yang terbagi :

- 1) Intensif Tim Pelaksana PPMK tingkat kelurahan Rp. 4.400.000,-
- 2) Administrasi dan pelaporan Rp. 600.000,-

penerima dana PPMK adalah masyarakat kelurahan yang paling membutuhkan dan dianggap prioritas dengan Tim Pelaksana Kegiatan adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 3 orang yang ditetapkan melalui rapat musyawarah pengurus LPM pada masing-masing kelurahan Pelaksana PPMK adalah pengurus LPM yang mempunyai waktu untuk mengurus kegiatan PPMK. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang direkomendasikan oleh Kepala Sekretariat Program dan telah disetujui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bau-Bau sebagai penanggung jawab program, penyaluran dana terdiri dari I tahap pencairan yaitu 100 %. Penentuan kegiatan yang akan didanai oleh program ini direncanakan secara partisipatif oleh Masyarakat kelurahan dalam musyawarah didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bau-Bau dan petugas dari sekretariat Kecamatan dan Kota. Bidang kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat adalah diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan atau peningkatan kegiatan kualitas hidup masyarakat dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan". (JF, Wawancara 5 Mei 2009)

"khusus kegiatan fisik, pelaksanaannya dilakukan seperti model padat karya, yakni dengan mengambil tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin di kelurahan setempat, hal ini dimaksudkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui penyediaan lapangan kerja bagi mereka". (MZ, Wawancara 4 Mei 2009)

Pertanyaan tentang tanggapan terhadap Program PPMK :

"kegiatan PPMK cukup membantu kami dalam melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan, ada beberapa program yang dianggap penting dan diusulkan dalam Musrenbang, namun tidak teranggarkan karena keterbatasan anggaran, sehingga dengan adanya kegiatan PPMK beberapa usulan yang tidak terakomodasi dan hal itu kita anggap penting, maka dapat dilaksanakan melalui kegiatan PPMK, apalagi dengan adanya pula program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), sehingga saling bersinergi untuk menangani masyarakat miskin di tingkat kelurahan, meskipun masih adanya beberapa kendala yang terlihat, namun secara umum ada nilai positif yang dapat diambil dari kegiatan PPMK tersebut, secara jujur anggaran PPMK relatif masih kurang, namun ada hal lain yang menjadi modal kita, yaitu karena yang merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program itu adalah masyarakat sendiri, sehingga ada dukungan-dukungan lainnya yang datang dari masyarakat sendiri, baik dukungan itu berupa materi ataupun dalam bentuk dukungan lainnya seperti tenaga, ada beberapa kegiatan yang semestinya membutuhkan anggaran yang lebih besar, dan tidak mungkin terlaksana dengan anggaran yang ada, namun karena masyarakat sendiri yang melaksanakan sehingga biaya-biaya selama pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir". (LP, Wawancara 5 Mei 2009)

"harus diakui bahwa untuk dana bergulir tahun 2007 dan 2008 hampir semua kelurahan mengalami kemandekan, dana tidak bergulir sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, yakni : (i) kesadaran masyarakat penerima dana bergulir yang belum sepenuhnya bertanggung jawab, sehingga ketika fasilitator pendamping tidak ke lapangan untuk mempertanyakan pengembalian dana, maka pembayaran angsuran tidak dilakukan; (ii) keterbatasan tenaga dan waktu kerja para fasilitator, sehingga tidak dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara keseluruhan dalam waktu setahun penuh, akibat honor dan operasional fasilitator yang disiapkan hanya selama 7 bulan kerja". (HW, Wawancara 6 Mei 2009)

Pertanyaan tentang keberadaan Program PPMK :

"model *rekrutmen* tenaga kerja terkadang tidak secara terbuka disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi para pengurus program hanya melakukan *rekrutmen* secara tertutup, sehingga unsur KKN dapat terjadi dipelaksanaan kegiatan tersebut. Para tenaga kerja yang direkrut adalah mereka-mereka yang memiliki kedekatan dengan para tim pelaksana program di kelurahan, konsekuensinya adalah sasaran utama yakni masyarakat miskin dengan skala prioritas terkadang terabaikan". (AR, Wawancara 5 Mei 2009)

"pengelolaan kegiatan PPMK di kelurahan masih jauh dari sikap transparan, karena kegiatan ini masih dimanfaatkan oleh elit-elit yang ada di tingkat kelurahan, apalagi yang merekomendasikan pengurus PPMK kelurahan adalah pengurus LPM yang *notabene* merupakan perwakilan elit masyarakat/tokoh masyarakat di kelurahan, unsur masyarakat miskin terlupakan, sehingga perdebatan hanya berkisar disepertaran kepentingan mereka dan menafikan apa yang menjadi substansi dari pelaksanaan program yakni penanggulangan masyarakat miskin yang ada di kelurahan". (TA, Wawancara 5 Mei 2009)

"terkadang pembahasan program dan sosialisasi program tidak melibatkan secara keseluruhan unsur-unsur masyarakat, misalnya RT dan RW atau kelompok masyarakat lainnya, pembahasan hanya dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan lain dari kegiatan program tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada pelaksanaan kegiatan fisik, dalam penyaluran dana bergulir demikian pula adanya, masyarakat hanya mendengar bahwa ternyata ada dana bergulir yang di salurkan di masyarakat". (NH, Wawancara 5 Mei 2009)

"harus kita akui kalau masih ada sedikit persoalan dalam tataran pelaksanaan kegiatan PPMK, hal ini terjadi di karenakan beberapa hal, antara lain ; *pertama*, pemahaman masyarakat kita yang tidak paripurna tentang substansi dari pelaksanaan program tersebut, sehingga kadang pelaksanaan program melenceng dari konsep dasarnya, hal ini mungkin saja terjadi akibat sosialisasi tentang keberadaan program yang tidak maksimal; *yang kedua*, adalah kendala sosiologis, yakni mentalitas masyarakat kita, khususnya mereka-mereka yang dipercayakan untuk mengelola pelaksanaan program di di tingkat kelurahan.; dan kendala lainnya, yaitu persoalan sumber daya masyarakat miskin kita itu sendiri, yang belum cerdas dalam melihat kebutuhan dengan skala prioritas, sehingga kadang masih kurang tepat dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang mesti ditindaklanjuti, kita masih menjumpai beberapa kegiatan fisik yang kami nilai tidak terlalu *relevan* dengan substansi program, misalnya saja pembangunan pagar kantor kelurahan, padahal yang seperti ini ada pos anggarannya tersendiri, mungkin pada kebijakan yang lain.". (AM, Wawancara 6 Mei 2009).